Dr. H. Mohammad Kurjum, M.Ag.
Miftakhur Ridlo, S.Hum., M.Fil.I.

Historisitas
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Jejak Cagar Budaya di Surabaya

fp
Fatwa Publishing

Historisitas

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Jejak Cagar Budaya di Surabaya

UNDANG-UNDANG HAK CIPTA NO. 19 TAHUN 2002

Pasal 72

(1). Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

(2). Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Dr. H. Mohammad Kurjum, M.Ag
Miftakhur Ridlo, S.Hum, M.Fil.I

Historisitas
LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
Jejak Cagar Budaya di Surabaya

fp
Fatwa Publishing

HISTORISITAS LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
(Jejak Cagar Budaya di Surabaya)

Penulis:
Dr. H. Mohammad Kurjum, M.Ag
Miftakhur Ridlo, S.Hum, M.Fil.I

Editor:
Samsul Ma'arif

Desain Isi dan Cover:
Tim Fatawa Publishing

Penerbit:
FATAWA PUBLISHING
Jl. Mega Permai No. 8 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 024-74019660, 0813-2668-3562
Website: www.fatawa-publishing.com
E-mail : fatawapublishing@gmail.com

ISBN: 978-623-6408-48-3

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang No. 19 Th. 2002
All rights reserved

Cetakan Pertama, Oktober 2020

KATA PENGANTAR

Buku ini membahas tentang Historisitas Lemabaga Pendidikan Islam (Jejak Cagar Budaya di Surabaya). Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang harus diselamatkan, kami menitik beratkan kaitannya dengan dunia Pendidikan Islam di Kota Surabaya. Pelestarian nilai-nilai historis ini sangat krusial sebagai saksi bisu perjuangan laskar kerakyatan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang lebih dikenal dengan peristiwa 10 Nopember 1945.

Jenis Lembaga Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda awal dan pertengahan abad ke-20 adalah Lembaga Pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren. Kemudian Pendidikan sekolah-sekolah Islam, selain mengajarkan ilmu-ilmu umum, juga mengajarkan ilmu agama.

Pendidikan Islam di Surabaya dimulai dari peran dan dakwah oleh Sunan Ampel yang mendirikan Ampel Denta. Mendirikan pesantren sebagai pusat kaderisasi penyebar Islam di Tanah Jawa. Selanjutnya di Surabaya dikenal

dengan Pondok Pesantren Sidosermo, yang sampai saat ini menjadi pusat Pendidikan Pesantren Tua di Surabaya yang mengajarkan Pendidikan agama Islam. Di Abad ke-20 sebelum kemerdekaan, Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi besar untuk Pendidikan Agama Islam di Surabaya dengan dibentuknya HBNO yang menjadi sentrum Gerakan organisasi dan Pendidikan.

Lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial yang diperuntukkan bagi anak-anak Bumiputra antara lain Inlandsche School (Sekolah Bumiputra) kelas dua (Tweede Klasse), dengan lama sekolah lima tahun, Volksschool (Sekolah Desa) lama studi tiga tahun, serta sekolah lanjutan (Vervolgschool), yang merupakan lanjutan dari Sekolah Desa. Sekolah-sekolah tersebut berpengantar bahasa daerah.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR — v

DAFTAR ISI — vii

Bab 1 SEJARAH CAGAR BUDAYA DI SURABAYA — 1

A. Sejarah Cagar Budaya di Surabaya — 1

B. Sejarah Politik Etis di Surabaya — 4

Bab 2 BANGUNAN CAGAR BUDAYA — 13

A. Pengertian Cagar Budaya — 13

B. Tipologi Cagar Budaya di Surabaya — 18

C. Fungsi Cagar Budaya — 21

D. Keberadaan dan Jenis Cagar Budaya Surabaya Kota Pahlawan — 23

E. Jenis Cagar Budaya Pendukung Surabaya sebagai Kota Pahlawan — 36

Bab 3 PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA — 47

A. Masa Awal Pendidikan Islam di Indonesia — 47

B. Masa Pendidikan Islam Era Kolonial — 49

C. Kebijakan Kependidikan Era Belanda — 50

D. Kurikulum Pendidikan Islam Era Kolonial — 62

E. Kelembagaan Pendidikan Islam — 69

F. Lembaga Pendidikan Islam Awal di Indonesia — 75

Bab 4 PENDIDIKAN ISLAM DI SURABAYA — 101

A. Sejarah Sunan Ampel (Raden Rahmat) — 101

B. Pondok Pesantran Sidosermo Surabaya — 113

C. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama — 117

D. Al-Maratus As-Shalihah sebagai Madrasah Banat NU — 119

Bab 5 CAGAR BUDAYA BERBASIS SEKOLAH DI SURABAYA — 121

A. Sekolah Dasar Cagar Budaya di Surabaya — 121

B. Sekolah HIS Sulung — 124

C. Sekolah Rakyat — 129

D. Sekolah Pasca Kemerdekaan — 137

DAFTAR PUSTAKA — 139

Bab 1
SEJARAH CAGAR BUDAYA DI SURABAYA

A. Sejarah Cagar Budaya di Surabaya

Kota Surabaya sudah sejak abad ke-18 menjadi bagian dari penjajahan Belanda. Secara resmi kota Surabaya menjadi bagian dari kekuasaan VOC setelah pada tahun 1705 Mataram mengadakan perjanjian dengan VOC yang salah satu isinya menyebutkan bahwa VOC diberi kebebasan untuk mendirikan benteng di seluruh wilayah Jawa. Hal itu dilakukan setelah Mataram merasa berhutang budi kepada VOC yang telah membantunya memadamkan berbagai pemberontakan. Tahun 1743 Belanda memindahkan kedudukan *Gezaghebber van den Oosthoek* dari kota Semarang ke kota Surabaya, sehingga resmilah kota Surabaya menjadi bagian dari pemerintahan kolonial Belanda. Tahun 1817 kota ini menjadi tempat kedudukan Residen Surabaya, dengan demikian Surabaya merupakan ibukota karisedenan. Pada periode ini pengelolaan kota berada di bawah

otorisasi karesidenan dan secara teknis urusan kota diserahkan kepada Asisten Residen.

Tahun 1903 lahir undang-undang desentralisasi yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan kota secara otonom di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tahun setelah undang-undang itu kota Surabaya menjadi kota otonom yang memiliki pemerintahan sendiri. Sebagai pelaksanaan dari undang-undang desentralisasi tahun 1903 atau *Decentralisatie Wet 1903*, maka tanggal 1 April 1906 disahkan pemerintahan kota Surabaya yang otonom yang bernama *Gemeente* Surabaya. Berdirinya *Gemeente* Surabaya disahkan melalui *Staatsblad No. 149* tahun 1906. Dalam *Gemeente* Surabaya maka Surabaya ditetapkan sebagai kota otonom atau kota mandiri yang berkewajiban mengelola dan mendanai sendiri kota tersebut. Lebih lanjut diterangkan bahwa pemerintah pusat akan menyisihkan dana sebesar *F284.300* sebagai modal awal yang akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan *Gemeente* Surabaya.[1]

Identitas Surabaya sebagai Kota Pahlawan didasarkan pada SK Penetapan Pemerintah No. 9/UM/1946. Identitas ini dilandasi oleh rangkaian peristiwa 10 November 1945 yang menjadi peristiwa penting dan paling menentukan kelangsungan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam

[1]Purnawan Basundoro, Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906 – 2012), (Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNAIR, 2012), 13

mempertahankan kemerdekaan. Sekalipun kejadian tersebut di Surabaya, pada hakekatnya peristiwa kepahlawanan ini menjadi tonggak pertama perjuangan semesta kesatuan bangsa Indonesia melawan kolonialisme imperialisme barat. Melalui SK Walikota tertanggal 1 Maret 1973 No. 0/100/6 disebut sebagai salah satu usaha untuk mengidentifikasi identitas kota Surabaya disebut kota Pahlawan. Pengidentifikasian cagar budaya ini dilakukan dengan jalan memberikan penandaan terhadap tempat, lokasi, bangunan, monumen, tugu peringatan, lambang dan bentuk fisik lainnya. Kenyataan historis ini bila dilestarikan dapat memberi ciri khas suatu identitas kota. Hal ini didukung dari hasil Simposium Nasional tanggal 10 November 2007 di Gedung Juang Surabaya ada kesepakatan untuk mengabadikan tanggal 10 November sebagai hari Pahlawan yang perlu diperingati secara nasional khususnya di lokasi-lokasi terjadinya peristiwa yaitu di Surabaya. Perjuangan mempertahankan identitas kota Surabaya sebagai kota pahlawan mulai tahun 2008 akan menjadi agenda nasional untuk diperingati khusus di Surabaya.

Pelestarian nilai-nilai historis tersebut ditata dengan membentuk suatu kebijakan (UU) perlindungan terhadap bangunan-bangunan tua/kuno bersejarah di setiap kota sesuai dengan ciri khas daerah masing-masing. Keberadaan cagar budaya kota Surabaya sebagian besar menjadi saksi bisu perjuangan laskar kerakyatan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang lebih dikenal dengan peris-

tiwa “10 Nopember 1945”. Peristiwa perjuangan ini membawa dampak pada 2 titik pusat perjuangan yang bersifat internasional, nasional dan regional sehingga semakin memperkokoh kesan Surabaya disebut sebagai kota pahlawan. Beberapa wilayah, tempat dan bangunan yang menjadi basis perjuangan mempertahankan kemerdekaan tersebut disepakati dan dirumuskan sebagai ikon perjuangan. Untuk mewujudkan identitas Surabaya sebagai kota Pahlawan pemerintah daerah kotamadya Surabaya mengadakan pendataan dan penandaan dengan memberikan penilaian kepada tempat atau lokasi bersejarah tempat peristiwa sejarah perjuangan tersebut terjadi sebagai cagar budaya.

B. Sejarah Politik Etis di Surabaya

Pada permulaan abad 20, kebijakan penjajahan Belanda mengalami perubahan arah yang paling mendasar dalam sejarahnya. Kekuasaannya memperoleh definisi kewilayahan baru dengan selesainya upaya-upaya penaklukan. Kebijakan Belanda kini memiliki tujuan baru, eksploitasi terhadap Indonesia mulai kurang dijadikan sebagai alasan utama kekuasaan dan digantikan dengan pernyataan-pernyataan keprihatinan atas kesejahteraan bangsa Indonesia. Kebijakan ini dinamakan “Politik Etis”, Pada tahun 1901 Ratu Wilhelmina mengumumkan suatu penyelidikan tentang kesejahteraan di Jawa, dan dengan demikian politik etis secara resmi disahkan. Pihak Belanda menyebutkan tiga prinsip yang dianggap merupakan dasar

kebijakan baru tersebut: pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk.

Sebelum diterapkannya sistem pendidikan modern ala Barat yang dijalankan pada masa politik etis sebenarnya di Surabaya seperti kebanyakan daerah lainnya sudah ada pendidikan, namun pendidikan ini bersifat keagamaan, baik itu Islam dengan pondok pesantrennya dan suray atau langgar, maupun kaum missionaris gereja Nasrani yang juga sudah mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat keagamaan sebelumnya. Sebelum politik etis kita mengenal pendidikan Islam secara perorangan secar arumah tangga dan secara *surau-surau*, *langgar* dan masjid. Pendidikan melalui rumah tangga itu lebih mengutamakan pelajaran praktis misalnya tentang ketuhanan, keimanan dan masalah-masalah yang berkenaan dengan ibadah. Pemisahan pelajaran tertentu belum ada dan pelajaran yang diberikan juga belum secara sistematis. Sedangkan pelajaran surau mempunyai dua tingkatan yaitu pelajaran al-Quran dan pengkajian kitab. Adapun ciri-ciri pendidikan pada masa ini adalah pelajaran diberikan satu persatu, dan belum terlahir aliran-aliran baru.

Salah satu hal yang melatar belakangi kebijakan pendidikan di Surabaya ialah adanya aturan bahwa pihak kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah yang lokasinya terdapat orang-orang Belanda seperti kota-kota yang terdapat pelabuhan dan perkebunan. Surabaya banyak diperhatikan oleh pihak kolonial Belanda selama masa

politik etis ini, karena banyaknya warga Eropa tentu mereka juga butuh sekolah-sekolah untuk menunjang pendidikan anak mereka, selain faktor tersebut, juga majunya perindustrian di Surabaya menjadi faktor berkembangnya pendidikan. Berkatan dengan arah etis yang menjadi landasan idiil dari langkah-langkah dalam pendidikan dimasa ini, maka pemerintah mendasarkan kebijakan pada pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pendidikan dan pengetahuan Barat diterapkan sebanyak mungkin bagi golongan penduduk bumiputera, untuk itu bahasa Belanda diharapkan menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah.
2. Pemberian pendidikan rendah bagi golongan bumiputera disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Beberapa kebijakan pusat untuk Surabaya sendiri pada masa ini adalah:

1. Memberi subsidi kepala sekolah missionaris gereja yang telah lama ada sebelum masa politik etis.
2. Membangun lagi satu sekolah ELS di daerah Sawahan pada tahun 1912.
3. Mendirikan HIS pada tahun 1914.
4. Mendirikan 2 lagi HCS di Grisseesheweg kemudian satu lagi di HCS di pasar turi.
5. Mendirikan MULO tahun 1916.
6. Mendirikan KES sebuah sekolah kejuruan tahun 1912 di daerah sawahan.
7. Mendirikan sekolah tinggi kedokteran di Surabaya atau NIAS di Viaduct Straat No 47.

Pengaruh Politik Etis Sektor Pendidikan di Surabaya, diantaranya:

1. Pengaruh dalam bidang sosial

Kebutuhan akan pendidikan yang tidak lepas dari keperluan pihak kolonial Belanda akan tenaga admininstrasi dengan upah murah akibat perkembangan industri. Di Surabaya membuat pendidikan menjamur dan semakin mudah di akses oleh berbagai golongan dan lapisan masyarakat. Namun, pendidikan ala barat ini, disisi lain tidak berdampak pada pendidikan ala muslim seperti pesantren. Hal ini dikarenakan pihak kolonial tidak ingin dan khawatir akan kekuatan politik yang mungkin muncul dari kalangan pribumi muslim, oleh karena itu pihak kolonial tidak memasukkan pesantren dalam rencana pendidikannya dalam program etis ini, selain itu juga pihak Kolonial juga menilai bahwa sistem pendidikan pesantren masih sangat tradisional dan ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan sistem pendidikan yang diterapkan oleh pihak kolonial yang mengacu dan berporos kepada sistem pendidikan ala barat. Selain itu pelaksanaan politik etis bidang pendidikan yang dilakukan oleh pihak kolonial juga mengakibatkan tumbuhnya kesadaran akan harga diri sebagai bangsa.

2. Pengaruh dalam bidang ketenaga kerjaan

Dalam bidang tenaga kerja dan industri, pendidikan memiliki pengaruh yang sangat erat, karena kita tahu selain untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan bagi anak-

anak kaum Eropa yang ada di Surabaya pada masa ini, penerapan pendidikan juga salah satunya bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi bidang administratif dan industri yang berkembang pesat pada masa ini. Jadi memang pendidikan memiliki pengaruh sangat erat dalam bidang ini dan pengaruh ini dapat diliat dari perkembangan jumlah tenaga kerja dalam bidang industri dan administratif. [2]

Pengertian Cagar Budaya beragam menurut para ahli. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendevinisikan "cagar", sebagai daerah perlindungan untuk melarikan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan sebagainya. Pencagaran adalah perlindungan terhadap tumbuhan, binatang, dan sebagainya yang diperkirakan akan punah. Sehingga, hewan dan tumbuhan yang hampir punah perlu diberi pencagaran. Sedangkan budaya menurut KBBI merupakan hasil akal budi manusia. Dengan demikian cagar budaya adalah benda hasil akal budi

[2]Nurhaji Heri, Perkembangan Politik Etis Sektor Pendidikan di Surabaya Pada Masa Pemerintahan Alexander Willem Frederik Idenberg Tahun 1909 – 1916, Jurnal Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol 5, No. 1, Maret 2017, 107

manusia yang perlu diberikan pencagaran, karena jika tidak dilindungi dikhawatirkan akan mengalami kerusakan dan kepunahan.

Pengertian benda cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 Pasal 1 (ayat 1) adalah " warisan budaya yang bersifat kebendaan, berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan kawasan cagar budaya baik di darat dan /atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan /atau kebudayaan melalui proses penetapan." Benda cagar budaya adalah benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; dan benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UU No. 5/1992 Pasal 1).

Pengertian Cagar Budaya menurut UU no 5 tahun 1992, benda cagar budaya di bagi dalam 2 jenis, yaitu: 1) Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang- kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya

sekurang-kurangnya 50 tahun, serta di anggap mempunya nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 2) Benda alam yang di anggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan UU Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya.

Julukan kota Pahlawan merupakansebuah kehormatan yang didapatkan kota Surabaya, itu karena hasil dari tekad arek-arek Suroboyo melawan koloni atau penjajah. Kota Surabaya mendapat predikat tersebut juga karena di dukung oleh berbagai lokasi atau bangunan yang menjadi saksi atau bukti perjuangan arek-arek Suroboyo. Bangunan cagar budaya di Surabaya tidak sedikit dari bangunan tersebut memiliki nilai tinggi historinya, sebagai contoh Gedung Internatio, Gedung PTPN X, Tugu Pahlawan, Balai Pemuda, dan lain-lain. Berdasarkan Peraturan Daerah Perda Kota Surabaya tahun 2005, yang di maksud bangunan cagar budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 tahun, serta di anggap mempunya nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Sedangkan pengertian dari Lingkungan Cagar Budaya adalah kawasan di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan cagar budaya danatau kawasan tertentu yang berumur sekurang-

kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pengelolaan bangunan cagar budaya berdasarkan Perda kota Surabaya tahun 2005 di bagi menjadi tiga, yaitu: 1) Pelestarian atau Konservasi Pelestarian atau Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu bangunan dan / atau lingkungan cagar budaya agar makna budaya yang di kandung terpelihara dengan baik dengan tujuan untuk melindungi, memelihara dan memanfaatkan, dengan cara preservasi, pemugaran atau demolisi. 2) Perlindungan Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi segala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau proses alam, yang dapat menimbulkan kerugian atau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan bangunan danatau lingkungan cagar budaya dengan cara penyelamatan, pengamanan dan penertiban. 3) Pemeliharaan Pemeliharaan adalah upaya melestarikan bangunan danatau lingkungan cagar budaya dari keerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.

Bab 2
BANGUNAN CAGAR BUDAYA

A. Pengertian Cagar Budaya

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

Konsep pelestarian cagar budaya dalam Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dijelaskan bahwa yang dimaksud pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Rumusan ini menegaskan bahwa pengembangan dan pemanfatannya juga merupakan bagian dari pelestarian. Paradigma baru ini sesungguhnya juga berlaku untuk warisan budaya takbenda yang sebelumnya dikhawatirkan terancam bahaya karena dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata atau terpinggirkan karena dampak globalisasi kebudayaan.

UU No 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya Pasal 1 dijelaskan tentang pengertian cagar budaya meliputi:

1. Benda cagar budaya adalah: (a) benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya yang berusia sekurang-kurangnya 50 (lima puluh tahun) atau mewakili gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurangkurangnya 50 (lima puluh tahun), serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. (b) benda alam yang dianggap memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya

(Depdikbud, 1993: 98). Cagar budaya menurut Aris Soviyani (2006: 3) merupakan salah satu bentuk peninggalan dan warisan budaya nenek moyang yang mempunyai nilai sebagai sumber inspirasi bagi kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Ada beberapa pengertian yang memperjelas arti penting suatu cagar budaya sebagai aset yang patut dilestarikan keberadaannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya Bab I Pasal 1 ayat 7 menjelaskan tentang: Bangunan Cagar Budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (Pemkot, 2005: 4) Menurut Peraturan Daerah (Perda) No. 5 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Ketentuan Umum terminologi kecagarbudayaan pada Pasal 1 (1) UU No. 5 Tahun 1992 masih disebutkan dengan *term* "benda cagar budaya" dan "situs" dinyatakan secara eksplisit menjadi "bangunan cagar budaya" dan "lingkungan cagar budaya" sebagai berikut: Ps 1 (7) Perda No. 5 /2005, yang dimaksud dengan "bangunan cagar budaya" adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya

sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.

Ps 1 (8) yang dimaksud sebagai lingkungan cagar budaya ialah kawasan di sekitar atau di sekeliling bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian bangunan cagar budaya dan/atau kawasan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. (Pemkot Surabaya, 2005:4-5) Pengertian cagar budaya lainnya juga didapat dari ensiklopedi (Diknas, 2004: 13) yang menjelaskan pengertian cagar budaya adalah daerah yang kelestarian masyarakatnya dan peri kehidupannya dilindungi oleh UU dari bahaya kepunahan. Hal ini justru semakin memperjelaskan pengertian Cagar Budaya yaitu : Cagar Budaya adalah suatu wilayah yang mempunyai peninggalan budaya khas yang mengandung nilai luhur, yang dijaga kelestariannya oleh pemerintah dengan cara membatasi pengaruh modernisasi, antara lain dengan tidak diijinkannya mendirikan bangunan bercirikan kebudayaan lain (modern) di daerah tersebut.

Yang meliputi cagar budaya adalah:

a. Benda bergerak dan tidak bergerak yang dibuat oleh manusia atau yang merupakan bagian alam. Yang termasuk dalam kategori ini adalah kelompok benda dan sisa sisanya yang pokoknya berumur 50 (lima puluh) tahun atau memiliki langgam yang khas dan dapat mewakili langgam sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun serta dianggap

mempunyai nilai bagi sejarah, arkeologi dan seni rupa.

b. Benda yang dianggap mempunyai nilai penting bagi paleontropologi

c. Situs (tapak) yang mempunyai arti penting bagi sejarah dan diduga mengandung benda-benda termuat dalam ayat a dan b.

d. Tanaman dan bangunan yang terdapat diatas situs tersebut dan memiliki atau dapat memiliki kepentingan langsung bagi benda-benda yang termuat dalam ayat a, b. Perlindungan terhadap benda-benda cagar budaya tersebut pada a, b, c, dan d meliputi usaha dan kegiatan pendaftaran, pemeliharaan, pengawetan, pemugaran, ekskavasi, pengamanan, penyelamatan dan perizinan (Uka Tjandrasasmita, 1985: 16-18). Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan benda cagar budaya adalah benda buatan manusia yang bergerak atau tidak bergerak berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagian dan sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Selain itu benda cagar budaya diartikan juga sebagai benda yang dianggap memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan yang perlu mendapat perlindungan dari pemerintah. Upaya pemerintah dapat meliputi proses atau kegiatan pelestarian dengan cara melakukan pendaftaran,

pemeliharaan, pengawetan, pemugaran, ekskavasi, pengamanan dan penyelamatan serta perizinan pengelolaannya.

Kota pahlawan merupakan julukan yang telah disematkan kepada kota Surabaya sejak tahun 1950 oleh Ir. Soekarno. Julukan ini diberikan atas sejarah dan peristiwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang terjadi di kota ini. Pembangunan Tugu Pahlawan juga sebagai monumen untuk mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi. Seiring berjalannya waktu kota Surabaya berkembang menjadi kota metropolis bahkan menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta. Kemajuan perdagangan dan perekonomian di Kota ini menyebabkan berkembangnya pembangunan dan infrastruktur kota yang sangat pesat. Dimana sekrang dapat dilihat proyek-proyek bangunan tinggi seperti apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan menjamur diseluruh bagian kota.

B. Tipologi Cagar Budaya di Surabaya

Analisis untuk menentukan kriteria, tolok ukur dan penggolongan ini dirumuskan Pemkot Surabaya melalui Perda No. 5/2005, Bab IV pasal 5 sampai pasal 10. Penentuan lingkungan dan benda cagar budaya berdasarkan pada kriterianilai sejarah, umur, keaslian, kelangkaan, nilai konservasi, landmark dan arsitektur. Sedangkan tolok ukur yang digunakan berdasar pada nilai sejarah, umur

bangunan, keaslian, landmark maupun estetika arsitekturnya (Pemkot, 2003: 8-11). Menurut Perda tersebut ditetapkan ada empat golongan benda cagar budaya yaitu:

1. Golongan A adalah benda cagar budaya yang memenuhi kriteria nilai sejarah dan keasliannya, sehingga harus dipertahankan keutuhannya dengan cara preservasi, atau menjaga keaslian bangunan.
2. Golongan B adalah benda yang memenuhi kriteria keaslian, kelangkaan, landmark/tengeran, arsitektur dan umur sehingga boleh dilakukan pemugaran dengan cara restorasi atau rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Golongan C adalah benda cagar budaya yang memenuhi kriteria umur dan arsitektur sehingga boleh dipugar dengan cara revitalisasi atau adaptasi.
4. Golongan D adalah bangunan cagar budaya yang bisa dibongkar karena keberadaannya dianggap membahayakan keselamatan pengguna atau lingkungan sekitar. Sedangkan kriteria dan tolok ukur untuk lingkungan cagar budaya diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu :

Lingkungan cagar budaya golongan I yaitu lingkungan yang memenuhi seluruh kriteria, termasuk yang mengalami sedikit perubahan tetapi masih memiliki tingkat keaslian yang utuh. Lingkungan golongan II yaitu lingkungan yang hanya memenuhi 3 (tiga) kriteria, yang telah mengalami perubahan namun masih memiliki beberapa unsur keaslian. Lingkungan golongan III yaitu lingkungan yang hanya memenuhi 3 (tiga) kriteria, yang telah banyak perubahan

dan kurang mempunyai keaslian. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jenis cagar budaya secara umum dapat dikategorikan dalam lima jenis. Adapun kategori tersebut meliputi cagar budaya:

- Benda tidak bergerak seperti bangunan, monumen, maupun benda seperti candi yang tidak bisa dipindah-pindahkan.
- Bergerak adalah benda yang dapat dipindah seperti arca, relief, artefak dan peninggalan lainnya yang memiliki nilai pengetahuan, kebudayaan dan sejarah bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- Situs (tapak) biasanya merupakan satu kesatuan dari lingkungan benda cagar budaya tidak bergerak (*in situ*) sehingga diperlukan pengamanannya untuk dilestarikan keberadaannya.
- Lingkungan cagar budaya itu sendiri, benda alam dan wilayah atau keberadaan cagar budaya. Lingkungan ini biasanya menyertai dari situs yang meliputi bagian dari medan (lahan) yang di dalamnya mengandung atau dianggap atau diperkirakan mengandung benda-benda cagar budaya.
- Keberadaan benda berharga dan mempunyai nilai intrinsik tinggi yang tidak memiliki status kepemilikan sehingga perlu dikategorikan sebagai benda cagar budaya baik bergerak maupun tidak bergerak untuk dilestarikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria, tolok ukur dan penggolongan maka penentuan suatu benda, bangunan dan lingkungan menjadi benda cagar budaya dapat dilakukan berdasarkan prosedur dan proses

analisisnya. Prosedur penetapan suatu benda cagar budaya harus melalui penilaian dan pertimbangan dari Tim pertimbangan benda cagar budaya. Keberadaan cagar budaya ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengetahuan, pendidikan dan pariwisata sebagai wujud/hasil kebudayaan yang mengandung nilai sejarah perjuangan bangsa.

C. Fungsi Cagar Budaya

Cagar budaya sebagai salah satu bagian dari sejarah perjuangan bangsa dapat difungsikan sebagai bahan kajian nilai sejarah suatu bangsa, khususnya Indonesia. Keberadaan cagar budaya ini merupakan warisan sejarah yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. I Gede Widja (1989: 60) menjelaskan bahwa benda cagar budaya yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai media pengajaran dan alat bantu untuk mendukung usaha-usaha pelaksanaan strategi serta metode mengajar. Oleh karena itu benda cagar budaya memiliki manfaat untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Menurut Uka Tjandrasasmita (1980: 101) fungsi dari cagar budaya adalah

1. Sebagai bukti-bukti sejarah dan budaya yang dapat menjadi alat atau media yang mencerminkan cipta, rasa dan karya leluhur bangsa, yang unsur-unsur kepribadiannya dapat dijadikan suri tauladan bangsa, kini dan mendatang dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasionalnya berlandaskan Pancasila.

2. Alat atau media yang memberikan inspirasi, aspirasi dan akselerasidalam pembangunan bangsa baik material maupun spiritual, sehingga tercapai keharmonisan diantara keduanya.
3. Obyek ilmu pengetahuan di bidang sejarah dan kepurbakalaan pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya.
4. Alat pendidikan visual kesejarahan dan kepurbakalaan serta kebudayaan bagi peserta didik untuk memahami budaya bangsa sepanjang masa.
5. Alat atau media untuk memupuk saling pengertian di kalangan masyarakat dan bangsa serta umat manusia melalui nilai-nilai sosial budaya yang terkandung dalam peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya dari masa lampau.
6. Sebagai media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan nasional.
7. Sebagai obyek wisata yang mungkin dapat menambah pendapatan masyarakat daerah sekitarnya.

Fungsi lain dari keberadaan cagar budaya menurut Neneng Dewi Setyowati (2004: 15) yang dikutip dari Informasi Kepurbakalaan (1992: 14) menjelaskan fungsi cagar budaya adalah

1. Sebagai pola dan nara sumber insipirasi pengembangan teknologi dan sains pada bidang teknologi pemukiman, arsitektur dan teknologi

2. Sebagai obyek studi tentang berbagai aspek kehidupan masa lampau yang dapat menumbuhkan dan memperkuat kesadaran jati diri
3. Sebagai obyek wisata budaya yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk, daerah dan nasional sekaligus memperluas lapangan kerja, memelihara kualitas lingkungan hidup, menumbuhkan saling pengertian antar bangsa, mendorong pembangunan sektor-sektor lain. Berdasarkan pengertian dan fungsi dari keberadaan cagar budaya secara umum tersebut, maka mendorong cagar budaya itu dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar untuk lebih memahami nilai historis dari suatu cagar budaya. Kesadaran sejarah ini mendorong kesadaran untuk menghimpun jejak-jejak sejarah dari benda cagar budaya tersebut menjadi dianggap memiliki nilai penting. Optimalisasi cagar budaya sebagai sumber belajar dapat dilakukan secara kontinyu sehingga dapat menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pelestarian cagar budaya sebagai salah satu bagian dari pemahaman akan sejarah perjuangan bangsa.

D. Keberadaan dan Jenis Cagar Budaya Surabaya Kota Pahlawan

Berdasarkan Perda no. 5 Tahun 2005, SK Walikota dan katalog yang diterbitkan oleh Badan Arsip Kota Surabaya ada beberapa bangunan kuno sebagai bukti. perkembangan tata kota Surabaya. Bangunan kuno tersebut telah terdokumentasi dan dilindungi sebagai benda cagar budaya yang disahkan menjadi cagar budaya. Pengesahan dan inventari-

sasi terhadap benda cagar budaya di Surabaya ini terbagi dalam tiga kategori yaitu:

1. Bangunan, yaitu beberapa gedung berarsitektur unik dan memiliki nilai sejarah perkembangan kota Surabaya. Tipe bangunan ini berfungsi sebagai rumah tinggal, sekolah, maupun gedung untuk fasilitas umum. Berdasarkan pendataan jumlahnya ada 106 bangunan dengan beragam arsitektur.
2. Gedung-gedung, yaitu bangunan yang berfungsi sebagai perkantoran, bangunan industri/perdagangan, gedung administrasi, gedung fasilitas umum seperti untuk rumah sakit, penjara dan pemakaman. Data yang diperoleh ada 72 gedung yang berada di sekitar wilayah Surabaya Pusat dan Surabaya Utara yang pada waktu itu menjadi pusat tata kota.
3. Situs, sebagai bagian dari lingkungan dan tapak/sisa peninggalan yang masih dipertahankan keasliannya sebagai wujud pelestarian. Situs-situs ini terdiri dari situs kampung ada 17, situs jalan berjumlah 10, situs jembatan ada 8, situs pasar ada 5, situs stasiun ada 5 dan situs makam ada 7 serta situs pelabuhan/pantai ada 3 cagar budaya.

Walikota Surabaya juga merespon UU no 5/1992 tentang pelestarian cagar budaya dengan membuat Perda no. 5 tahun 2005 berusaha mempertahankan eksistensi bangunan/lingkungan/situs cagar budaya yang saat ini berjumlah total 163 buah. Inventarisasi ini masih bersifat sementara karena masih banyak bangunan, situs dan lingkungan yang cagar budaya yang belum terinventarisasi

secara formal. Selain melakukan inventarisasi, Pemerintah Kota (Pemkot) juga membentuk Tim Cagar Budaya dengan mengeluarkan Surat Keputusan Walikota lxxxiv no. 188.45/ 36/402.1.04/1996 pada tahun 1998 dengan menetapkan 61 cagar budaya kota Surabaya berhasi dilindungi. Hal ini diperkuat dengan penetapan kembali beberapa temuan cagar budaya baru berdasarkan SK Walikota no. 188.45/ 207/402.1.04/1998 menetapkan kembali 102 cagar budaya. Adapun inventarisasi sementara dari Tim Cagar Budaya pada waktu itu masih bersifat penggolongan fungsi cagar budaya dan peranan bangunan kuno tersebut di masa lampau hingga sekarang. Penggolongan atau kategorisasi bangunan/benda cagar budaya tersebut dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Kategorisasi Benda Cagar Budaya di Surabaya[1]

No.	Kategori	Jumlah	Prosentase
1.	Sarana Kesehatan	5	3,07 %
2.	Sarana Pendidikan	11	6,75 %
3.	Sarana Ibadah	6	3,68 %
4.	Perkantoran	59	36,20 %
5.	Perindustrian	3	1,84 %
6.	Perkampungan dan rumah pribadi	24	14,72 %
7.	Bangunan Komersial	21	12,88 %
8.	Fasilitas Umum	28	17,18 %
9.	Kantor pemerintah (BUMN)	4	2,45 %
10.	Sarana Hiburan	2	1,23 %
T O T A L		163	100,00 %

[1]Sumber: "Perencanaan Pelestarian Benda-Benda Cagar Budaya" Bappeko, 2003

Berdasarkan data tabel 1 di atas, disebutkan bahwa terjadi perbedaan total jumlah pendokumentasian yang dilakukan oleh Badan Arsip Kota berjumlah 213 cagar budaya dengan yang dilakukan oleh Bappeko berjumlah 163. Sedangkan pendataan terakhir yang dilakukan oleh Disbudpar Kota tahun 2009 menyebutkan bahwa keberadaan cagar budaya Surabaya saat ini tinggal 157. Inventarisasi keberadaan cagar budaya kota Surabaya ini mengalami penyusutan terkait dengan pemekaran tata kota dan kepentingan nilai historis cagar budaya tersebut sebagai pendukung identitas historis suatu kota. Penegasan pengaturan dan penentuan status cagar budaya yang ada di Surabaya oleh Pemkot Surabaya ditetapkan dalam Perda Tahun 2003 bab III pasal 4 yang berisi tentang:

1. Benda cagar budaya dikuasai oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk sebesar besarnya bagi kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa.
2. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berwenang:
    a. Menentukan kriteria serta menggolongkan lingkungan dan bangunan cagar budaya
    b. Menetapkan kawasan, benda dan bangunan sebagai benda cagar budaya
    c. Melestarikan lingkungan dan bangunan cagar budaya

d. Mengatur pemanfaatan benda cagar budaya
e. Mengelola lingkungan dan benda cagar budaya
f. Menetapkan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan bagi pemugaran dan atau pembongkaran benda cagar budaya
g. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, dan pelaksanaan pemugaran benda-benda cagar budaya.

Adapun cagar budaya yang sudah teriventarisasi oleh Pemkot berdasarkan periodisasi waktu perkembangan pembangunan tata kota dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Cagar budaya berdasarkan periodisasi waktu sebelum Tata Kota Modern[2]

No.	Periodisasi / Masa	Jml.	Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya	Lokasi	Ket.
1. 2.	Praseja rah Hindu Budha Budha Islam	1 10 1 7	Situs ritual acara ber- sih desa, Joko Dolog, Lawang Sekethang, Alun-alun Contong Simokerto, Kampung Surabayan,	Situs Artefak Bangun an Situs Situs Situs Situs Situs Situs Situs Situs	Ds. Gadelsari Kec. Tandes Jl. Taman Apsari Jl. Peneleh Pertigaan Kec. Simo- kerto Jl. Surabayan daerah Keputran	Sudah hilang Arca perwujud- an Awal perla- wanan/per- juangan, Jl. Gemblongan, Jl. Pahlawan, Jl. Kramat Gan- tung, tempat R. Wijaya di- selamatkan,

[2]Sumber Data olahan dan Memori Kolektif Masyarakat Surabaya lxxxix

No.	Periodisasi / Masa	Jml.	Cagar Budaya	Jenis Cagar Budaya	Lokasi	Ket.
			Kampung Keputran, Kampung Penelehan, Makam Tembaan, Makam Bata Putih, Pintu Air Jagir (Pacekan) Ampel Gubah/ Dagooba, Stupa Kembang Kuning, Taman Budaya, Kampung Kraton, Kampung Ampel/ Ampel Denta, Makam Sunan Bungkul, Kampung Kepatihan, Makam Kyai Habig	Bangunan Situs Situs Situs Situs Bangunan	daerah Peneleh Jl. Tembaan Jl. Pegirian Jl. Jagir Kampung Ampel Jl. Kembang Kuning Jl. Genteng-Kali 85 Kampung Kraton Daerah Ampel Taman Bungkul Daerah Kepatihan Jl. Ampel Melati	Nama awal kota Surabaya, Tempat para istri dan putera raja, Bentuk asli kampong kota Surabaya, Makam keluarga raja Surabaya, Tempat suci agama Wisnu, Perlawanan R. Wijaya melawan pasukan Tar-tar, Tempat suci agama Budha, Masjid Tertua Islam, Makam masyarakat Eropa, Kadipaten Kanoman, Lokasi kraton pangeran Pekik, Pusat Islam tertua, Perdikan/desa penambangan, Tempat para Patih

Pada tabel 2 dijelaskan bahwa sebagian besar cagar budaya yang ada di Surabaya menunjukkan periodisasi

perkembangan tata kota yang terus menerus. Keberadaan cagar budaya sejak masa Prasejarah sampai masa Islam telah menunjukkan peninggalan-peninggalan yang berharga untuk dilestarikan. Penataan tata kota modern pada masa pemerintahan Kolonial Belanda tetap mempertahankan keberadaan cagar budaya tersebut sesuai dengan kondisi aslinya. Pembangunan berkelanjutan tersebut semakin menambah jumlah dan keragaman cagar budaya yang tumbuh di Surabaya dan memperkaya inventarisasi Pemkot. Disbudpar Kota sebagai pelaksana perlindungan dan pelestarian cagar budaya diperkuat dengan SK Walikota untuk melindungi keberadaan cagar budaya. Eksistensi Disbudpar Kota untuk terus mengkonservasi sudah memiliki rekapitulasi tentang keberadaan cagar budaya yang ada di Surabaya. Data iventarisasi cagar budaya Surabaya yang sudah digolongkan sesuai dengan tingkat keaslian dan nilai sejarahnya dengan hasil cagar budaya yang masuk dalam kategori A berjumlah 33, kategori B berjumlah 33 dan kategori C ada 14 bangunan/ lingkungan cagar budaya (Lihat Lampiran 4). Pelaksanaan dan penentuan klasifikasi golongan dari bangunan atau lingkungan cagar budaya ini merupakan salah satu bentuk kongkrit pelestarian Pemkot yang diatur melalui Peraturan atau SK Walikota. Pelestarian ini diperjelas dengan meletakkan tanda/prasasti bertuliskan cagar budaya pendukung identitas kota Surabaya. Ada beberapa lokasi cagar budaya sesuai dengan peta kewilayahan.

Tabel 3. Daftar Situs dan Bangunan Cagar Budaya Kota Surabaya[3]

No.	Wilayah	Kecamatan	Jml.	Situs dan Bangunan Cagar Budaya
1.	Surabaya Utara	Pabean Cantikan Semampir	68 4	Lihat lampiran 3 Masjid Ampel, Makam Kyai Habiq, Toko buku Sahabat Ilmu dan Kampung Ampel (**Situs**)
2.	Surabaya Pusat	Genteng Simokerto Tegalsari Bubutan	34 2 12 16	Lihat lampiran 3 Makam Boto Putih, (**Situs**) Simokerto RS. Darmo, SMP/ SMA Santa Maria, SMA IMKA, SMA St. Louis, Kampung Surabayan, Rumah Tinggal, Jl. Mawar 10-12, Gereja Kristen Indonesia, Gedung Wismilak, Perumahan Darmo (**Situs**), Rumah Tangga, Jl. Bintoro 2, Toko Nam, Gedung Dinas Sosial, Gedung STM Negeri Surabaya, Ex Mess Mahasiswa Airlangga, Gedung GNI, Viaduct KA, Jl. Pahlawan dan Bubutan, Penjara Koblen Makam Tembaan, RS Griya Husada, Gereja BPIB Immanuel, Kantor PMK KMS, Kampung Kraton (**Situs**), Kampung Praban (**Situs**), Baliwerti (**Situs**), Tumenggungan (**Situs**), Kawatan (**Situs**), Pusat Pertokoan, Jl. Penghela, Alun-alun Contong (**Situs**)
3.	Surabaya Selatan	Sawahan Dukuh Pakis Wonokromo	2 3 8	Sekolah dan panti asuhan Don Bosco Pengadilan Negeri Surabaya Makam FJ Rothenhuhier Monumen Kancah Yudha Mastrip Lapangan Golf A. Yani Museum Mpu Tantular, Makam Kembang Kuning, Makam Sunan Bungkul, Pabrik Multi Bintang Indonesia, Pintu Air Jagir (**Situs**), Kebun Binatang Surabaya, Gelora Pancasila, Lapangan THOR
4.	Surabaya	Tambaksari	2	Rumah WR Soepratman Gedung

[3]Disbudpar Kota, 2009 xci

No.	Wilayah	Kecamatan	Jml.	Situs dan Bangunan Cagar Budaya
	Timur	Gubeng	4	Gelora 10 November RSUD Dr. Soetomo Fakultas Kedokteran UNAIR Stasiun Gubeng Kolam Renang Brantas
TOTAL			155	

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwa keseriusan Pemkot dalam proses inventarisasi di wilayah administrasi Surabaya ternyata tidak semuanya memiliki bangunan/ benda cagar budaya. Ada beberapa kecamatan yang memiliki bangunan cagar budaya pendukung perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan pendidikan serta nilai perjuangan pada waktu itu seperti di wilayah Surabaya Barat dan Surabaya Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa jejak dan nilai sejarah kota Surabaya memiliki identitas sebagai kota Pahlawan dan sebagai kota Budipamarinda dapat terwakili oleh beberapa cagar budaya tersebut di atas. Upaya pelestarian akan keberadaan cagar budaya terkait dengan sejarah perjuangan, khususnya gedung/bangunan adalah sangat ideal apabila dilestarikan dalam keadaasn tertentu tanpa mengadakan perubahan. Bangunan/gedung cagar budaya tersebut dapat dijadikan aset budaya untuk mendukung wajah dan identitas kota Surabaya layak disebut kota pahlawan. Berdasarkan rekapitulasi yang telah didata oleh Disbudpar Kota (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota) serta SK Walikota no.188.45/251/ 402.1.84/96 dan no. 188.45/004/402.1.04/98.

Tabel 4. Rekapitulasi daftar BCB/Situs Kota Surabaya [4]

No.	Wilayah	Kecamatan	Jumlah BCB/Situs
1.	Surabaya Utara	Krembangan	42
		Semampir	5
		Pabean Cantikan	30
2.	Surabaya Pusat	Genteng	34
		Tegalsari	13
		Bubutan	18
		Simokerto	1
3.	Surabaya Timur	Tambaksari	2
		Gubeng	3
4.	Surabaya Selatan	Wonokromo	7
		Sawahan	3
T O T A L			158

Pendataan awal juga dilakukan Badan Arsip Kota Surabaya yang menunjukkan bahwa ada 213 cagar budaya kota Surabaya, tetapi tahun 2009 mulai berkurang karena proses pemekaran tata kota. Penelusuran dan penyelamatan semakin digiatkan dengan melakukan observasi ke tempat yang diduga sebagai benda cagar budaya untuk segera diinventarisasikan sebagai cagar budaya. Pendataan yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya terhadap keberadaan cagar budaya terbagi dalam 3 kategori, yaitu: Benda tidak bergerak seperti bangunan dan gedung-gedung yang tersebar di empat wilayah kota Surabaya yaitu di wilayah Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan.

[4]Disbudpar Kota, 2007 xcii

Tabel 5. Bangunan Cagar Budaya Kota Surabaya[5]

No.	Jenis Cagar Budaya	Fungsi Cagar Budaya	Jumlah
1.	Bangunan	Sarana Umum Sarana Pemerintahan Perkantoran/Pertokoan Sarana Ibadah Sarana Kesehatan (Rumah Sakit) Rumah Tinggal Sarana Pendidikan Monumen (Penanda)	16 95 94 18 11 8
2.	Gedung	Kantor Kompleks Pertokoan Pabrik Hotel Bank Rumah Sakit Khusus Mata	48 34 1 10 1
T O T A L			147

Situs sebagai satu kesatuan dari lingkungan benda cagar budaya tidak bergerak (*insitu*). Penelusuran dan pengelompokan situs berdasarkan fungsinya ini secara jelas dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel 6. Situs Cagar Budaya Kota Surabaya

No.	Jenis Cagar Budaya	Nama Cagar Budaya	Jumlah
1.	Situs Makam	Makam Habib, Makam Sunan Bungkul, Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa, Pesarean Pangeran Joko Kardono, Makam Mbah Ratu (Sam Poo Tay Djien), Makam Bata Putih dan Taman Makam Belanda	7
2.	Situs Jembatan	Jembatan Petekan, Jembatan Alun-Alun Contong, Viaduct Gubeng, Viaduct Kereta Api (Jl. Pahlawan, Jl. Bubutan), Jembatan	8

[5]Data Olahan dari Arsip Kota dan Disbudparkota

No.	Jenis Cagar Budaya	Nama Cagar Budaya	Jumlah
		Merah, Jembatan Delta dan Jembatan Jagir	
3.	Situs Pasar	Pasar Blauran, Pasar Malam Keputran, Pasar Kapasan, Pasar Pabean, Pasar Tunjungan dan Pasar Turi	6
4.	Situs Stasiun	Stasiun Gubeng, Stasiun Surabaya Kota (Stasiun Semut), Stasiun Dipo Sidotopo, Stasiun Pasar Turi dan Stasiun Kereta Listrik Sawahan	5
5.	Situs Pelabuhan	Pelabuhan Tradisional, Pelabuhan Kalimas dan Pantai Kenjeran	3
6.	Situs Jalan	Koridor Jl. Tunjungan, Pertokoan Gem-blongan, Perkantoran Jl. Pang. Sudirman, Jl. Kembang Jepun (Kya-Kya), Segi Lima Ampel, Jl. Panggung Ampel, Kawasan Jl. Niaga, Alun-Alun Contong, Jl. Pasar Turi dan Pertokoan Jl. Kalimati Wetan	10
7.	Situs Kampung	Kampung Tumenggungan, Kawatan, Kampung Surabayan, Kampung Kraton, Kampung Bubutan, Kampung Peneleh, Kampung Kawatan, Kampung Maspati, Kampung Seng, Kampung Kertopaten, Kampung Kepatihan, Kampung Ampel, Kampung Genteng Bandar Lor, Perempatan Kampung Waspada, Kampung Sasak, Kampung Plampitan dan Kampung Songoyudan	17
T O T A L			56

Lingkungan cagar budaya yaitu kawasan di sekitar cagar budaya yang diperlukan sebagai pendukung peles-

tarian bangunan atau situs cagar budaya. Yang termasuk di dalam lingkungan cagar budaya ini adalah situs jalan dan situs kampung. Sementara ini konsentrasi Pemkot dan Disbudpar kota saat ini masih terkonsentrasi untuk menggali nilai historis dan menganalisis benda cagar budaya yang meliputi bangunan, situs dan artefak-artefak pendukung identitas kotanya. Sedangkan lingkungan cagar budaya belum dikaji dengan baik tetapi sudah ada tindakan untuk memperhatikan konservasi perluasan dan pemetaan tata ruang kota selanjutnya.

Demikian juga pengkategorian jenis cagar budaya untuk benda bergerak seperti perangkat yang digunakan saat peristiwa 10 November 1945 memang dengan sengaja tidak dicantumkan. Hal ini disebabkan konsentrasi penelitian lebih terfokus pada jenis cagar budaya tidak bergerak seperti bangunan, arsitektur pendukung identitas kota, monumen, gedung dan situs yang menunjukkan aktivitas pada masa itu. Berdasarkan data invetarisasi yang sudah dilakukan oleh Disbudpar Kota dan Tim Cagar Budaya Kota Surabaya maka dapat dilihat bahwa keberadaan cagar budaya kota Surabaya telah mendukung perkembangan dan identitas kota Surabaya. Namun, identitas kota beserta cagar budaya pendukungnya ternyata belum mampu menumbuhkan sikap pelestarian dan perlindungan terhadap keberadaan cagar budaya itu sendiri. Sedangkan penggolongan dan kriteria cagar budaya kota Surabaya sudah terinventarisasi melalui SK Walikota berjumlah 161 benda

cagar budaya. Penandaan melalui pemberian papan nama dan prasasti merupakan bentuk upaya penyelamatan cagar budaya yang tidak boleh dirubah sudah berjumlah 80 cagar budaya. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah kota terhadap keberadaan cagar budaya kota Surabaya menjadi salah satu factor pendukung identitas kota sebagai kota pahlawan dan sebagai kota budipamarinda.[6]

E. Jenis Cagar Budaya Pendukung Surabaya sebagai Kota Pahlawan

Predikat Surabaya sebagai kota Pahlawan dilandasi alasan kuat yaitu rangkaian peristiwa 10 November 1945 sebagai simbol perjuangan yang paling menentukan bagi kelangsungan kemerdekaan bangsa Indonesia. Pertempuran 10 November 1945 bukan sekedar pertempuran yang telah menelan banyak korban, heroisme dan patriotik, tetapi ada beberapa hal pokok yang perlu menjadi catatan sejarah, yaitu:

a. Pencerminan ketegasan sikap rakyat Indonesia yang menolak kolonialisme imperialisme kembali di Indonesia. Hal ini ditandai dengan penolakan terhadap ultimatum dari Sekutu dan sikap tegas rakyat Surabaya mempertahankan kotanya dari serangan pihak Sekutu.

[6]Septina Alrianingrum, Cagar Budaya Surabaya Kota Pahlawan Sebagai Sumber Belajar (Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Surabaya), Tesis: Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, xcv

b. Sikap rakyat Surabaya ini berhasil mengobarkan semangat perjuangan di daerah luar Surabaya sehingga di segala penjuru Indonesia siaga dan siap tempur untuk melawan kolonialisme.
c. Terbukanya perundingan-perundingan yang memposisikan Indonesia sejajar dengan Inggris dan Belanda di dunia internasional.
d. Peristiwa 10 November 1945 menjadi tonggak perjuangan fisik dan diplomasi rakyat semesta Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Surabaya yang memiliki identitas sebagai kota Pahlawan dan budipamarinda memerlukan perhatian khusus dengan jalan terus mengiventarisasi keberadaan cagar budaya pendukungnya. Pada masa awal inventarisasi saat ini Pemkot masih berkonsentrasi terhadap beberapa cagar budaya masa kolonial, sedangkan cagar budaya pada masa-masa sebelumnya (masa awal-Islam masuk di Surabaya) masih dalam taraf perencanaan penelusuran. Kondisi ini disebabkan karena penelusuran historis dari cagar budaya masa-masa tersebut lebih banyak bersifat memori kolektif masyarakat sekitarnya. Kesulitan ini mendorong Pemkot terus berupaya menggali informasi dan mencocokkan dengan berbagai dokumen untuk mengkaji nilai suatu benda/bangunan/situs yang diduga sebagai benda cagar budaya. Alasan dasar Surabaya disebut sebagai kota Pahlawan terkait dengan

tatanan masyarakat yang heterogen telah memiliki kematangan mental dan fisik untuk mewujudkan citra kepahlawanannya. Wujud kepahlawanan ini dapat digambarkan dalam dua klasifikasi historis berkaitan dengan peristiwa 10 November 1945.

Klasifikasi historis ini mencakup wilayah perjuangan dan lingkungan cagar budaya yang mendukung Surabaya disebut sebagai kota Pahlawan yaitu:

- Wilayah fokus perjuangan, yaitu wilayah yang sangat menonjol, penting dan langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Yang termasuk dalam fokus ini adalah wilayah seputar Tugu Pahlawan dan Jembatan Merah yang mewakili proses perjuangan '*arek-arek Suroboyo*' dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Keberhasilan dan sikap pantang menyerah dari '*arek-arek Suroboyo*' dalam menentang 3 bentuk imperialisme kolonialisme Jepang, Belanda dan Inggris di gedung Kempetai, gedung Internatio dan pusat kota. Gaung perjuangan ini secara politik, ekonomi dan kemiliteran telah membawa pengaruh dalam kebijakan secara internasional, nasional dan menjadi penyemangat perjuangan di daerah-daerah.
- Wilayah percikan, yaitu wilayah yang sebagian besar memenuhi syarat-syarat strategis dan historis untuk mendukung peristiwa historis itu

terjadi. Luas pengaruh dari peristiwa itu tergantung pada sifat dan besar kecilnya peristiwa itu sendiri seperti di wilayah Tunjungan, Darmo, Gubeng, Pasar Kembang dan beberapa wilayah yang dipakai sebagai tempat pertahanan militer lascar kerakyatan pada waktu itu. Penggalian-penggalian nilai-nilai historis tersebut dapat terwakili dalam sisa-sisa cagar budaya yang telah membawa Surabaya dikukuhkan sebagai kota Pahlawan. Situs Pelabuhan (Ujung dan Tanjung Perak) yang strategis menjadi bukti pertahanan masa revolusi fisik dari serangan bangsa Belanda, Inggris, dan Jepang. Tempat (bangunan) yang menjadi basis perjuangan seperti hotel Yamato, Gedung Kempetai, Jembatan Merah, wilayah tugu pahlawan, Situs jalan seperti Tunjungan, Embong Malang, Pahlawan, Kebonrojo dan jalan lainnya semakin menggambarkan bahwa Surabaya pantas disebut Kota Pahlawan. Heroisme dan semangat patriotisme "*arek-arek Suroboyo*" era revolusi fisik tahun 1945-an telah menggema secara regional, nasional dan internasional.

Pertimbangan penelusuran cagar budaya di kota Surabaya yang mencerminkan sebagai kota Pahlawan tersebut ada 2, yaitu:

1. Pertimbangan nilai historis sebagai dasar utama sejarah kota Surabaya disebut sebagai kota Pahlawan adalah:

- Sifat peristiwa sejarah yang terjadi pada suatu tempat (sifatnya internasional, nasional atau regional
- Pentingnya peristiwa yang terjadi pada suatu tempat
- Pengaruh peristiwa yang terjadi pada suatu tempat terhadap jalannya sejarah

2. Pertimbangan berdasarkan kriteria strategis dari suatu lokasi bersejarah yaitu:
   - Lalu lintas yang ada disekitar lokasi cagar budaya tersebut.
   - Keindahan yang berpengaruh terhadap perencanaan perkembangan kota dari lokasi bersejarah.
   - Adanya areal tanah yang kosong yang terdapat di sekitar sesuatu lokasi bersejarah yang memungkinkan untuk membangun sesuatu monument.
   - Nilai pendidikan yang dapat dihayati oleh orang banyak dari monumen yang dibangun di sesuatu lokasi.

Perhatian Pemkot Surabaya terhadap keberadaan cagar budaya kota Surabaya ditingkatkan dengan memberikan beberapa penanda. Penanda dan pendataan tersebut berupa SK Walikota, peletakan papan nama dan prasasti di lokasi cagar budaya tersebut. Penetapan ini terus dilakukan untuk menelusuri bangunan atau lingkungan cagar budaya yang belum terdata dengan baik. Upaya

penyelamatan dan kebijakan pemerintah untuk menelusuri keberadaan cagar budaya sebagai salah satu bagian dari pendukung identitas kota semakin ditingkatkan. Melalui koordinasi antar instansi serta dukungan para pemerhati tata kota akhirnya cagar budaya Surabaya kota Pahlawan mulai dapat diinventarisasikan. [7]

Konservasi atau pelestarian adalah salah satu jenis pendekatan dalam perencanaan kota atau penataan ruang. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya menyatakan bahwa pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, melindungi dan memelihara bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan, serta memanfaatkan bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya demi kepentingan pembangunan. Upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya di Indonesia menjadi isu penting dan berkembang sekitar tahun 1990 dalam penataan ruang di Indonesia.

Di Surabaya sendiri, upaya pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikotamadya Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 terdiri dari 61 obyek

[7] R Dimas Widya Putra, Identifikasi Kelestarian Kawasan Kota Lama Melalui Proteksi Bangunan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kota Surabaya, Jurnal Pengembangan Kota (2016), Vo. 4, No. 2 (150)

bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan SK Walikota Nomor 188.45/004/402.1.04/1998 yang terdiri dari 163 obyek bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya. Dalam hal ini dapat direkapitulasikan bahwa total jumlah bangunan cagar budaya adalah 132 obyek dan jumlah lingkungan cagar budaya sebanyak 20 obyek. Dengan adanya peraturan dan keputusan yang dikeluarkan demi mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya ini rupanya tidak mengurangi potensi pengrusakan ataupun pemugaran bangunan cagar budaya dan perubahan fungsi lahan pada kawasan cagar budaya.

Salah satu contohnya adalah kawasan Bubutan di Surabaya. Menurut Surat Keputusan Walikotamadya Surabaya Nomor 188.45/251/402.1.04/1996 dan SK Walikota Nomor 188.45/004/402.1.04/1998, daerah kawasan Bubutan termuat sebagai lingkungan cagar budaya dengan adanya situs Kampung Kraton, Kampung Kawatan, Alun-Alun Contong, Kampung Baliwerti, Situs Tumenggungan, dan Kampung Kepatihan. Partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan budaya merupakan salah satu prioritas yang harus tercapai dalam setiap kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya yang berwawasan pelestarian. Upaya pelestarian yang dilakukan haruslah berdampak pada meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan bangunan-benda cagar

budaya sehingga masyarakatlah nanti yang akan lebih berperan serta, pemerintah hanya mengayomi dan mengawasi sehingga tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku tentang pelestarian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya di Bubutan adalah sebagai berikut.

1. Semakin lama seseorang tinggal di suatu wilayah, maka rasa memiliki akan suatu wilayah lebih terlihat, dan partisipasinya dalam suatu kegiatan lebih besar. Semakin lama seseorang tinggal di kawasan cagar budaya, rasa memiliki masyarakat atas kawasan tersebut semakin tinggi, karena meraka sudah merasakan manfaat yang sudah mereka peroleh dari kawasan tersebut.
2. Motivasi yang mendasari seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Faktor motivasi tersebut dapat berupa kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kawasan cagar budaya, motivasi tersebut juga dapat muncul karena adanya manfaat dari kawasan tersebut untuk masyarakat yang tinggal di kawasan cagar budaya tersebut. Selain itu masyarakat juga mau berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya didorong dengan adanya motivasi untuk kepentingan masyarakat tersebut atau organisasi tertentu.

3. Perbedaan usia akan mempengaruhi gaya peran serta. Faktor usia mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Dalam kenyataannya, seseorang yang usianya dikatakan dewasa lebih dapat merasakan manfaat dari keberadaan kawasan cagar budaya di Bubutan daripada anak-anak. Di Bubutan sendiri sudah muncul perkumpulan anak muda untuk pelestarian kawasan cagar budaya seperti yang ada di Kampung Tambak Bayan dan Kepatihan. Selain itu, informasi mengenai kawasan cagar budaya saat ini mudah didapatkan dimanapun, sehingga tidak hanya seseorang yang sudah tinggal lama di Bubutan yang dapat berpartisipasi dalam pelestarian kawasan cagar budaya, namun anak muda pun juga dapat berpartisipasi.
4. Semakin tinggi pendidikan seseorang, mempengaruhi sikap masyarakat dalam berpatisipasi. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, informasi mengenai program pelestarian kawasan cagar budaya lebih mudah untuk diberikan dan dipahami. Sebagian besar masyarakat di Bubutan berpendidikan terakhir SMA, sehingga sebagian besar masyarakatnya memahami tentang kawasan cagar budaya dan pelestariannya.
5. Jenis pekerjaan tersebut mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pengaruh masyarakat terhadap peran serta masyarakat dalam pelestarian kawasan cagar budaya. Jenis

pekerjaan yang digeluti masyarakat Bubutan berpengaruh dalam pelesatrian kawasan cagar budaya di Bubutan. Sebagian besar masyarakat Bubutan merupakan pengusaha atau pedagang, sehingga inisiatif untuk pelestarian kawasan cagar budaya sedikit kurang kecuali beberapa orang yang pekerjaannya berkaitan dengan cagar budaya.[8]

[8]Volare Amanda Wirastari dkk, Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus : Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya), Jurnal Teknis ITS, Vol 1, No. 1 (September 2012), 66

Bab 3
PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

A. Masa Awal Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam di Indonesia telah berlangsung sejak masuknya Islam ke Indonesia.[1] Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan kapan pertama kali masuknya Islam ke Indonesia, kelompok pertama yang terdiri dari Snouck Hurgronye, J.P Moquette, R.A. Kern dan beberapa ahli lainnya, berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 M kemudian tidak langsung dari Arab, tetapi dari Gujarat. Pendapat ini didasarkan kepada penemuan nisan Sultan Malil Al-Salih (w. 696 H / 1297 M) yang mirip dengan nisan di Gujarat. Kelompok kedua adalah T.W. Arnold, Syed Muhammad Naquib al-Attas, Hamka dan lainnya menyatakan bahwa masukknya Islam ke Indonesia terjadi sejak abad pertama Hijriyah dibawa pedagang Arab. Pendapat ini didasarkan pada arus perdagangan penduduk di Selatan Semenanjung tanah Arab yang telah pergi pulang

[1]Haidar Putra Dauly, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2001), ix

ke gugusan pulau Melayu. Penduduk yang tinggal di Selatan semenanjung tanah Arab ini telah mendapat dakwah Islamiyah sejak awal perkembangan Islam dan semakin massif setelah Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mengajarkan al-Qura'an dan hukum-hukum agama.[2]

Pendidikan ini awalnya terlaksana setelah adanya kontak antara pedagang atau *mubaligh* dan Masyarakat sekitarnya. Kegiatan *mubaligh* yang menyampaikan ajaran Islam dapat digolongkan sebagai aktifitas pendidikan karena termasuk unsur Pendidikan ada lima yaitu: pemberi (pendidik/dalam hal ini pedagang atau *mubaligh*), menempuh cara yang baik (proses pendidikan), penerima (masyarakat), tujuan yang baik (tujuan Pendidikan), dan adanya konteks yang positif (materi Pendidikan).[3] Kontak ini bentuknya lebih mengarah pada Pendidikan informal.

Selanjutnya, setelah Masyarakat Islam terbentuk, maka yang mejadi perhatian utama adalah mendirikan rumah ibadah (masjid, surau dan langar). Karena umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan salat lima waktu sehari semalam dan sangat dianjurkan untuk berjamaah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid, surau, dan langar dijadikan pula sebagai tempat berlangsungnya proses Pendidikan. Hal

[2]Uka Tjandra Sasmita, Proses Kedatangan dan Munculnya Kerajaan Islam di Aceh, dalam A. Hasymy, ed., Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia, (http:Al-Ma'arif, cet iii, 1993), 358 - 360

[3]Noeng Muhadjir, Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1987), 15

ini sesuai dengan contoh yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, beliau telah menjadikan masjid Madinag sebagai tempat berlangsungnya proses Pendidikan dan inilah yang diikuti pula oleh khalifah sesudah beliau. Dalam konteks Indonesia, Haidar Dauly mengatakan bahwa setelah terbentuknya Masyarakat Muslim, dapat dipastikan bahwa mereka membangun masjid. Dengan adanya masjid tersebut dapat pula dipastikan bahwa mereka menggunakannya juga sebagai tempat berlangsungnya proses Pendidikan Islam.[4]

B. Masa Pendidikan Islam Era Kolonial

Sejak kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, dimulai pada tahun 1595 M, mulanya praktik Pendidikan Islam di masjid, surau, langar dan pesantren tetap berjalan seperti biasa, namun selanjutnya sesuai dengan ketentuan pernyataan yang terdapat dalam dokumen VOC yang menyatakan bahwa : VOC ini harus berniaga di Indonesia dan bila perlu berperang, serta harus memperhatikan penyebaran agama Islam dengan mendirikan sekolah. Sehubungan dnegan ketentuan ini, Gubernur Van Den Cappelen pada tahun 1819 M, merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintah Belanda dalam memuluskan rencananya serta menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi

[4]Hasan Putra Daulay, Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia, (Bandung : Citapustaka, 2013), 44-45

penduduk pribuni agar mereka lebih mudah untuk dapat menaati undang-undang dan hukum negara yang dibuat negara Belanda.[5]

Sejak keluarnya edaran tentang pendirian sekolah-sekolah umum oleh Belanda, selanjutnya Pendidikan agama Islam baik yang dilaksanakan di mushalla, masjid, pesantren dan madrasah dianggap tidak ada gunanya, karena sama sekali tidak membantu pemerintah Belanda, serta tidak ada kaitannya sama sekali dengan kemajuan Pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lebih dari itu, Belanda menganggap bahwa agama Islam justru sebagai faktor penghambat dan penghalang bagi kemajuan dan kepentingan Belanda. Hingga pada akhirnya kebijakan pemerintah colonial Belanda melahirkan dikotomi terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan umum.

C. Kebijakan Kependidikan Era Belanda

Kedatangan Belanda ke Indonesia dikategorisasikan tiga tujuan: pertama, tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi (*Gold*), kedua, tujuannya adalah mendapatkan kekuasan politik yaitu menguasai wilayah Indonesia (*Glory*), ketiga, tujuannya adalah menyebarkan ideologi dan keagamaan (*Gospel*).[6]

[5]Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003), 123 - 125

[6]Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 275

Tujuan yang bersifat ekonomi dari kedatangan Belanda ke Indonesia dimulai pada tahun 1595 M, yaitu berupa armada kapal dagang yang diutus oleh Perseroan Amsterdam. Setelah itu menyusul Angkatan kedua tahun 1598 M dibawah pimpinan Van Nede, Van Heemskerck, dan Van Marwijck. Selain dari Amstersdam, datang juga beberapa kapal dari berbagai kota Belanda. Angkatan ketiga berangkat tahun 1599 M dibawah kepemimpinan Van Der Hagen, dan Angkatan keempat tahun 1600 M dibawah pimpinan Van Neck.[7]

Setelah diketahui bahwa hasil yang diperoleh Perseroan Amsterdam cukup besar, banyak perseroan lain berdiri yang ingin berdagang dan berlayar ke Indonesia. Pada bulan Maret 1602 M, perseroan-perseroan itu bergabung dan disahkan oleh Staten General Republik dengan suatu piagam yang memberikan hak khusus kepada perseroan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di Kawasan antara Tanjung Harapan dan kepulauan Soloman, termasuk kepulauan Nusantara. Perseroan tersebut bernam *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC). Dalam waktu singkat VOC sudah menguasai perdagangan di Indonesia khususnya wilayah Banten, Maluku, Selat Bali, Ambon dan Tidore.

Dalam usaha mengembangkan usaha perdagangannya VOC Nampak ingin melakukan monopoli. Karena itu

[7]Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, (Jakarta : Gramedia, 1987), 70

aktivitas ingin menguasai perdagangan Indonesia menimbulkan perlawanan pedagang-pedagang pribumi karena merasa terancam. Pada tahun 1798 M, VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta golden. Sebelum pada tahun 1795 M, izin operasinya dicabut kemunduran, kebangkrutan, dan dibubarkan VOC disebabkan oleh berbagai faktor antara lain pembukuan yang curang, pegawai yang tidak cakap dan korup, hutang besar, dan system monopoli serta system paksa dalam pengumpulan bahan-bahan atau hasil tanaman penduduk menimbulkan kemerosotan moril baik para penguasa maupun penduduk yang sangat menderita.[8]

Adapun tujuan ekonomi dan politik terjadi setelah dibubarkannya VOC pada pergantian abad ke-18, dan secara resmi Indonesia pindah ke tangan pemerintah Belanda. Pemerintahan Belanda ini berlangsung sampai tahun 1942 M dan hanya diinterupsi pemerintahan Inggris selama beberapa tahun pada 1811–1816 M. Sampai pada tahun 1811 M, pemerintahan Hindia Belanda tidak mengadakan perubahan yang berarti. Bahkan pada tahun 1816 M, Belanda malah memanfaatkan daerah jajahan untuk memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induk, guna menanggulangi masalah ekonomi Belanda yang sedang mengalami kebangkrutan akibat perang. Pada tahun 1830 M, pemerintahan Hindia Belanda

[8]Yusmar Basri, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), I

menjalankan sistem tanam paksa. Setelah terusan Suez dibuka dan industri di negeri Belanda sudah berkembang pemerintah menerapkan politik liberal di Indonesia.

Selanjutnya tujuan ekonomi, politik, ideologi, dan keagamaan terjadi setelah Belanda secara ekonomi dan politik benar-benar telah mencapai tujuannya. Tujuan ini ditambah dengan tujuan yang bersifat ideologi dan keagamaan, yaitu tujuan untuk menanamkan budaya dan agama yang berkembang di Belanda dan Indonesia. Budaya hidup berfoya-foya, dansa-dansi, berpakaian, cara berpikir, cara berbuat, dan sikap tidak peduli pada masa depan Indonesia sangat ditanamkan oleh pemerintah Belanda melalui berbagai cara, antara lain melalui kegiatan pendidikan. Demikian pula agama yang mereka anut, yaitu Kristen Katolik mereka sebarluaskan di Indonesia dengan cara mengirim para misionaris ke berbagai daerah di Indonesia yang didukung dengan dana dan fasilitas yang memadai, dengan mendirikan gereja, dan membatasi kegiatan keagamaan Islam yang telah berkembang sebelumnya di Indonesia. Selanjutnya setelah membahas terkait dengan tujuan kedatangan Belanda ke Indonesia, maka akan dibahas pula kebijakan kependidikan Belanda dan hubungannya dengan lahirnya dikotomi pendidikan. Sikap kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam bisa dilihat lebih lanjut dari kebijakannya yang sangat diskriminatif, tidak terlepas sikap diskriminatif dibidang pendidikan.

Semenjak abad ke 20, arah etis (Etische Koers) dijadikan landasan idiil dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda. Sejalan dengan pokok pikiran yang terkandung di dalamnya, maka disusun pulalah dasar pikiran yang bertumpu atas dua pokok pikiran, yaitu: (1) Pendidikan dan pengetahuan Barat ditetapkan sebanyak mungkin bagi golongan Bumiputera, (2) Pemberian pendidikan rendah kepada golongan Bumiputera, disesuaikan dengan tenaga kerja murah. Hal ini memberi kesan adanya peluang bagi kemungkinan terjadi penyimpangan pelaksanaan pendidikan dari tujuan yang termuat dalam politik etis. Para pelaksana pendidikan sendiri terkadang cenderung menerapkan kebijakan yang bertentangan dengan moral itu sendiri. Dengan adanya penjenisan sekolah yang menerima murid berdasarkan latar belakang status sosialnya merupakan bagian dari penyimpangan itu.

S. Nasution mengklasifikasikan ciri umum pendidikan kolonial Belanda menjadi enam ciri, yaitu: (1) Gradulisme; (2) Dualisme; (3) Pengawasan pusat yang ketat; (4) Pendidikan pegawai lebih diutamakan; (5) Konkordansi; dan (6) Tidak ada perencana yang sistematis bagi pendidikan pribumi. Sedangkan menurut Ki Suratman, ada tiga ciri pokok, yaitu: (1) Pendidikan bersifat heterogen (beragam); (2) Pendidikan bersifat diskriminatif; (3) Pendidikan cenderung intelektualistik. Lebih jauh Ki Hajar Dewantara, yang melihatnya dari kepentingan rakyat pribumi sebagai

suatu bangsa, menilai pendidikan Belanda bersifat kolonialistis dan intelektualistis.[9]

Pendapat-pendapat di atas menggambarkan bagaimana pandangan tokoh-tokoh pribumi sebagai bangsa terjajah. Sebaliknya, sebagai penjajah pemerintah kolonial Belanda bagaimanapun harus berupaya menanamkan kekuasaan politik yang dapat mencerminkan dirinya sebagai penguasa di wilayah jajahannya. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud mereka menggunakan berbagai jalur yang memungkinkan. Dan diduga, jalur pendidikan mereka nilai sebagai jalur yang paling efektif.

Sejalan dengan kepentingan politik kolonialnya itu, maka sistem pendidikan di Hindia Belanda disusun berdasarkan kepentingan Belanda sebagai penjajah. Paling tidak, dalam pandangan mereka sistem pendidikan harus memberi gambaran adanya unsur pembeda antara pendidikan kolonial dengan pendidikan pribumi. Selain itu adanya keterikatan antara sistem pendidikan Hindia Belanda dengan sistem pendidikan Netherland, menurut mereka perlu diperjelas dan adanya prinsip konkordansi merupakan cerminan keinginan tersebut. Prinsip konkordansi bertujuan: (1) untuk menjaga hubungan antar sistem pendidikan di sekolah-sekolah Hindia Belanda dengan sekolah-sekolah Netherland; dan (2) agar sekolah-sekolah

[9]S. Nasution, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Padang : The Zaki Press, 2009), 78

di Hindia Belanda sama standarnya dengan sekolah-sekolah Netherland.

Kemudian untuk membedakan antara status mereka sebagai penjajah dengan penduduk pribumi, mereka memasukkan unsur diskriminasi dalam sistem pendidikan sedangkan tujuan jangka panjang dalam menjaga kemantapan politik penjajahan, mereka mengusahakan agar di sekolah-sekolah tidak menerapkan pendidikan agama. Sekolah yang netral agama menurut pandangan pemerintahan paling tidak mempunyai tujuan ganda. Pertama, untuk menghindari anggapan bahwa penguasa (Kristen) pemerintah tidak memihak kepentingan Missie dan Zending, atau tidak berkeinginan mengembangkan agama Kristen melalui sekolah.

Kedua, secara berangsur-angsur dan terarah menjauhkan rakyat pribumi dan keterkaitan dengan ajaran mereka (Islam) melalui sekolah-sekolah pemerintah yang netral agama. Hubungan antara sistem pendidikan dan kepentingan politik itu, diperkirakan tetap dipedomani oleh para penguasa kolonial di Hindia Belanda selama penjajahan mereka, dan kalaupun terjadi beberapa perubahan dalam pelaksanaannya, barangkali hal itu disebabkan oleh pengaruh kondisi tertentu. Yang jelas perubahan tersebut bukan disebabkan oleh perubahan sistem pendidikan dalam arti lepas dari keterkaitannya dengan kepentingan politik.

Kemudian penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah di Hindia Belanda, pada dasarnya merupakan cerminan dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Tujuan, ciri-ciri umum, dan bentuk kelembagaan yang diterapkan di sekolah-sekolah tersebut, adalah merupakan realisasi dari sistem pendidikan yang mereka programkan. Di Jakarta, sekolah pertama yang didirikan pada tahun 1617 M, tahun 1636 M sudah menjadi 3 sekolah. Tujuan sekolah ini didirikan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten pada VOC. Pendirian sekolah-sekolah di kota-kota lain juga berlangsung, terbatas di kota-kota pelabuhan, atau benteng-benteng yang dijadikan basis VOC. Ketika Van den Bosch menjadi Gubernur Jenderal di Jakarta tahun 1831 M, ia mengeluarkan kebijaksanaan bahwa sekolah gereja dianggap diperlukan sebagai sekolah pemerintah Belanda. Departemen yang mengurus pendidikan dan keagamaan dijadikan satu. Disetiap daerah Keresidenan didirikan satu sekolah agama Kristen.

Van den Capellen tahun 1819 M merencanakan berdirinya sekolah dasar bagi penduduk pribumi agar dapat membantu pemerintahan Belanda. Dalam surat edarannya kepada para Bupati berisi: Dianggap penting untuk secepatnya mengadakan peraturan pemerintah yang menjamin meratanya kemampuan membaca dan menulis bagi penduduk pribumi agar mereka dapat mentaati undang-undang dan hukum negara. Dari surat edaran diketahui bahwa Belanda menganggap pendidikan agama Islam yang

diselenggarakan di pondok-pondok pesantren, masjid, mushalla, dianggap tidak membantu pemerintah Belanda. Para santri dianggap buta huruf latin. Jelasnya madrasah dan pesantren dianggap tidak berguna dan tingkatannya rendah, sehingga disebut sekolah desa. Oleh sebab itu, Belanda mendirikan sekolah-sekolah dasar ditiap Kabupaten dimaksudkan untuk menandingi dan menyaingi madrasah, pesantren, dan pengajian di desa itu.

Kemunduran pendidikan Islam itu sampai puncaknya sebelum tahun 1900 M yang meliputi seluruh Indonesia. Bahkan pada tahun 1882 M. Belanda membuat badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam. Tahun 1925 M Belanda mengeluarkan peraturan lebih ketat, bahwa tidak semua Kiai boleh memberikan pelajaran mengaji. Peraturan itu disebabkan tumbuhnya organisasi pendidikan Islam, seperti Muhammadiyah, Syarikat Islam, Al-Irsyad, Nahdathul Wathan, dan lain-lain. Tahun 1932 keluar pula peraturan yang dapat memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya yang disebut Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordanansi*). Peraturan ini dikeluarkan setelah muncul gerakan nasionalisme-Islamisme pada tahun 1928 berupa Sumpah Pemuda. Selain itu sekolah kristen yang banyak mendapat kritikan dari rakyat sekitar, juga untuk menjaga dan menghalangi masuknya pelajaran agama disekolah umum yang kebanyakan muridnya beragama Islam, maka pemerintah

Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut Netral Agama. Jika melihat peraturan-peraturan Belanda yang demikian ketat mengawasi dan menekan aktivis madrasah dan pesantren di Indonesia, seolah-olah pendidikan Islam akan lumpuh. Akan tetapi apa yang kita saksikan adalah sebaliknya.

Pada tahun 1901 Belanda melakukan politik etis, yaitu mendirikan pendidikan rakyat sampai ke desa yang memberikan hak-hak pendidikan pada pribumi dengan tujuan untuk mempersiapkan pegawai-pegawai yang bekerja untuk Belanda, juga untuk menghambat pendidikan tradisional. Belanda juga tidak mau mengakui lulusan-lulusan pendidikan tradisonal kerena mereka dianggap tidak bisa bekerja di pabrik maupun sebagai tenaga birokrat. Di luar dugaan, berdirinya sekolah-sekolah Belanda justru menjadikan mereka mengenal sistem pendidikan modern: sistem kelas, pemakaian meja, metode belajar modern, dan pengetahuan umum. Mereka juga menjadi mengenal surat kabar dan majalah untuk mengikuti perkembangan zaman. Pandangan rasional ini menjadi pendorong untuk mengadakan pembaruan, di antaranya bidang agama dan pendidikan. Maka, lahirlah gerakan pembaruan pendidikan Islam.

Adanya kaitan antara politik dan pendidikan, agaknya ikut menjadikan sistem pendidikan kolonial Belanda menjadi rumit. Keinginan untuk menerapkan prinsip diskriminasi, menyebabkan penjenisan sekolah menjadi

banyak. Sebagai gambaran tentang sistem persekolahan itu, secara garis besarnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Jenis-jenis sekolah terdiri atas:

1. Pendidikan rendah (*Lager Onderwijs*), dibagi menjadi: a) Sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa Belanda, yang terdiri atas: (1) Sekolah rendah Eropa (*Eropeesche Lager School*); (2) Sekolah Bumiputera kelas satu, terdiri atas: (a) Sekolah Cina Belanda (*Hollandche Chinese School*); (b) Sekolah Bumiputera Belanda (*Hollandche Inlandche School*). b) Sekolah rendah berbahasa pengantar bahasa daerah, yang dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Sekolah Bumiputera kelas dua (*Inlandche School Tweeds Klasse*); (2) Sekolah Desa (*Volkschool*); (3) Sekolah peralihan (*Vervolschool*). c) Sekolah peralihan (*Schakel School*), sebagai sekolah peralihan dari Sekolah Desa ke Sekolah Dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda.
2. Pendidikan menengah (*Middlebaar Onderwijs*) terdiri atas: a) Sekolah menengah umum, yaitu: (1) MULO (*Meer Uitgereid Lager Onderwijs*); (2) AMS (*Algemenee Middlebaar School*), b) Sekolah Tinggi Warga Negara (*Hogere Burgerschool*). Pendidikan tinggi, terdiri dari tiga jurusan, yaitu: (a) Sekolah Tinggi Kedokteran; (b) Sekolah Tinggi Hukum; (c) Sekolah Tinggi Tehnik.

Penjenisan sekolah di atas menunjukkan kenyataan akan adanya sikap diskriminatif dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Hal itu terlihat pada: Pertama, adanya

penjenisan sekolah yang dikaitkan dengan status sosial, berdasarkan keturunan. Kedua, masyarakat pribumi kurang diberi kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Pada pendidikan rendah, jenis sekolah lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Dan keadaan yang seperti itu tampaknya memang sudah diprogramkan, sehingga kesempatan masyarakat pribumi untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah menengah dan sekolah tinggi dibatasi.

Selain itu, dalam usaha untuk menghambat kesempatan belajar itu, maka pemerintah memberlakukan pula persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dari beberapa segi diduga memberatkan bagi murid-murid golongan pribumi. Barangkali data lulusan murid-murid tahun 1940 dapat memperkuat keabsahan itu. Dari 21.255 sekolah dasar dengan jumlah murid 88.233 orang, ternyata lulus 7.790 orang, yaitu sekitar 8,5 % saja. Lebih jauh tindakan diskriminatif dalam bidang pendidikan juga diterapkan dengan membedakan sekolah-sekolah menjadi sekolah untuk orang Eropa, Cina dan Bumiputera. Dengan demikian, dari berbagai segi, kesempatan belajar bagi pendidik pribumi di sekolah-sekolah pemerintah senantiasa mendapat hambatan.

Dengan demikian, dengan diperkenalkannya sekolah-sekolah modern menurut sistem persekolahan yang berkembang di dunia Barat oleh pemerintah kolonial Belanda, sedikit banyak mempengaruhi sistem pendidikan di Indonesia, yaitu pesantren. Padahal diketahui bahwa

pesantren merupakan satu-satunya lembaga pendidikan formal di Indonesia sebelum adanya kolonial Belanda. Yang sangat berbeda dalam sistem dan pengelolaannya dengan sekolah yang diperkenalkan oleh Belanda. Hal ini dapat terlihat dari terpecahnya dunia pendidikan di Indonesia pada abad 20 M menjadi dua golongan. Pertama, pendidikan yang diberikan oleh sekolah Barat yang sekuler yang tidak mengenal ajaran agama. Kedua, pendidikan yang diberikan oleh pondok pesantren yang hanya mengenal ajaran agama saja. Dengan kata lain menurut Wirjosukarto yang dinukil oleh Muhaimin, pada periode tersebut terdapat dua corak pendidikan, yaitu corak lama yang berpusat pada pondok pesantren dan corak baru dari perguruan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda. Pendidikan yang dikelola Belanda khususnya berpusat pada pengetahuan dan keterampilan duniawi yaitu pendidikan umum, sedangkan pada lembaga pendidikan Islam lebih menekankan pada aspek keagamaan.

D. Kurikulum Pendidikan Islam Era Kolonial

Pada masa penjajahan Belanda setidaknya ada 2 sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang pada saat itu. Pertama, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren. Kedua, sistem pengajaran Belanda. Sistem pendidikan Belanda diatur dengan prosedur yang ketat dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan

sistem pendidikan Islam yang dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan pun bersifat diskriminatif.

Kurikulum pendidikan pada masa penjajahan Belanda setidaknya tergambar pada lembaga pendidikan yang mengasuhnya. Misalnya, sistem pendidikan Islam yang diselenggarakan di pesantren berorientasi kepada pendidikan agama yang membahas tentang ilmu-ilmu keagamaan.

Ada beberapa ciri khusus dari sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren: a) visinya menjadikan Islam sebagaimana terdapat dalam fiqih sebagai pedoman hidup yang harus diamalkan dan diajarkan; b) misinya menanamkan dan mengajarkan agama Islam, memupuk persatuan sesama umat Islam, melakukan jihad dengan segenap daya dan kemampuan yang dimiliki; c) mencetak para ulama‘ Islam untuk diterjunkan di tengah-tengah masyarakat, dan menjadi pemimpin; d) kurikulumnya meliputi ilmu agama Islam; e) pendekatan yang digunakan yakni berpusat pada guru; f) metode sejalan dengan pendekatan yang berpusat pada guru; g) guru yang bertugas terdiri dari tiga lapis: kiai, guru senior, guru junior; h) santri; i) sarana prasarana terdiri dari: masjid, mushalla, pemondokan, tempat tinggal santri, rumah kiai, aula, tempat belajar; j) pengelolaan tidak berlaku secara formal. Sedangkan pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh Belanda, kurikulumnya berorientasi kepada duniawi yaitu mempelajari ilmu-ilmu umum saja.[10]

[10]Abuddin Nata .., 289 - 290

Adapun pembagian pola pesantren berdasarkan kurikulumnya yang menjadi fokus pada pembahasan ini dapat dipolakan menjadi lima pola yaitu:

Pola I, materi pelajaran yang dikemukakan di pesantren ini adalah mata pelajaran agama yang bersumber dari kitab-kitab klasik. Metode penyampaiannya adalah wetonan dan sorogan, tidak memakai sistem klasikal. Santri dinilai dan diukur berdasarkan kitab yang mereka baca. Mata pelajaran umum tidak diajarkan, tidak mementingkan ijazah sebagai alat untuk mencari kerja, yang paling dipentingkan adalah pendalaman materi ilmu-ilmu agama semata melalui kitab-kitab klasik.

Pola II, pola ini hampir sama dengan pola I di atas, hanya saja pola ini proses belajar-mengajar dilaksanakan secara klasikal dan non klasikal, juga diajarkan keterampilan dan berorganisasi. Pada tingkat tertentu diberikan sedikit pengetahuan umum, santri dibagi jenjang pendidikannya mulai dari tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Metode: wetonan, sorogan, hafalan, dan musyawarah.

Pola III, pada pola ini materi pelajaran telah dilengkapi dengan mata pelajaran umum, dan ditambah pula dengan memberikan aneka macam pendidikan lainnya, seperti keterampilan, kepramukaan, olah raga, kesenian dan pendidikan berorganisasi, dan sebagian telah melaksanakan program pengembangan masyarakat.

Pola IV, pola ini menitikberatkan pelajaran keterampilan di samping pelajaran agama. Keterampilan ditujukan untuk bekal kehidupan bagi seorang santri setelah tamat dari pesantren tersebut. Keterampilan yang diajarkan adalah pertanian, pertukangan, peternakan, dan lain sebagainya.

Pola V, pada pola ini materi yang diajarkan di pesantren adalah sebagai berikut: a) Pengajaran kitab-kitab kasik. b) Madrasah, di pesantren ini diadakan pendidikan model madrasah, selain mengajarkan mata pelajaran agama, juga mengajarkan mata pelajaran umum. Kurikulum madrasah pondok dapat dibagi kepada dua bagian, pertama, kurikulum yang dibuat oleh pondok sendiri dan kedua, kurikulum pemerintah dengan modifikasi materi pelajaran agama. c) Keterampilan juga diajarkan dalam berbagai bentuk kegiatan keterampilan. d) Sekolah umum, di pesantren ini dilengkapi dengan sekolah umum. Pedoman kurikulum yang dipakainya adalah kurikulum pendidikan Nasional. Sedangkan materi pelajaran agama disusun oleh pondok pesantren sendiri. Di luar kurikulum pendidikan agama yang diajarkan di sekolah, pada waktu-waktu yang sudah terjadwal santri menerima pendidikan agama lewat membaca kitab-kitab klasik. e) Adanya perguruan tinggi, pada beberapa pesantren yang tergolong pesantren besar telah membuka universitas atau perguruan tinggi.

Tampaknya, pola-pola pesantren di atas tidak menggambarkan adanya dikotomi atau menggambarkan pola pesantren khalafiyah, karena sudah terpola secara Nasional dengan kurikulum yang mengacu kepada pemerintah. Namun hal ini berbeda dengan jenis pesantren salafiyah yang tidak mengenal adanya kurikulum pada madrasah atau sekolah formal yang dituangkan dalam silabus tetapi berupa funun kitab-kitab yang diajarkan pada santri. Adapun Kitab yang diajarkan berdasarkan tingkatannya sebagai berikut: untuk tingkat dasar; 1) Al-Qur'an, 2) Tauhid: Al-Jawar al-Kalamiyyah „ummu al-Barahim, 3) Fiqih: Safinah al-Shalah, Safinah al-Naja‟ , Sullam al-Taufiq, Sullam al-Munajat, 4) Akhlaq: Al-Washaya al-Abna‟ , Al-Akhlaq li al-Banat, 5) Nahwu: Nahw al Wadlih al-Ajrumiyyah, 6) Saraf: Al-Amtsilah al-Tasrifiyyah, Matn al-Bina‟ wa al-Asas. Untuk tingkat menengah pertama; 1) Tajwid: Tuhfah al-Athfal, Hidayah al-Mustafid, Mursyid al-Wildan, Syifa‟ al-Rahman, 2) Tauhid: Aqidah al-Awwam, Al-Dina al-Islami, 3) Fiqih: Fath al-Qarib (Taqrib), Minhaj al-Qawim Safinah al-Shalah, 4) Akhlaq: Ta'lim al-Muta„allim, 5) Nahwu: Mutammimah Nazham, Imriti, Al-Makudi, Al-Asymawi, 6) Sharaf: Nazaham Maksud, al-Kailani, 7) Tarikh: Nur al-Yaqin. Untuk tingkat menengah atas; 1) Tafsir: Tafsir al-Qur‟ an al-Jalalain, Al-Maraghi, 2) Ilmu Tafsir: Al-Tibya Fi „Ulum al-Qur‟ an, Mabahits fi „Ulum al-Qur‟ an, Manah al-Irfan, 3) Hadis: Al-Arba‟ in al-Nawawi, Mukhtar al-Maram, Jawahir al-Bukhari, Al-Jami‟ al-Shaghir, 4) Musthalah al-

Hadis: Minha al Mughits, Al-Baiquniyyah, 5) Tauhid: Tuhfah al-Murid, Al-Husun al-Hamidiyah, Al-Aqidah alIslamiyah, kifayah al-Awwam, 6) Fiqih: Kifayah al-Akhyar, 7) Ushul al-Fiqh: Al-Waraqat, Al-Sullam, Al-Bayan, Al-Lumaʻ, 8) Nahwu dan Sharaf: Alfiyah ibnu Malik, Qawaʻid al-Lughah al-Arabiyyah, Syarh ibnu Aqil, Al-Syabrawi, Al-„Ilal, „Ilal al-Sharaf, 9) Akhlaq: Minh al-Abidin, Irsyad al-Ibad, 10) Tarikh: Ismam al-Wafaq, 11) Balaghah: Al-Jauhar al-Maknun. Dan untuk tingkat tinggi; 1) Tauhid: Fath al-Majid, 2) Tafsir: Tafsir Qurʻan Azhim (Ibnu Katsir), Fi zhilal al-Qurʻan, 3) Ilmu Tafsir: Al-Itqan fi-ulum Al-Qurʻan, Itmam al-Dirayah, 4) Hadist: Riyadh al-SHalihin, Al-Luʻlu ʻwa al-Marjan, SHahih al-Bukhari, shahih al-Muslim, Tajrid al-SHalih, 5) Mustalah al-Hadist: Alfiyah al-Suyuthi, 6) Fiqih: Fath al-Wahhab, Al-Iqnaʻ, Al-Muhadzdzab, Al-Mahalli, Al-Fiqh „ala al-Madzahib al Arbaʻah, Bidayah al-Mujtahid, 7) Ushul al Fiqh: Lathaifa al-Isyarah, Jamʻu al-Jawamiʻ, Al-Asybah wa al-Nadhair, Al-Nawahib al-Saniyah, 8) Bahasa Arab: Jamiʻ al-Durus Al-Arabiyyah, 9) Balaghah: Uqud al-Juman, Al-Balaghah al-Wadhihah, 10) Mantiq: Sullam al-Munauraq, 11) Akhlaq: Ihyaʻ Ulum al-Din, Risalah al-Muʻawwamah, Bidayah al-Hidayah, 12) Tarikh: Tarikh Tasyriʻ.

Kitab-kitab tersebut pada umumnya dipergunakan dalam pengajian standar oleh pondok-pondok pesantren. Selain yang telah dikemuka-kan di atas, masih banyak kitab-kitab yang dipergunakan untuk pendalaman dan perluasan

pengetahuan ajaran Islam. kitab-kitab itu sebagai berikut: Dalam bidang ilmu tafsir; 1) Ma'ani al-Qur‟ an, 2) Al-Basith, 3) Al-Bahal al-Muhin, 4) Jami‟ al-Ahkam al-Qur‟ an, 5) Ahkam al-Qur‟ an, 6) Mafatih al-Ghaib, 7) Lubah al-Nuqul fi Asbab Nuzulul al-Qur‟ an, 8) Al-Burhan fi‟ ulum al-Qur‟ an, 9) Ijaz al-Qur‟ an. Dalam bidang hadis; 1) Al-Muwaththa‟ , 2) Sunan al-Turmudzi, 3) Sunan Abu Dawud, 4) Sunan al-Nasa‟ i, 5) Sunan Ibn Majah, 6) Al-Musnad, 7) Al-Targhib wa al-Tarhib, 8) Nail al-Awrar, 9) Subul al-Salam. Dalam bidang fiqih; 1) Al-Syarh al-Kabir, 2) Al-„Umm, 3) Al-Risalah, 4) Al-Muhalla, 5) Fiqh Al-Sunnah, 6) Min Taujihah al-Islam, 7) Al-Fatawa, 8) Al-Mughni li Ibn Qudamah, 9) Al-Islam Aqidah Wa Syariah, 10) Za‟ ad al-Ma'ad.

Sedangkan kurikulum sekolah-sekolah Belanda yaitu bisa ditinjau dari sekolah kelas I, sekolah kelas II, dan sekolah desa sebagai berikut:

a. Sekolah Kelas I: Kurikulum sekolah ini ditentukan dalam peraturan pada tahun 1893, terdiri atas mata pelajaran yang berikut: 1) Membaca dan menulis dalam bahasa daerah dalam huruf daerah dan Latin. 2) Membaca dan menulis dalam bahasa Melayu. 3) Berhitung. 4) Ilmu Bumi Indonesia. 5) Ilmu Alam. 6) Sejarah pulau tempat tinggal. 7) Menggambar. 8) Mengukur tanah.
b. Sekolah Kelas II Menggambar mulai diajarakan pada tahun 1892 bernyanyi diajarakan hanya di kelas 3 sejak 1892 dan kemudian dihapuskan pada tahun 1912. Pekerjaan tangan menjadi masalah

yang ramai diperbincangkan. Usaha untuk memasukkan sebagai mata pelajaran banyak menerima tantangan, karena dianggap tidak layak untuk dipelajari disekolah. Karena dapat di berikan dirumah.

c. Sekolah Desa Pada tahun 1907 diciptakanlah sekolah baru, yakni Sekolah Desa. Di samping pelajaran membaca, menulis, dan berhitung juga di ajarkan pekerjaan tangan membuat keranjang, pot, genteng dan sebagainya. Yang digunakan sebagai tempat beljar sementara ialah pendopo, sambil mendirikan sekolah dengan bantuan murid-murid. Guru-guru diambil dari kalangan penduduk sendiri. Sekolah itu sendiri primitif di mana murid-murid duduk di lantai seperti di rumah sendiri, kaleng kosong yang diperoleh dari took-toko cina digunakan sebagai alas untuk menulis. Sebidang tanah dipagari sebagai tempat untuk menggembala kerbau-kerbau saat mereka sedang belajar yang diawasi oleh seorang yang dewasa. Sekolah dibuka jam 09.00-12.00 dan 13.00-15.00.[11]

E. Kelembagaan Pendidikan Islam

VOC telah mendirikan sekolah pertama kali di Ambon pada tahun 1607. Tujuan dari didirikannya sekolah ini tidak lepas dari semangat keberagamaan orang-orang Belanda yang Protestan berhadapan dengan paham keagamaan Katolik yang dianut oleh Portugis. Tujuan utama mendiri-

[11]Haidar Putra .., 30 - 31

kan sekolah-sekolah ini adalah untuk melenyapkan agama Katolik dengan menyebarkan Protestan. Sekolah-sekolah tersebut berkembang di sekitar kepulauan Maluku.

Di Jakarta, sekolah pertama yang didirikan pada 1617, tahun 1636 sudah menjadi 3 sekolah. Tujuan sekolah ini didirikan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten pada VOC. Untuk Indonesia bagian barat sendiri, paling tidak ada beberapa contoh lembaga pendidikan di Kota Medan yang bisa diuraikan, yaitu misalnya di penghujung abad ke-19 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah untuk anak-anak Belanda yang bernama Eerste School Openbare Ondeiwijs pada tahun 1888. Sedangkan untuk anak-anak Bumiputera didirikan Eerste Inlandsche School derre Klasse pada tahun 1898. Jumlah sekolah di Kota Medan semakin bertambah setelah pemerintah Hindia Belanda melaksanakan politik etis (1901). Mulanya pendidikan yang dibuka di Kota Medan adalah pendidikan rendah, sedangkan pendidikan menengah baru dibuka pada tahun 1920. Pada tahun 1912 bangsa Indonesia yang tergabung dalam Syarikat 12 Guru mulai mengadakan kursus pemberantasan buta huruf dan pada tahun 1916 mereka berhasil mendirikan sebuah sekolah yang bernama sekolah Derma. Selanjutnya pada tanggal 19 Mei 1918 didirikanlah sebuah madrasah di Kota Medan yang disebut dengan MIT (Maktab Islamiyah Tapanuli). MIT ini merupakan madrasah tertua di Kota Medan yang dibangun oleh

masyarakat Tapanuli dengan gurunya Syaikh Ja'far Hasan dan dibangun di atas tanah wakaf dari Datuk H. Muhammad Ali. MIT ini merupakan sebuah madrasah yang dibangun guna melakukan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang membangun sekolah-sekolahnya di Medan.

Contoh lain adalah ketika kolonial Belanda menguasai daerah Sumatera Barat, surau tetap memainkan peran penting sebagai institusi pendidikan Islam. Meskipun pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan dan mendirikan sekolah sebagai institusi pendidikan yang berbeda dengan surau, eksistensi dan kontinuitas surau masih dapat dipertahankan. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya surau sebagai institusi pendidikan Islam sangat dirasakan terutama bila dikaitkan dengan keberadaan sekolah-sekolah milik pemerintah Belanda yang tidak memberikan pelajaran Agama Islam kepada anak didiknya. Hal itu dikaitkan dengan politik kolonial Belanda yang konon bersikap netral terhadap agama. Statuta 1874 menyatakan bahwa semua pengajaran agama dilarang di sekolah pemerintah. Walaupun pemerintah Belanda mengizinkan pelajaran agama di luar jam persekolahan, namun dalam tataran praktikal, pelaksanaannya selalu dipersulit. Dari berbagai keterangan terungkap bahwa Belanda memang memandang pelaksanaan pendidikan Islam sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka.

Selanjutnya berkenaan dengan itu, sekolah-sekolah yang didirikan pemerintah kolonial Belanda dianggap tidak merakyat dan cenderung mahal dalam segi biaya. Oleh karena itu, maka alternatif lain dari lembaga pendidikan yang lebih merakyat serta bersifat egalitarian (pandangan yg menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajat) adalah pendidikan di pesantren, surau atau dayah, maka lembaga-lembaga pendidikan itu adalah merupakan pilihan yang memungkinkan bagi masyarakat Indonesia, karenanya masyarakat muslim ketika itu banyak memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan tersebut.

Pesantren dan sejenisnya dari segi sistem, metode dan materi berbeda dengan lembaga pendidikan sekolah yang diasuh oleh pemerintah Belanda. Dari segi sistemnya pesantren masih bersifat nonklasikal, metodenya berpusat kepada metode wetonan, sorogan, hafalan yang disampaikan kepada pengajian kitab-kitab klasik, materinya semata-mata ilmu-ilmu agama saja. Sedangkan di sekolah-sekolah Belanda memakai sistem klasikal metodenya adalah seirama dan serasi dengan metode klasikal, materinya semata-mata pelajaran umum, di sini tidak di ajarkan agama sama sekali.

Berkenaan dengan itu, kedua lembaga ini (pesantren dan sekolah), memiliki filosofi yang berbeda yang sekaligus melahirkan out put yang memiliki orientasi yang berbeda pula. Pada waktu itu muncullah perbedaan yang tajam

antara ilmu agama dan ilmu umum, maka muncullah sistem pendidikan umum dan sistem pendidikan agama pada fase terakhir abad ke-19, serta dilanjutkan dan diperkuat pada abad 20.

Antara kedua lembaga itu pilah dan terpisah tidak ada pertautan sama sekali, masing-masing berjalan sendiri-sendiri, mengenai hal ini Steenbrink, mendiskripsikan pada abad ke-19 khusus pada permulaan abad itu pesantren merupakan satusatunya lembaga pendidikan sesudah pengajian Al-Qur'an hampir di seluruh wilayah Indonesia pada masa ini pemerintah kolonial membuka lembaga pendidikan sendiri yang sama sekali tidak berhubungan dengan sistem pendidikan Islam.

Dalam perjalanan sejarah pendidikan Islam di Indonesia, kelihatannya memang pernah ada juga perhatian pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan Islam, misalnya, Gubernur Jenderal Van Der Capellen pada tahun 1819 menginstruksikan kepada para Residen agar menyelidiki kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki pendidikan pribumi. Verkerk Pistorius juga pernah mengusulkan supaya perkembangan pendidikan dilakukan dengan memperbaiki secara bertahap sistem pendidikan asli yang sudah ada. Meskipun ada beberapa usulan yang seperti disebut di atas untuk memperbaiki pendidikan pribumi ternyata pemerintah Belanda tetap melaksanakan untuk mengembangkan pendidikan sendiri, meskipun sebenarnya menurut Steenbrink ada beberapa pendapat

memberikan penilaian positif terhadap sistem pendidikan asli Indonesia dalam perkembangan pendidikan modern.

Pemerintah Belanda pada mulanya tidak mau mencampuri masalah Islam, oleh karena belum adanya kebijakan yang jelas mengenai masalah ini. Di samping karena belum mengetahui pengetahuan mengenai Islam dan bahasa Arab, dan pada waktu itu Belanda belum mengetahui sistem sosial Islam. Barulah setelah datangnya Snouch Hurgronje pada tahun 1889, pemerintah kolonial Belanda mempunyai kebijakan yang jelas mengenai masalah Islam.

Menurut Snouch Hurgronje membagi masalah Islam itu dalam 3 kategori, yakni: 1) Bidang agama murni atau ibadah; 2) Bidang sosial kemasyarakatan; 3) Bidang politik. Tiap-tiap bidang memiliki alternatif pemecahan berbeda. Resep inilah yang kemudian dinamakan dengan Islam politik. Dalam kenyataan kenetralan itu tidak bisa terealisasi, banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah Belanda guna mengawasi dan membatasi kegiatan Islam. Misalnya, peraturan (ordonansi) yang dikeluarkan tahun 1859 tentang masalah haji. Ordonansi guru tahun 1905, yakni yang mewajibkan minta izin bagi guru-guru agama. Pada tahun 1925, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru yang baru, sebagai pengganti ordonansi tahun 1905. Pada ordonansi tahun 1925 ini guru agama hanya diwajibkan memberitahukan aktivitasnya, bukan meminta izin. Ordonansi ini tidak hanya

berlaku untuk Jawa dan Madura saja, seperti pada ordonansi tahun 1905, tetapi sejak 1 Januari 1927 berlaku pula untuk Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, manado dan Lombok.

Bila diklasifikasikan bentuk dan jenis lembaga pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda pada awal dan pertengahan abad ke-20, adalah:

- Lembaga pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren, yakni mengajarkan kitab-kitab klasik semata-mata.
- Lembaga pendidikan sekolah-sekolah Islam, di lembaga ini di samping mengajarkan ilmu-ilmu umum sebagai materi pokoknya, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama.
- Lembaga pendidikan madrasah, lembaga ini adalah mencoba mengadopsi sistem pesantren dan sekolah, dengan menampilkan sistem baru. Ada pula unsur-unsur yang diambil dari sekolah.

F. Lembaga Pendidikan Islam Awal di Indonesia

1. Masjid dan Langgar

Masjid secara harfiyah adalah tempat bersujud‖ namun dalam arti terminologi, mesjid diartikan sebagai tempat khusus untuk melakukan aktivitas ibadah dalam arti yang luas. Masjid fungsi utamanya adalah untuk tempat

shalat lima kali sehari semalam dan setiap minggunya dilaksanakan shalat jum'at dan dua kali setahun dilaksanakan shalat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Selain dari masjid ada pula tempat ibadah yang disebut langgar, bentuknya lebih kecil dari pada Masjid dan dipergunakan hanya untuk beribadah shalat lima waktu, dan bukan untuk shalat Jum'at.[12]

Selain dari fungsi utama masjid dan langgar digunakan untuk tempat pendidikan bagi orang dewasa maupun anak-anak. Pengajian yang dilakukan untuk orang dewasa adalah penyampainan-penyampaian ajaran Islam oleh para mubaligh (alustadz, guru, kyai) kepada para jama'ah dalam bidang yang berkenaan dengan aqidah, ibadah dan akhlak. Sedangkan pengajian yang dilaksanakan untuk anak-anak berpusat kepada pengajian Al-Qur‘an menitikberatkan kepada kemampuan membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaedah-kaedah bacaannya, selain itu anak-anak juga diberikan ilmu keimanan yang bertumpu kepada rukun iman yang enam. Ilmu ibadah yaitu pendidikan tata cara shalat dan akhlak yaitu bertingkah laku yang mulia dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem pengajaran di masjid, sering memakai sistem halaqah, yaitu guru membaca dan menerangkan pelajaran

[12]Muhaimin dan Abdul Mujib, Pemikiran Pendidikan Islam : Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 295

sedangkan siswa mempelajari atau mendengar saja, hampir mirip dengan sistem klasikal yang berlaku sekarang. Salah satu sisi baik dari sistem halaqah ialah pelajar-pelajar diminta terlebih dahulu mempelajari sendiri materi-materi yang akan diajarkan oleh gurunya, sehingga seolah-olah pelajar menselaraskan pemahamannya dengan pemahaman gurunya tentang maksud dari teks yang ada dalam sebuah kitab. Sistem ini mendidik palajar belajar secara mandiri.

Adapun metode yang digunakan adalah metode bandongan atau sorogan. metode bandongan adalah metode di mana seorang guru membacakan dan menjelaskan isi sebuah kitab, dikerumuni oleh sejumlah murid yang masing-masing memegang kitab yang serupa, mendengarkan dan mencatat keterangan yang diberikan gurunya berkenaan dengan bahasan yang ada dalam kitab tersebut pada lembaran kitab atau pada kertas catatan yang lain. Sedangkan metode sorogan merupakan metode di mana santri menyodorkan sebuah kitab dihadapan gurunya, kemudian guru memberikan tuntunan bagaimana cara membacanya, menghafalkannya, dan pada jenjang berikutnya bagaimana menerjemahkan serta menafsirkannya.

Pendidikan agama Islam di langgar bersifat elementer, dimulai dari mempelajari abjad huruf Arab sebagai pengenalan awal tentang isi Al-Qur‘an sambil mengikuti gurunya, anak-anak belajar dengan duduk bersila dan belum memakai meja dan bangku. Pengajian Al-Qur‘an di

langgar bertujuan agar anak didik dapat membaca Al-Qur'an berirama dan baik dan belum ditekankan untuk mengetahui tentang isi Al-Qur'an.

Memang masjid atau langgar merupakan institusi pendidikan yang pertama dibentuk dalam lingkungan masyarakat muslim. Pada dasarnya masjid atau langgar mempunyai fungsi yang tidak terlepas dari kehidupan keluarga. Sebagai lembaga pendidikan, berfungsi sebagai penyempurna pendidikan dalam keluarga, agar selanjutnya anak mampu melaksanakan tugas-tugas hidup dalam masyarakat dan lingkungannya. Pada mulanya pendidikan di langgar atau masjid, dalam arti sederhana dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan formal dan sekaligus lembaga pendidikan sosial.

Berdasarkan paparan para ahli di atas, ada beberapa hal yang bisa diperhatikan dalam sistem pendidikan Islam di masjid dan langgar, yaitu:

- Tenaga pendidik, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta imbalan jasa, tidak ada spesifikasi khusus dalam keahlian mengajar, mendidik bukan pekerjaan utama, dan tidak diangkat oleh siapapun.
- Mata pelajaran yang diajarkan terutama ilmu-ilmu yang bersumber kepada Al-Qur'an dan al-Sunnah, namun dalam perkembangan berikutnya ada bidang kajian lain, seperti: tafsir, fiqh, kalam, bahasa Arab, sastra maupun yang lainnya.
- Siswa atau peserta didik, mereka adalah orang-orang yang ingin mempelajari Islam, tidak dibatasi

oleh usia, dari segala kalangan dan tidak ada perbedaaan.

- Sistem pengajaran yang dilakukan memakai sistem halaqah.
- Metode pengajaran yang diterapkan memakai 2 metode, yakni metode bandongan dan metode sorogan.
- Waktu pendidikan, tidak ada waktu khusus dalam proses pendidikan di masjid dan langgar, hanya biasanya banyak dilakukan di sore hari atau malam hari, karena waktu tersebut tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dan mereka mempunyai waktu yang cukup luang

2. Meunasah, Rangkang dan Dayah

Secara etimologi, kata Meunasah berasal dari bahasa Arab yaitu madrasah yang berarti tempat belajar atau sekolah. Meunasah merupakan lembaga pendidikan Islam formal pertama di Kesultanan Pasai. Lembaga ini menyelenggarakan pendidikan pada tingkat rendah. Institusi meunasah ini dijumpai pada setiap kampung (gampong) dalam wilayah Kesultanan pasai. Karena salah satu syarat untuk mendirikan sebuah kampung dalam wilayah kesultanan ini haruslah ada meunasah. Meunasah ini berada dalam kepemimpinan seorang alim yang disebut Imum Meunasah. Haidar menyebut bahwa meunasah dipimpin oleh seorang tengku, yang di Aceh Besar disebut Tengku Meunasah. Tengku Meunasah bertugas untuk membina agama di suatu tempat tertentu. Perlu dicatat bahwa ke-

pemimpinan Imum Meunasah pada waktu itu mencakup sebagai pimpinan agama dan merangkap sebagai pimpinan adat yakni wakil sultan pada tingkat desa, seperti kepala desa sekarang.

Sebagai pimpinan agama, Tengku/Imum Meunasah memiliki tugas-tugas keagamaan, antara lain:

- Menagajar anak-anak membaca Al-Qur'an.
- Menjadi imam shalat.
- Mengurus jenazah.
- Memimpin do'a pada kenduri-kenduri di wilayah-nya.
- Menyembelih hewan.
- Mengurus masalah pernikahan. Mengurus kegiat-an-kegiatan ramadhan, seperti mempersiapkan berbuka puasa bersama di meunasah, dan lain-lain.

Konsekuensi seorang Imum Meunasah selain seorang alim juga harus menguasai adat. Dari itu meunasah mem-punyai beberapa fungsi, yakni; sebagai tempat musyawarah desa, tempat menyelesaikan persengketaan, lembaga pen-didikan, tempat melaksanakan shalat lima waktu, shalat tarawih, shalat Idul Fitri dan Idul Adha, tempat melaksana-kan akad nikah dan tempat anak-anak dan para tamu menginap.

Menurut Haidar Daulay, selain beberapa fungsi di atas, beliau juga menuturkan bahwa meunasah memiliki multi-fungsi, tidak hanya sebagai tempat belajar bagi anak-anak, tetapi juga berfungsi sebagai:

- Lambang dari kesatuan masyarakat Aceh.
- Pusat penyiaran berita untuk warga.
- Balai gampong.
- Tempat musyawarah seluruh warga gampong (kampung).
- Tempat pejabat-pejabat gampong memutuskan dan memecahkan masalah-masalah sosial kemasyarakatan.
- Tempat warga gampong tidur di malam hari.
- Tempat tadarus Al-Qur'an.
- Tempat perayaan dan kenduri massal dalam kampung, seperti Maulid Nabi Muhamad. Nuzul Al-Qur'an, Isra' Mi'raj.

Kurikulum meunasah meliputi pembelajaran Al-Qur'an, dasar-dasar pengetahuan agama dan bahasa Arab. Kitab-kitab yang dikaji di meunasah selain Al-Qur'an yaitu kitab Masa il al-Muhtadi li Ikhwa n al-Mubtadi, Bida yat al-Mubtadi, kitab Sharf, kitab al-„Awa mil. Bahkan kalau Imum Meunasah itu ternyata seorang „alim besar, maka kajiannya meliputi kitab Hasyiyyat al-Bajuriy, karya al-Bajuriy (w. 1277 H.) dan kitab Alfiyyah karya Ibn Malik (w. 1274).

Selanjutnya meunasah adalah lembaga pendidikan awal bagi anak-anak yang dapat disamakan dengan tingkatan sekolah dasar. Di meunasah para murid diajar menulis/membaca huruf Arab, ilmu agama dalam bahasa Jawi (Melayu), dan akhlak. Sistem pengajaran pada meunasah ialah guru membaca kitab sambil menjelaskan maknanya dalam bahasa Melayu atau bahasa Aceh, kemudian guru

meminta salah seorang murid untuk membaca ulang sambil memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan murid. Pendidikan meunasah hanya diikuti oleh laki-laki saja, sementara murid perempuan belajar dengan Imum Meunasah di rumahnya atau di rumah guru agama, dan mereka menginap di rumah guru agama tersebut. Meunasah setingkat dengan Sekolah Dasar (SD). Dalam hal ini fungsi meunasah adalah mempersiapkan murid-murid yang akan melanjutkan pendidikannya pada tingkat menengah yakni Rangkang.

Rangkang adalah tempat tinggal murid, yang dibangun di sekitar masjid. Menurut Qabub Meukuta Alam, dalam tiap-tiap kampung harus ada meunasah. Masjid berfungsi sebagai pusat kegiatan umat, termasuk di dalamnya kegiatan pendidikan. Karena murid perlu mondok dan tinggal, maka perlu dibangun tempat tinggal mereka di sekitar masjid, tempat tinggal murid di sekitar masjid inilah yang disebut dengan rangkang. Rangkang menyelenggarakan pendidikan pada tingkat menengah (SLTP), sebagai kelanjutan dari meunasah. Karena itu lembaga pendidikan ini tidak dijumpai pada setiap gampong, akan tetapi dijumpai pada setiap wilayah kemukiman.

Wilayah kemukiman terdiri dari beberapa desa di bawah pimpinan seorang pejabat yang disebut Mukim. Biasanya satu kecamatan dibagi menjadi empat wilayah kemukiman. Pejabat mukim bukanlah pimpinan formal, melainkan sebagai koordinator. Lembaga ini sudah dikenal

sejak zaman Kesultanan Pasai. Paling tidak setiap wilayah kemukiman mempunyai sebuah masjid. Pimpinan rangkang disebut Teungku Rangkang. Kualifikasi seorang Teungku Rangkang adalah seorang alim yang sudah menamatkan pendidikannya pada tingkat Dayah. Sesuai dengan jenjangnya, maka pada rangkang diajarkan pengetahuan-pengetahuan agama Islam setingkat lebih tinggi dari pendidikan Meunasah. Kurikulumnya pendidikan di rangkang ini terpusat kepada pendidikan agama dan bahasa Arab. Untuk pengetahuan bahasa Arab digunakan kitab al-Jurumiyyah, Mutammimah. Sementara untuk pengetahuan agama dipakai Matan Taqrib, karya Abu Syuja‘ (w. 1196) dan kitab Hasyiyyat al-Bajuri, karya al-Bajuri (w. 1277 H.) semua kitab ini berbahasa Arab.

Sistem pendidikan di rangkang ini sama dengan sistem pendidikan di pesantren, murid-murid duduk membentuk lingkaran dan si guru menerangkan pelajaran, berbentuk halaqah, metode yang disampaikan di dunia pesantren disebut namanya dengan sorogan dan wetonan. Sistem pengajarannya ialah guru membaca kitab sambil menjelaskan maknanya dalam bahasa Melayu atau bahasa Aceh, kemudian guru meminta salah seorang murid untuk membaca ulang sambil memperbaiki kesalahan-kesalahan bacaan murid.

Fungsi Rangkang adalah untuk mempersiapkan murid-murid yang akan melanjutkan pendidikannya ke tingkat Dayah. Biasanya murid-murid Rangkang menginap di

Rangkang sebagaimana halnya dengan murid-murid di Meunasah. Karena menurut ajaran Islam, sejak akil-baligh, anak-anak harus berpisah tempat tidurnya dengan orang tuanya, dan karena itu pula rumah-rumah di Aceh tidak mempunyai kamar tidur untuk anak-anaknya yang sudah remaja.

Snouch Hurgronje, mendeskripsikan rangkang dalam bentuk rumah kediaman, tetapi lebih sederhana, memiliki satu lantai saja di kanan kiri gang pemisah (blok) masing-masing untuk 1-3 murid. Kadang-kadang rumah yang sudah tidak dipakai lagi oleh orang shaleh, diwakafkan untuk siswa. Rumah tersebut diserahkan kepada guru untuk dijadikan sebagai rangkang. Lebih lanjut Hurgronje menyebutkan tengku rangkang bertugas untuk menjadi guru bantu yang membimbing siswa yang tinggal di rangkang. Tengku rangkang ini bertugas untuk memberi penjelasan dan keterangan tentang pelajaran yang kurang jelas bagi siswa. Tengku rangkang membantu siswa dengan pengetahuan praktis, menuntun mereka memakai buku pikah (fikih) dan usuy (Ushuluddin) berbahasa Melayu seperti Masailah, Bidayah, dan surat al-Mustaqim.

Lembaga pendidikan beriutnya yang populer di aceh adalah Dayah. Dayah berasal dari bahasa Arab, zawiyah. Kata zawiyah pada mulanya merujuk kepada sudut suatu bangunan, dan sering dikaitkan dengan masjid. Di sudut masjid itu terjadi proses pendidikan antara si pendidik dan si terdidik. Selanjutnya zawiyah dikaitkan tarekat-tarekat

sufi, di mana seorang syekh atau mursyid melakukan kegiatan pendidikan kaum sufi. Dengan demikian, kata dayah yang berasal dari kata zawiyah di samping memiliki hubungan kebahasaan yakni berubahnya kata zawiyah menjadi dayah menurut dialek Aceh, juga memiliki hubungan fungsional, yakni sama-sama merujuk kepada tempat pendidikan.[13]

Dayah merupakan lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di Aceh sejak masa Kesultanan Pasai. Dayah dipimpin seorang ulama besar yang disebut Teungku Chik. Karena itu Dayah hanya dijumpai di setiap daerah di mana seorang ulama besar berdomisili. Dayah menerima lulusan-lulusan Rangkang. Dengan demikian, tidak jarang seorang lulusan Rangkang harus meninggalkan kampung halamannya (meudagang) untuk menuntut ilmu pada Dayah yang diinginkannya. Bahkan mereka harus tinggal bertahun-tahun di Dayah untuk menjalani studinya. Di sini mereka belajar memasak dan mencuci sendiri pakaiannya. Hal ini diperlukan untuk mengajarkan murid-murid Dayah bisa hidup mandiri.

Dayah mengajarkan pengetahuan-pengetahuan agama Islam yang tinggi-tinggi, meliputi ilmu fiqh, ushul fiqh, tauhid, tafsir, hadis, balaghah dan mantiq. Pendidikan dayah terkesan sangat monoton dalam penyusunan kurikulum yang masih berorientasi kepada sistem lama. Artinya kitab

[13]C. Snouch Hurgronje, *Aceh Rakyat dan Adat Istiadanya*, (Jakarta : INIS, 1997), 23

yang diajarkan adalah kitab-kitab abad pertengahan. Secara keseluruhan di bidang kurikulum ternyata tidak ada perubahan dan perkembangan, yang ada hanyalah pengulangan. Hal ini disebabkan pengaruh dari pendahulu yang begitu kuat sehingga tidak ada tokoh dayah yang berani untuk mengembangkan kurikulum yang representatif.

Dayah adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan mata pelajaran agama yang bersumber dari bahasa Arab, misalnya fiqh, bahasa arab, tauhid, tasawuf, dan lain-lain, tingkat pendidikannya adalah sama dengan tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Untuk kelancaran pendidikan dan pengajaran, Teungku Chik biasanya mengangkat asistennya yang disebut Teungku Rangkang, dan asisten ini seringkali direkrut dari kalangan murid-muridnya yang cerdas. Banyaknya Teungku Rangkang tergantung pada banyaknya murid Dayah.

Pada masa kesultanan Aceh, dayah menawarkan tiga tingkatan pengajaran, yakni rangkang (junior), balee (senior), dan dayah manyang (universitas). Di beberapa dayah hanya terdapat rangkang dan balee, sedangkan di tempat lain hanya ditemui tingkat dayah manyang saja. Meskipun demikian di tempat tertentu juga terdapat tiga tingkatan sekaligus, mulai junior sampai universitas. Sebelum murid belajar di dayah, mereka harus sudah mampu membaca Al-Qur'an yang mereka pelajari di rumah atau di meunasah dari seorang teungku. Kepergian untuk

menuntut ilmu agama di dayah sering disebut dengan meudagang.

Metode mengajar di dayah pada dasarnya dengan oral, meudrah dan metode hafalan. Pada kelas yang lebih tinggi, metode diskusi dan debat (meudeubat) sangat dianjurkan dalam segala aktifitas proses belajar mengajar, dan ruang kelas hampir merupakan sebuah ruang seminar. Para teungku biasanya berfungsi sebagai moderator, yang kadang-kadang juga berperan sebagai pengambil keputusan. Santri (aneuk dayah) biasanya terdiri dari dua kelompok, yaitu santri kalong dan santri mukim/meudagang. Santri kalong merupakan bagian aneuk dayah yang tidak menetap dalam pondok, tetap pulang ke rumah masing-masing setelah belajar. Mereka biasanya berasal dari daerah sekitar dayah tersebut. Sementara santri meudagang adalah putra dan putri yang tinggal menetap dalam dayah dan biasanya berasal dari daerah jauh.

Sistem pendidikan yang dikembangkan di dayah atau rangkang tidak berbeda dengan apa yang dikembang di pesantren-pesantren di Jawa atau surau-surau di Sumatera Barat, yakni bisa ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Ditinjau dari segi materi pelajarannya, yang diajarkan adalah mata pelajaran agama semata-mata yang bertitik tolak kepada kitab-kitab klasik (kitab kuning). Pada umumnya, pelajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana (kitab jawoe/kitabarab melayu) kemudian dilanjutkan

dengan kitab-kitab yang lebih mendalam, tingkatan suatu dayah dapat diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan. Ada delapan macam bidang pengetahuan dalam kitab-kitab Islam klasik yang di ajarkan di dayah, yakni 1) nahwu dan saraf (morfologi), 2) fiqh, 3) Ushul fiqh, 4) Hadist, 5) Tafsir, 6) Tauhid, 7) Tasawuf dan etika, dan cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Tinggi rendahnya ilmu seseorang diukur dari kitab yang dipelajarinya.

2. Ditinjau dari segi metodenya adalah hafalan, meudrah dan muedeubat. Dalam tradisi pesantren di Jawa sering disebut sorogan dan wetonan.
3. Ditinjau dari segi sistem pembelajaran adalah non-klasikal. Yakni santri (aneuk dayah) tidak dibagi berdasarkan tingkatan kelas, tetapi berdasarkan kitab yang dipelajarinya.
4. Ditinjau dari segi manajemen pendidikan, maka di lembaga pendidikan ini tidak mengenal nomor induk pelajar, ada rapor, ada sertifikat dan lain sebagainya.

Kebiasaan orang Aceh, belajar di dayah, atau sering disebut meudagang, biasanya membutuhkan waktu yang tak terbatas. Artinya seorang murid datang dan meninggalkan dayah kapan ia suka. Beberapa aneuk dayah (santri) belajar di beberapa dayah, berpindah dari satu dayah ke dayah lainnya, setelah belajar beberapa tahun. Jumlah tahun yang dihabiskan oleh seorang murid tergantung pada

ketekunannya atau pengakuan guru bahwa murid itu telah selesai dalam studinya. Kadang-kadang murid tersebut ingin melanjutkan studinya di dayah sampai ia sanggup mendirikan dayahnya sendiri.

Dalam kaitan ini, tidak ada penghargaan secara diploma. Karena itu, setelah belajar dan mendapat pengakuan dari teungku chik (pimpinan dayah) mereka terjun ke dunia masyarakatdan bekerja sebagai teungku di meunasah-meunasah, menjadi da'i atau imam-imam di masjid-masjid. Adapun signifikasi lembaga dayah itu adalah:

- Sebagai pusat belajar agama. (*The central of religious learning*).
- Sebagai benteng terhadap kekuatan melawan penetrasi penjajah.
- Sebagai Agen Pembangunan.
- Sebagai Sekolah Bagi Masyarakat.

3. Pesantren

Kata pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe-dan akhiran -an berarti tempat tinggal santri. Pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam. Secara etimologi pesantren barasal dari kata pe-santri-an, berarti —tempat santri. Versi Ensiklopedi Islam memberi gambaran yang berbeda, menurutnya pesantren berasal dari bahasa tamil yang berarti guru ngaji atau bahasa India-sastria dan

kata sastra yang bebarti buku-buku suci, buku-buku agama atau ilmu tentang pengetahuan.

Secara terminologi, pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya sarat dengan pendidikan Islam yang dipahami dan dihayati serta diamalkan dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup.[14] Sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam, dipandang dari histories-cultural, pesantren dapat dikatakan sebagai training center yang sekaligus menjadi sebuah bentuk curtural central Islam yang dilembagakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Islam.

Berdirinya pesantren di Indonesia adalah sebuah tuntutan dari keinginan masyarakat Islam menuju hidup yang lebih layak dan bebas dari kolonial, dan dalam cacatan sejarah pesantren yang pertama sekali berdiri di Indonesia adalah pesantren Pamekasan di Madura, pesantren tersebut berdiri pada tahun 1062, pesantren ini biasa disebut dengan pesantren Jan Tampess II. Di tinjau dari sejarah, belum ditemukan data sejarah yang membuktikan bahwa berdirinya pesantren di Indonesia, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa pesantren telah tumbuh sejak awal masuknya Islam ke Indonesia, sementara yang lain berpendapat bahwa pesantren baru muncul pada masa

[14]Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren : Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren, (Jakarta : Seri INIS xx, 1994), 6

Walisongo dan Maulana Malik Ibrahim dipandang sebagai orang yang pertama mendirikan pesantren.

Apabila ditelusuri sejarah pendidikan di Jawa, sebelum datang agama Islam telah ada lembaga pendidikan Jawa kuno yang praktek pendidikannya sama dengan pesantren. Lembaga pendidikan Jawa kuno itu bernama pawiyatan, di lembaga tersebut tinggal Ki ajar dengan cantrik. Ki ajar orang yang mengajar dan cantrik orang yang diajar. Kedua kelompok ini tinggal dalam satu komplek dan di sini terjadilah proses belajar mengajar. Dengan menganalogikan pendidikan pawiyatan ini dengan pesantren, sebetulnya tidak terlalu sulit untuk menetapkan bahwa pesantren itu telah tumbuh sejak awal perkembangan Islam di Indonesia khususnya di Jawa, sebab model pendidikan pesantren Jawa Kuno telah ada sebelum Islam masuk yaitu pawiyatan. Dengan masuknya Islam, maka sekaligus diperlukan sarana pendidikan, tentu saja model pawiyatan ini dijadikan acuan dengan merubah sistem yang ada ke sistem pendidikan Islam.

Berbeda dengan Abdul Mukti, beliau menuturkan bahwa sama halnya dengan madrasah, pesantren juga tidak muncul dalam kevakuman sosial. Begitu juga kemunculan pesantren itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosial politik dan keagamaan masyarakat tempat di mana pesantren itu muncul. Beliau mengemukakan bahwa pesantren pertama kali muncul di Kesultanan Mataram. Kesultanan Mataram berada di bekas wilayah kerajaan Hindu Mojopahit.

Untuk memperkuat kedudukannya, Sultan Agung (1613-1645) melaksanakan kebijakan sinkretisme. Akibatnya muncul tiga golongan masyarakat di Kesultanan Mataram, yakni: Kaum Priyayi, Kaum Abangan, dan Kaum Santri. Kaum priyayi dan Kaum Abangan menjadikan masjid sebagai pusat pendidikannya. Sementara Kaum Santri yang menolak kebijakan sinkretisme Sultan membangun lembaga pendidikan baru yakni pesantren untuk memelihara kemurnian akidahnya.

Dengan demikian diperkirakan inilah pesantren pertama di Indonesia. Jadi pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan agama seperti yang kita kenal sekarang ini belum muncul pada kesultanan-kesultanan Islam terdahulu lainnya seperti Pasai (1260-1514), Aceh Darussalam (abad ke VIII-1912), Demak (1518-1546), Banten (1552-1695), Cirebon, Pajang (1546-1582), dan Mataram (1586-1704).

Sejak itu pesantren merupakan lembaga pendidikan penting dalam masyarakat Indonesia setelah madrasah. Pada mulanya pesantren menyebar di seluruh wilayah Kesultanan Mataram. Kemudian pada masa berikutnya, penyebaran pesantren tersebut meluas ke daerah-daerah lainnya terutama di Jawa dan Madura, dan di luar jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, terutama setelah Indonesia merdeka.

Sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren mempunyai keunikan dibandingkan dengan sistem yang diterapkan dalam pendidikan pada umumnya yaitu:

- Memakai sistem tradisional yang mempunyai kebebasan penuh dibandingkan dengan sekolah yang lain.
- Kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi karena mereka praktis bekerja sama mengatasi problema non-kurikuler mereka.
- Para santri tidak mengidap penyakit simbolis yaitu perolehan gelar dan ijazah, karena sebahagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah, sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk ke pesantren tanpa adanya ijazah tersebut, hal ini karena tujuan mereka hanya ingin mencari keridhaan Allah swt. saja.
- Sistem pondok pesantren mengutamakan kesederhanaan, idealis, persaudaraan, persamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup.
- Alumni pondok pesantren tidak ingin menduduki jabatan pemerintahan sehingga hampir tidak dapat dikuasai oleh pemerintah.

Inti dari pesantren itu adalah pendidikan ilmu agama, dan sikap beragama. Karenanya mata pelajaran yang diajarkan semata-mata pelajaran agama. Pada tingkat dasar anak didik baru diperkenalkan tentang dasar agama dan Alqur'an al-Karim. Setelah berlangsung beberapa lama pada saat anak didik telah memiliki kecerdasan tertentu maka mulailah diajarkan kitab-kitab klasik.

Kitab-kitab klasik ini juga diklasifikasikan menjadi tingkat dasar, tingkat menengah dan tinggi. Pesantren terbagi menjadi empat tingkatan, yaitu: a) Tingkat dasar. b) Menengah. c) Tinggi. d) Takhassus. Setelah datangnya kaum penjajah barat (Belanda), peranan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam semakin kokoh. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang reaksional terhadap penjajah. Karena itu, di zaman Belanda sangat kontras sekali pendidikan di pesantren dengan pendidikan sekolah-sekolah umum. Pesantren semata-mata mengajar-kan ilmu-ilmu agama. Sistim pendidikan pesantren baik metode, sarana fasilitas serta yang lainnya masih bersifat tradisional. Administrasi pendidikannya belum seperti sekolah umum yang dikelola oleh pemerintah kolonial Belanda, non klasikal, metodenya sorogan, wetonan hapalan.

Pemahaman agama lewat kitab-kitab klasik, ada lima unsur pokok pesantren: kyai, santri, masjid, pondok, dan pengajaran kitab-kitab klasik. Dalam perkembangan berikutnya pesantren mengalami dinamika, kemampuan dan kesediaan pesantren untuk mengadopsi nilai-nilai baru akibat modernisasi, menjadikan pesantren berkembang dari yang tradisional ke modern. Karena itu hingga saat sekarang pesantren tersebut di bagi menjadi dua secara garis besar yaitu Pesantren Salafi, adalah pesantren yang masih terkait dengan sistem dan pola yang lama, Pesantren

Khalafi, adalah pesantren yang telah menerima unsur-unsur pembaharuan.

4. Surau

Kata surau bermula dari istilah Melayu-Indonesia dan penggunaannya meluas sampai di Asia Tenggara. Sebutan surau berasal dari Sumatera Barat tepatnya di Minangkabau. Sebelum menjadi lembaga pendidikan Islam, istilah ini pernah digunakan (warisan) sebagai tempat penyembahan agama Hindu-Budha. Secara bahasa surau berarti tempat atau tempat penyembahan. Menurut pengertian asalnya surau berarti bangunan kecil yang didirikan untuk penyembahan arwah nenek moyang.

Surau dalam sejarah Minangkabau diperkirakan berdiri pada 1356 M yang dibangun pada masa Raja Adityawarman di Kawasan bukit Gonbak. Setelah keberadaan agama Hindu-Budha mulai surut dan pengaruh selanjutnya digantikan Islam, surau akhirnya mengalami akulturasi budaya ke dalam agama Islam. Setelah mengalami Islamisasi, surau akhirnya menjadi pusat kegiatan bagi pemeluk agama Islam dan sejak itu pula surau tidak dipandang lagi sebagai sesuatu yang mistis atau sakral.

Fungsi surau sebagai tempat penyembahan agama Hindu-Budha berjalan cukup lama, bahkan diperkirakan sampai Islam masuk ke daerah ini. Masa perkembangan

berikutnya, yaitu ketika surau di minangkabau memasuki tahap Islamisasi, terminologi surau kemudian mengalami perluasan makna menjadi salah satu tempat peribadatan bagi umat Islam sekaligus menjadi salah satu institusi pendidikan Islam bagi masyarakat Minangkabau. Aktivitas ibadah dan pendidikan Islam muncul di surau untuk pertama kalinya ketika Syekh Burhanuddin mengajarkan dan mengembangkan Islam di Surau Ulakan Pariaman.

Dalam struktur masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal telah mengkristal adat bahwa laki-laki yang telah baligh pada malam hari hidup terpisah dari rumahnya. Oleh karena itu, sebelum Islam masuk ke Minangkabau, telah ada semacam surau yang di pergunakan sebagai tempat berkumpulnya laki-laki lajang yang sudah baligh. Tatkala Islam masuk, kehadiran surau pertama kali diperkenalkan oleh syekh Burhanuddin sebagai tempat melaksanakan shalat dan pendidikan tharekat (suluk), dengan cepat bisa tersosialisasi secara baik dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

Posisi surau kemudian mengalami perkembangan. Selain fungsinya diatas, surau juga menjadi tempat berkumpulnya anak laki-laki yang telah baligh dan persinggahan bagi para perantau. Dalam kamus bahasa Indonesia, surau di artikan tempat (rumah) ummat Islam melakukan ibadahnya (shalat, mengaji dan sebagainya),

pengertian apabila dirinci mempunyai arti bahwa surau berarti suatu tempat bangunan kecil untuk tempat shalat, tempat belajar mengaji anak, tempat wirid (pengajian agama) bagi orang dewasa.

Dalam perkembangannya eksistensi surau merupakan lembaga yang sangat strategis bagi penyiaran agama Islam. Bahkan banyak informasi yang diperoleh para pemuda Minangkabau melalui interaksi mereka dengan para perantau yang singgah di surau. Di sini terlihat bagaimana sesungguhnya surau era awal, telah berperan multi-fungsional. Baik dalam wacana keilmuan maupun keagamaan. Eksistensi surau Ulakan sebagai lembaga pendidikan Islam masa awal, telah banyak berperan dalam penyiaran agama Islam.

Lembaga ini telah memberikan andil bagi lahirnya sosok ulama Minangkabau era selanjutnya. Mereka kemudian ada yang menuntut ilmu di Mekkah untuk beberapa waktu lamanya. Setelah kembali, mereka juga ikut mendirikan surau-surau ditempat asal mereka sebagai sarana pengembangan ajaran Islam dan praktik tarekat. Di antara ulama besar Minangkabau yang pernah belajar di Surau Ulakan adalah Tuanku Mansiang Nan Tuo yang mendirikan Surau Paninjauan dan Tuanku Nan Kacik yang mendirikan surau di Koto Gedang.

Kemudian ulama Minangkabau ini melalaui surau-surau yang didirikannya, menyebarkan ajaran Islam yang

menghasilkan ulama-ulama Islam Minangkabau yang baru, seperti Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo. Dari sini kemudian surau berkembang dengan pesat di wilayah Minangkabau. Surau berfungsi sebagai lembaga sosial budaya, adalah fungsinya sebagai tempat pertemuan para pemuda dalam upaya mensosialisasi-kan diri mereka.

Selain dari itu surau juga berfungsi sebagai tempat persinggahan dan peristirahatan para musafir yang sedang menempuh perjalanan, dengan demikian suarau mempunyai multifungsi. Sistem pendidikan disuaru banyak kemiripannya dengan sistem pendidikan di pesantren. Murid tidak terikat dengan sistem adminis-trasi yang ketat. Syekh atau guru mengajar dengan metode bandongan dan sorogan, ada juga murid yang berpindah ke surau lain ketika dia sudah merasa cukup memperoleh ilmu di surau terdahulu.

Dari segi mata pelajaran yang diajarkan di surau sebelum masuknya ide-ide pembaruan pemikiran Islam pada awal abad ke-20 adalah mata pelajaran agama yang berbasis kepada kitab-kitab klasik. Surau sebagaimana layaknya pesantren juga memiliki kekhususan-kekhususan. Ada surau yang kekhususannya dalam ilmu alat, seperti surau kamang, ada spesialis ilmu mantik, ma'ani, surau kota godang, dalam ilmu tafsir dan faraid, surau sumantik, sedangkan surau Talam spesialis dalam ilmu nahu.

Surau sebagai tempat praktik sufi atau tarekat bukanlah sesuatu yang aneh, sebab surau yang pertama yang dibangun di Minangkanau oleh Burhanuddin Ulakan adalah untuk memperaktikkan ajaran tarekat di kalangan masyarakat Minangkabau, khususnya pengikut syekh Burhanuddin Ulakan. Surau Ulakan sebagaimana yang di tuliskan Azumardi Azra, adalah merupakan pusat tarekat, murid-murid yang belajar di Surau Ulakan itu, membangun pulau surau di tempat-tempat lain yang mencontoh Surau Ulakan itu sendiri yang merupakan prototipe dari surau tarekat.

Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, surau menggunakan sistem pendidikan halaqah. Materi pendidikan yang diajarkan pada awalnya masih diseputar belajar huruf hijaiyah dan membaca Al-Qur'an, di samping ilmu-ilmu keIslaman lainnya, seperti keimanan, akhlak, dan ibadah. Pada umumnya pendidikan ini hanya dilaksanakan pada malam hari secara bertahap. Dengan demikian surau memiliki fungsi ganda, dan yang utama di antaranya adalah fungsi pendidikan. Pendidikan yang ada di surau mirip dengan apa yang ada di pesantren. Inti pelajarannya adalah ilmu-ilmu agama, yang pada tingkat-tingkat tertentu mendasarkannya kepada pengajian kitab-kitab klasik.

Bab 4
PENDIDIKAN ISLAM DI SURABAYA

A. Sejarah Sunan Ampel (Raden Rahmat)

Sunan Ampel atau dikenal dengan Raden Rahmat lahir di Champa pada tahun 1401. Nama asli beliau pada waktu kecil ialah Sayyid Muhammad 'Ali Rahmatullah. Sunan Ampel mempunyai dua istri yaitu Dewi Condrowati dan Dewi Karimah. Sunan Ampel wafat pada tahun 1425 M di Surabaya dan dimakamkan di Ampel Denta, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pada awal menyiarkan Islam di Jawa, Sunan Ampel menggunakan strategi sosio-kultural masyarakat. Strategi tersebut beliau gunakan dengan mengubah tradisi atau kebiasaan di masyarakat, seperti bedug dan kentongan yang terdapat di masjid dan mushola. Dengan adanya bedug dan kentongan diharapkan masyarakat dapat tertarik untuk masuk islam. Strategi lainnya yang Sunan Ampel lakukan dalam proses penyebaran Islam di nusantara yakni dengan mengirimkan mengirim atau mengutus putra-putranya,

kerabatnya, santri-santri dan utusan dakwah lainnya untuk menyiarkan Islam ke daerah lainnya.

Adapun metode Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam yakni melalui pembauran kepada masyarakat dan pendekatan intelektual. Pembauran kepada masyarakat dengan cara mendekatkan diri atau bergaul di masyarakat, kemudian secara perlahan-lahan Sunan Ampel memberikan pemahaman tentang ajaran agama Islam kepada masyarakat. Sedangkan pendekatan intelektual beliau gunakan dengan memberikan pemahaman tentang agama Islam kepada masyarakat atau cendekiawan pada saat itu, dan pemahaman tersebut dapat diterima oleh akal manusia.

Untuk memperluas penyebaran agama Islam di nusantara, Sunan Ampel mendirikan sebuah pesantren yang dikenal dengan Pesantren Ampel Denta di Surabaya sebagai lembaga pendidikan penyebaran agama Islam. Selain itu, Sunan Ampel merupakan salah satu perencana terbangunnya kesultanan Demak Bintaro dan beliau bersama para wali songo lainnya, ikut serta dalam mendirikan Masjid Agung Demak. Selanjutnya Sunan Ampel juga mendirikan sebuah masjid bernama Masjid Ampel, yang terletak di desa Ampel.[1]

Sunan Ampel putra Syaikh Ibrahim As-Samarkandi adalah tokoh Wali Songo tertua yang berperan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di

[1]Meli Yuliana & Ahmad Abas Musofa, *Ulama Intelektual Abad 15-16 M*, Journal of Indonesian History, 11(01)2023, 13

Nusantara. Melalui pesantren Ampeldenta, Sunan Ampel mendidik kader-kader penggerak dakwah Isam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Drajat. Dengan cara menikahkan juru dakwah Isam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit, Sunan Ampel membentuk keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan yang menjadi cikal-bakal dakwah Islam di berbagai daerah. Sunan Ampel sendiri menikahi putri Arya Teja, Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembu Sura Raja Surabaya yang muslim. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit melainkan meluas sampai ke daerah Sukadana di Kalimantan.[2]

Islam yang berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16 adalah Islam yang unik. Sebab, ia merupakan akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tradisi keagamaan, maupun konsep-konsep sufisme yang khas, yang merefleksikan keragaman tradisi muslim secara keseluruhan.

Usaha dakwah Sunan Ampel lebih merupakan hasil formulasi kreatif dari tradisi intelektual dan spiritual yang paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam. hasilnya, semangat dakwah yang terbentuk mampu

[2]Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo*, (Bandung : Mizan Media Utama, 2016), 190

mempertahankan anasir-anasir lama kapitayan di satu pihak dan melakukan penetrasi sosio-kultural-religius terhadap masyarakat Hindu-Buddha secara kreatif di pihak lan dengan memasukkan tradisi keagamaan muslim melalui pendekatan sufisme, yang dengan cepat diterima dan diserap oleh masyarakat Sunan Ampel telah menyumbang-kan tenaga untuk mengislamkan orang yang belum Islam dan mengajarkan akhlak terpuji yang terkenal dikalangan masyarakat dan sesuai dengan ajaran Islam.

Ajaran Sunan Ampel yang terkenal itu ialah falsafah Moh Limo atau tidak mau melakukan lima hal tercela, yaitu 1. Moh Main atau tidak mau berjudi, 2. Moh Ngombe atau tidak mau minum arak atau mabuk-mabukkan, 3. Moh Maling atau tidak mau mencuri, 4. Moh Madat atau tidak mau menghisap candu, ganja dan lain-lain, 5. Moh Madon atau tidak mau berzina/main perempuan yang bukan istrinya.

Adapun cara Sunan Ampel untuk mengajak rakyat masuk Islam, berikut beberapa kontribusi Sunan Ampel dalam menggelorakan dakwah Islam:

- Membangun Masjid sebagai pusat kekuatan umat. Babad Ngampel denta menuturkan bahwa pengang-katan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan Gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel denta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut sumber legenda Islam yang di catat

H.J. De Graaf & Th.G.Th Pigeaud dalam Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram (1986), Raden Rahmat diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat Pecat Tandha di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya, selain dilakukan secara resmi oleh Pecat Tandha di Terung juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan Kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya. Menurut lembaga Riset Islam pesantren Luhur Sunan Giri Malang (1975), karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang di-serahkan oleh Raja Majapahit. Pembangunan masjid ini adalah sarana dakwah Sunan Ampel yang sama seperti ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang beliau lakukan adalah pembangunan sebuah masjid. Selain itu, Sunan Ampel membangun masjid sebagai pusat kekuatan umat, sehingga pendirian masjid sebagai sarana dakwah. Beliau juga membangun pondok pesantren di Ampel Dento. Mendirikan pesantren ini sebagai pusat kaderisasi. Pengaruh dakwah Islam Sunan Ampel beserta putra, saudara, menantu, kemenakan, kerabat, dan murid-muridnya yang tersebar di berbagai tempat tidak diragukan lagi telah memberikan kontribusi tidak kecil bagi terjadinya perubahan sosio-kultural-religius pada masyarakat sebelumnya mengikuti adat dan

tradisi keagamaan majapahit yang terpengaruh Hindu-Buddha dan kapitayan.

- Seruan Dakwah Islam Kepada Penguasa Majapahit Menurut Babad Diponegoro, Sunan Ampel sangat berpengaruh di kalangan istana Majapahit, bahkan isterinya pun berasal dari kalangan istana. Raden Fatah, putera Prabu Brawijaya, raja Majapahit, menjadi murid beliau. Dekatnya Sunan Ampel dengan kalangan istana membuat penyebaran Islam di daerah kekuasaan Majapahit, khususnya di pantai utara Pulau Jawa tidak mendapat hambatan yang berarti, bahkan mendapat restu dari penguasa kerajaan. Sunan Ampel tercatat sebagai perancang kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa dengan ibukota di Bintoro, Demak. Dialah yang mengangkat Raden Fatah sebagai sultan pertama Demak, yang dipandang punya jasa paling besar dalam meletakkan peran politik umat Islam di nusantara. Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila, putri Arya Teja dari Tuban. Menurut Sedjarah Dalem, Arya Teja dari Tuban menikahi putra Arya Lembusura dan menurunkan bupati-bupati Tuban. Itu berarti, Nyai Ageng Manila yang dinikahi Raden Rahmat itu adalah cucu perempuan Arya Lembusura. Oleh karena terhitung cucu menantu Arya Lembusura, maka pada saat Arya Lembusura mangkat, Raden Rahmat menggantikan kedudukannya sebagai penguasa Surabaya, sebagaimana dikisahkan sumber-sumber tertulis seperti

Sedjarah Regent Soerabaja yang mencatat bahwa Raden Rahmat adalah bupati pertama Surabaya. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa Sunan Ampel adalah putra Syekh Ibrahim Asmarakandiy yang lahir di negeri Champa. Di antara tujuan kedatangannya ke tanah Jawa bersama Ali Murtadho dan Abu Hurairoh adalah untuk menyeru raja .Brawijoyo dan rakyatnya agar mau masuk Islam. Selain itu juga mengunjungi ipar ayahnya. Ratu Dworowati di Trowulan Mojopahit. Sebelum menuju pulau Jawa, mereka singgah terlebih dahulu ke Palembang. Sunan Ampel melakukan perjalanan dari Champa menuju ke Palembang, lalu melewati daerah Kembang Kuning, hingga akhirnya sampai ke kerajaan Mojopahit. Sunan Ampel menyerukan dakwah kebenaran Islam kepada para penguasa dengan cara bijak, kelembutan hati dan sikap yang ramah. Oleh karenanya, meskipun Raja Mojopahit tidak bersedia masuk Islam, namun tetap memberi kekuasaan pada Sunan Ampel untuk berdakwah di Kerajaan Mojopahit dan seluruh rakyat Mojopahit. Sunan Ampel pun memberi hak dan kewenangan untuk bertempat tinggal di Ampel Dento beserta keluarganya. Dari sinilah, upaya Sunan Ampel dalam menggelorakan dakwah Islam kepada masyarakat tak pernah surut.

- Mendirikan Pesantren Sebagai Pusat Kaderisasi. Sunan Ampel adalah penerus cita-cita dan perjuangan Maulana Malik Ibrahim. Ia memulai aktivitasnya dengan mendirikan pondok pesantren di Ampel Denta,

dekat Surabaya yang sekaligus menjadi pusat penyebaran Islam yang pertama di Jawa. Di tempat inilah dididik pemuda-pemudi Islam sebagai kader yang terdidik, untuk kemudian disebarkan ke berbagai tempat di seluruh pulau Jawa. Muridnya antara lain Raden Paku yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Giri, Raden Patah yang kemudian menjadi sultan Pertama dari kerajaanIslam di Bintoro Demak, Raden Makdum Ibrahim yang dikenal dengan SunanBonang, Raden Kosim Syarifuddin yang dikenal dengan Sunan Drajat, MaulanaIshak yang pernah diutus ke daerah Blambangan untuk mengislamkan rakyatdisana, dan banyak lagi mubalig yang mempunyai andil besar dalam islamisasi Pulau Jawa.

- Penyampaian dakwah melalui huruf pegon Sunan Ampel juga yang pertama kali menciptakan Huruf Pegon atau tulisan Arab berbunyi bahasa Jawa. Dengan huruf pegon ini, beliau dapat menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada para muridnya. Tujuan penciptaan tulisan Pegon semula dimaksudkan untuk penyebaran ajaran agama Islam, agar orang Jawa yang tidak pandai bahasa Arab dapat mengerti dan memahami maksud ajaran itu dengan baik. Tetapi, seiring dengan bergulirnya waktu, tulisan Pegon kemudian juga difungsikan sebagai sarana untuk menuliskan bermacam-macam maksud dan kepentingan oleh orang Jawa. Sedangkan sekarang huruf pegon tetap dipakai sebagai bahan pelajaran agama Islam di kalangan pesantren. Sunan Ampel atas permintaan Raja Mojopahit, berupaya keras

memperbaiki moralitas masyarakat yang saat itu terjerumus ke dalam perbuatan keji dan mungkar seperti main (berjudi), mendem (minum khamr), maling (mencuri), madat (menghisap candu, madon (berzina dengan wanita). Sunan Ampel membuat rumusan istilah Moh Limo, sebuah ungkapan singkat untuk menentang lima perkara yang diharamkan dalam Islam dan termasuk dosa besar. Inilah salah satu strategi dakwah para wali di Jawa Timur dengan menggunakan huruf pegon. Istilah Moh Limo, bukan mo-limo ini masih terkenal sampai sekarang.

- Metode Dakwah Sunan Ampel Cara-cara Rasulullah berdakwah tersebut dalam waktu dan ruang yang berbeda dipraktekkan oleh Walisongo di Jawa. Secara konsepsional Walisongo menerapkan beberapa metode, seperti metode maw'idhatul hasanah wamujadalah billati hiya ahsan, metode al hikmah, metode Tadarruj/Tarbiyatul Ummah, metode pembentukan dan penanaman kader dan metode penyebaran juru dakwah ke berbagai daerah. Berbagai metode-metode dakwah para wali di atas, dapat dinyatakan bahwa para wali yang dalam usahanya mengislamkan masyarakat Jawa ialah dengan melalui pendekatan budaya. Pada masa Hindu-Budha, budaya Jawa asli tersebut, ditumbuh kembangkan. Para cendikiawan Jawa menyadap dan mengolah unsur-unsur Hinduisme bagi pengembangan dan penghalusan budaya Jawa. Satu hal

yang perlu dicatat bahwa Hinduisme mempunyai dasar pikiran yang sejajar atau sejalan dengan religi animisme-dinamisme, yakni bahwa manusia bisa menjalin hubungan dengan dewa-dewa dan ruh-ruh halus. Bahkan dengan laku tapa brata manusia bisa menjadi sakti dan bersatu dengan dewanya. Jadi pengaruh Hinduisme justru menyuburkan dan meningkatkan laku keprihatinan. Kemudian ketika kedatangan agama Islam yang mulai menyebar di Indonesia semenjak abad ke-13 M, ternyata juga tidak mengganggu budaya asli animisme-dinamisme di Jawa. Hal ini dikarenakan budaya asli ini mempunyai watak yang elastis sehingga dapat menyusup dalam Islam pesantren. Karena yang menyebar ke Indonesia adalah Islam Sufi, maka agama Islam yang ajarannya telah dimistikkan mengalami perkembangan dengan sangat cepat. Hal ini karena ajaran Islam ini disebarkan melalui pendekatan Budaya. Pendekatan budaya dimaksud adalah penerapan metode-metode dakwah dengan mempergunakan budaya lokal, sebagaimana paparan berikut:

1. Metode al-Hikmah Metode ini sebagai sistem dan cara berdakwah para wali merupakanjalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, atraktif dansensasional. Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam. Sunan Ampel, menyusun aturan-aturan syariat Islam bagi orang-orang Jawa.

2. Metode Tadarruj atau Tarbiyatul Ummah Metode ini dipergunakan sebagai proses klasifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat. Agar ajaran Islam dapat dengan mudah dimengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan secara merata, maka metode yang ditempuh oleh Walisongo didasarkan atas pokok pikiran li kulli maqam yaitu memperhatikan bahwa setiap jenjang dan bakat, ada tingkat, bidang materi dan kurikulumnya. Sesuai dengan cara ini, penyampaian fiqih ditujukan bagi masyarakat awam dengan jalan pesantren dan melalui lembaga sosial. Dalam lingkungan pesantren disediakan pengajaran dan pendidikan bagi masyarakat umum yang ingin belajar takhassus (mengkaji secara intens dan khusus) masalah fiqih dan syariat. Untuk menjadi peserta, tidak diajukan persyaratan tertentu karena memang dibuka untuk umum yang memang berminat. Selanjutnya, metode lembaga sosial. Melalui pendidikan sosial atau usaha-usaha kemasyarakatan diupayakan agar ajaran-ajaran Islam yang bersifat praktis dapat menjadi tradisi yang memungkinkan terciptanya adat lembaga Islam yang bersifat normatif. Ketika Sunan Kalijogo mengajukan pandangan tentang metode dakwah menggunakan adat istiadat Jawa sarat ajaran Hindu Syiwo Buddho seperti slametan, sesajen, dan sejenisnya,

Sunan Ampel awalnya tidak dapat menerima dengan memberikan berbagai pertanyaan, "Apakah tidak mengkhawatirkan di kemudian hari? Bahwa adat istiadat dan upacara-upacara lama itu nanti akan dianggap sebagai ajaran Islam, sebab kalau demikian nanti apakah hal ini tidak akan menjadi bid'ah". Dengan begitu, diharapkan anggota masyarakat secara sadar atau tidak sadar menjalankan ajaran serta amalan-amalan Islam atau lembaga sosial, misalnya menjadikan masjid sebagai lembaga pendidikan, merayakan upacara kelahiran, perkawinan, kematian, lembaga kekeluargaan, khitan, dan sebagainya. Sesuai dengan karakter yang termuat di dalamnya, maka ilmu kalam atau tauhid disampaikan sebagai ta'lim (pengajaran) melalui pesantren,dan diberikan bagi orang-orang khawas secara terbatas. Sedangkan untuk menyampaikan nilai-nilai tauhid kepada masyarakat awam ditempuh dakwah melalui cerita-cerita wayang. Untuk kepentingan itu, antara lain diciptakan lakon Dewa Ruci, Jimat Kalima Soda, dan dikarang pula kitab-kitab bacaan umum. semisal Kitab Ambiyo (Kitab Al-Anbiya) yang berisi riwayat nabi-nabi. Selanjutnya, ilmu tasawuf, yang oleh Sunan Bonang disebut ushulsuluk? Ilmu ini disampaikan melalui wind, yaitu pengajaran dengan wejangan secara rahasia, tertutup dan

sangat eksklusif. Tempat dan waktunya ditentukan secara rahasia pula. Wirid ilmu tasawuf hanya disediakan bagiorang-orang tertentu yang telah berlemek atau memiliki basis yang memang diperlukan bagi laku suluk, thariq, thariqat. Ketentuan ini disamping atassuatu kelaziman karena tasawuf merupakan ilmu lanjut yang dengan sendirinya menuntut suatu ilmu dasar, juga demi mejaga keliru paham, salah pengertian dan salah penggunaan terhadap ilmu ini. Contoh bagi semua ini ialah antara lain ketika Raden Fatah menyatakan ingin berguru agama kepada Sunan Ampel, maka Raden Fatah di tanya lebih dulu apakah sudah memiliki dasar. Setelah mengetahui dasar yang dimilikinya kemudian Raden Fatah tidak lagi diharuskan masuk pondok pesantren, tetapi langsung ditempatkan dalam derajat lingkaran wirid. Raden Fatah memang membawa bekal ilmu yang sebelumnya ia miliki sejakdari Palembang.[3]

B. Pondok Pesantran Sidosermo Surabaya

Sidosermo merupakan suatu desa yang dipenuhi dengan kegitan hilir mudik orang mendalami ilmu agama Islam. Daerah Sidosermo sejak dahulu sering disebut

[3]Muslimah, Lailatul Maskhuroh, *Kontribusi Sunan Ampel (Raden Rahmat) Dalam Pendidikan Islam,* 142 (http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1552/962)

dengan nama-nama yang berlainan seperti Jiwosermo, Ndresmo, dan Sidosermo. Nama Sidosermo yang kemudian diikuti masyarakat sekitar dan berlanjut hingga sekarang. Sidosermo berasal dari dua suku kata yaitu "siddha" yang artinya (tercapai, terlaksana, berhasil, sempurna, hikmat, sakti) atau makhluk setengah dewa contoh dalam Islam wali, dalam Hindu Agastya dan "ashrama" yang artinya tempat tinggal para santri. Sidosermo digambarkan sebagai tempat orang yang berhasil mencapai suatu cita-cita dalam mencapai kesempurnaan.

Sebelum Islam Sidosermo menjadi tempat sakral yang sangat disegani karena dihuni oleh orang-orang yang telah mencapai kesempurnaan. Sidosermo merupakan perubah-an dari mandala pada masa sebelum Islam. Sartono Kartodirjo dalam gerakan di Jawa abad 19 menjelaskan bahwa pesantren Sidosermo menjadi salah satu tempat gemblengan bagi para pejuang yang melawan kolonialisme Belanda karena Sidosermo letaknya di tepi sungai dan terisolir. Seiring dengan semakin banyaknya santri yang datang ke desa Ndresmo dan agar tidak membingungkan, maka pada tahun 1972 M secara resmi desa Ndresmo berubah menjadi Sidoresmo dan Sidosermo.

Secara teritorial kampung Ndresmo berada di wilayah perbatasan kecamatan Wonokromo dan Wonocolo. Kebijakan tata kota Surabaya membuat kampung Ndresmo menjadi terbagi, sebagian berada di wilayah Kecamatan Wonokromo dan sebagian yang lain mengikuti wilayah

Kecamatan Wonocolo. Ndresmo yang mengikuti wilayah Wonokromo berubah nama menjadi Sidoresmo dalam, dan yang mengikuti wilayah Wonocolo berubah nama menjadi Sidosermo dalam. Akan tetapi masyarakat luas menyebut kampung itu dengan sebutan popular Ndresmo dalam.

Sidosermo dalam merupakan suatu desa yang dijadikan sebagai tanah "perdikan". Tanah perdikan merupakan tanah yang digunakan untuk kepentingan kehidupan beragama yang dibebaskan dari pajak negara. Perkembangan berikutnya menunjukkkan bahwa tanah perdikan meluas menjadi sebuah kampung khusus yang memiliki fungsi keagamaan seperti menjaga tempat-tempat suci, merawat dan mengembangkan pesantren serta menghidupkan masjid. Keberlakuan bebas pajak di Sidosermo dalam ini berlaku hingga sekarang.

Di Sidosermo sendiri terdapat satu pondok pesantren yang telah berdiri bersamaan dengan adanya desa Sidosermo tahun 1613. Keturunan Sayyid Sulaiman yaitu Sayyid Ali Akbar menjadi generasi pertama yang membuka lembaran keluarga besar Sidosermo, tinggal di Sidosermo dan memberikan pengajaran. Pada awal abad ke 19 M pesantren Sidosermo menjadi pesantren yang terkenal dengan pengajaran ilmu kanuragannya dan merupakan salah satu dari empat pesantren besar di Jawa. Pada awalnya hanya memiliki satu pondok sebagai tempat para santri menginap.

Pada masa-masa awal, pondok pesantren tersebut hanya mempunyai beberapa santri saja. Ilmu pokok yang diajarkan adalah membaca Al-Qur'an, Tauhid, dan Fiqih. Para santri di samping belajar ilmu agama, juga mendapatkan ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan ini sangat penting, terutama pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda pengembangan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren Ndresmo hanya dilakukan di serambi-serambi masjid dengan lampu tempel dan fasilitas lain yang sangat sederhana.

Masjid dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan ibadah dan belajar mengajar. Masjid yang merupakan unsur pokok kedua dari pesantren di samping berfungsi sebagai tempat melakukan shalat berjamaah setiap waktu shalat, juga berfungsi sebagai tempat belajar-mengajar. Pada sebagian pondok pesantren masjid juga berfungsi sebagai tempat i'tikaf dalam melaksanakan latihan-latihan, atau suluk dan dzikir, maupun amalan-amalan lainnya dalam kehidupan tarekat dan sufi.

Pada perkembangan selanjutnya pondok mempunyai banyak kyai yang kesemuanya termasuk keturunan Mas Sayyid Ali Akbar. Dari masing-masing kyai yang ada, tidak mengajarkan pelajaran dari kitab yang sama dengan kyai yang lain. Sebagian besar kyai merupakan tenaga pengajar dari santri-santri yang bermukim di pondok pesantren

Sidosermo. Santri yang menetap di pondok tersebut diberi kebebasan untuk memilih kepada kyai siapa santri akan mengaji. Meski demikian, setiap tahun santri yang datang untuk belajar dan mondok semakin bertambah. Besarnya minat masyarakat untuk belajar di pondok pesantren Sidosermo bukan saja didasari karena santri-santrinya yang alim dan terkenal dengan ilmu kanuragannya, melainkan memang atas dasar kesadaran masyarakat atas kebutuhan mendalami ilmu agama dan melihat perkembangan pondok pesantren Sidosermo sendiri.

Perkembangan pendidikan di pondok pesantren Sidosermo semakin menambah semangat masyarakat untuk belajar. Seiring dengan besarnya volume santri, mulailah bermunculan beberapa pondok pesantren di wilayah Sidosermo yang kesemuanya diasuh oleh keturunan dan ahli waris Mas Sayyid Ali Akbar. Satu diantaranya adalah pondok pesantren An-Najiyah.[4]

C. Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama

Pada tanggal 19 September 1929 dibentuk secara formal *Hoofdbestuur Nadhlatoel Oelama* (HBNO) bagian dari Ma'arif yang dipimpin oleh K.H. Abdullah Ubaid sebagai

[4]Siti Rohmatul Musanada dan Ali Haidar, *Peranan K.H. Mas Muhajir Mansur Dalam Mengembangkan Pondok Pesantren An-Najiyah Sidosermo Surabaya Tahun 1842-1989*, Jurnal AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Vol. 2, No. 1, Maret 2014, 61-63

presiden Ma'arif yang pertama di Surabaya. Tugas pokok pertama setelah pembentukan badan hukum ini adalah konsolidasi dan penyebaran organisasi.[5] Setelah pembentukan tersebut NU mulai berupaya menghapus dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum pada madrasah atau sekolah NU. Hal ini dibuktikan pada tahun 1929, LP Ma'arif membuka Madrasah Nahdlatul Wathan sebanyak 18 buah, memiliki 924 siswa laki-laki, 474 siswa Perempuan, 35 guru laki-laki, 14 guru Wanita dengan 7 buah Gedung berstatus wakaf, 2 gedung pinjaman, 8 gedung berstatus sewa. Madrasah tersebut berada di Surabaya antara lain Hidayatul Wathan Jagalan, Akhul Wathan Wonokromo, Nahdlatul Wathan Pancur Keling.

Pada awal perkembangan LP Ma'arif terdapat hambatan dalam system pengorganisasian. Kurikulum pada awal perkembangannya bersifat sederhana karena masih didominasi mata Pelajaran agama dan sedikit dalam menambahkan mata Pelajaran umum. Contohnya pada kurikulum madrasah Nahdlatul Wathan mata Pelajaran yang diajarkan pada kelas 1 adalah menulis halus Arab, Menyusun kalimat, membaca al-Quran, tajwid dan menghafal tuntunan agama dalam Bahasa Jawa. Mata Pelajaran kelas 2 adalah pendalaman materi kelas 1, ditambah dengan

[5]Maridjiin Syam, dkk, Sejarah Pendidikan Swasta di Indonesia (Lembaga Pendidikan Ma'arif N.U), (Jakarta : BP3K, 1976), 97

nahwu-saraf, tauhid, hisab dan membaca kitab. Mata Pelajaran kelas 3 adalah pendalaman materi ekalsa 2, sedangkan pada kelas 4 terdapat tambahan mata Pelajaran ilmu bumi (geografi).[6]

Nahdlatul Ulama (HBNO) di Surabaya mengintruksikan kepada seluruh cabang NU untuk menyelenggarakan kursus-kursus bagi guru-guru madrasah NU. Laporan yang ada di HBNO Surabaya menyebutkan bahwa kursus-kursus guru telah dilaksanakan antara lain, di kring NU Balung Jember, NU Cabang Probolinggo, Cirebon, Banyumas, Temanggung, Muntilan dan Gresik. Selain kursus-kursus, HBNO juga mendirikan sekolah guru dengan nama Jam'iyyatun Nashihin, sekolah yang diperuntukkan bagi para pemuda yang berumur 15 tahun ke atas untuk dididik menjadi guru madrasah, sekolah ini terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu daar, menengah dan atas, serta sekolah ini telah memiliki kurikulum yang jelas.

D. Al-Maratus As-Shalihah sebagai Madrasah Banat NU

Madrasah Banat adalah sekolah yang diperuntukkan bagi pengajaran khusus anak Perempuan, Madrasah banat NU didirikan selain didorong oleh ketentua fiqh, juga dimaksudkan untuk membentuk generasi muda atau anak-

[6]Hafizh Haikal Amrullah, Penghapusan Pendidikan Dikotomis : Lembaga Pendidikan Ma'arif Tahun 1938-1975, UNY

anak Perempuan NU menjadi Perempuan shalihah. Karena peran yang sangat signifikan dari Perempuan terhadap bangsa dan agama sebagai pendidik putra-putrinya nanti. Madrasah Banat NU muncul juga dikarenakan oleh seruan ketua HBNO K.H Machfudz Siddiq tentang pentingnya Pendidikan bagi anak-anak Perempuan NU agar masa selanjutnya dapat mengemban misi sbeagai penyangga bangsa dan agama. Pendirian Madrasah Banat ini secara politis dapat juga dibaca sebagai jawaban dari kritik kaum nasionalis pada masa itu mengenai rendahnya perhatian NU terhadap Nasib Perempuan.

Madrasah Banatu NU anatara tahun 1926 – 1938 sesuai laporan yang ada di HBNO hanya 2 buah, Madrasah Banat didirikan hanya merupakan tingkat *awaliyah* atau permulaan selama 2 tahun Pelajaran dan lebih mengutamakan pengajaran materi akhlak disamping materi keagamaan yang lainnya. Madrasah Banat NU seperti kebanyakan madrasah tingkat awaliyah yang dikelola NU diajarakan materi fiqh, tauhid, akhlak serta al-Qur'an, dengan menggunakan kitab-kitab rujukan seperti: *Mabadiul Fiqhiyah, Aqidatul Awam, Hidayatus Shibyan, Al-Akhlaq lil Banat* dan ada beberapa yang telah mengajarkan *Lughah Arobiyah*.[7]

[7]Khalid Mawardi, *Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU masa Kolonial Belanda*, Jurnal Studi Gender & Anak Yinyang: Vol 3, No. 2 Jul-Des 2008, 239-254

Bab 5
CAGAR BUDAYA BERBASIS SEKOLAH DI SURABAYA

A. Sekolah Dasar Cagar Budaya di Surabaya

Salah satu sekolah yang termasuk cagar budaya adalah SDN Alun-Alun Contong I – 87/SDN Sulung (sekarang) diresmikan pada tanggal 20 Desember 1900 yang bernama *Inslandzhe School Soeloeng* yaitu sekolah khusus pribumi di Sulung yang dibuka oleh Asisten Residern Kontroler (Arsip dari Soebaiaisch Handelsblad).[1]

Kehadiran lembaga pendidikan modern yang disponsori oleh pemerintah colonial Belanda telah membuka cakrawala baru bagi sebagian kecil rakyat kampung di kota Surabaya. Pada awal berdirinya sekolah-sekolah modern di kota Surabaya, rakyat kampong bukanlah subyek dari kegiatan pendidikan modern. Subyek utama dari kegiatan tersebut adalah anak-anak Eropa serta sebagian dari anak-anak para elit Bumiputra. Lembaga pendidikan Barat

[1]Soerabaijasch Handelsblad, 20 – 12 - 1900

pertama di Kota Surabaya didirikan pada tahun 1822 yang didirikan oleh C.C. Erner, lembaga pendidikan tersebut didirikan untuk menampung anak-anak orang tuanya tidak mampu memberikan pendidikan kepada mereka di rumah. Sekolah tersebut pada tahun 1845 memiliki murid 35 orang, tahun 1849 pemerintah kolonial di Surabaya mendirikan lembaga pendidikan resmi kedua berdasarkan keputusan nomor 37 tanggal 2 September 1849. Sekolah tersebut diajar oleh tiga guru pria dan seorang guru wanita. Jumlah murid digambarkan tidak sebanding dengan lebar bangunan yang digunakan untuk sekolah, sehingga murid-murid berdesak-desakan seperti Ikan Haring di dalam tong. Sasaran lembaga pendidikan tersebut adalah anak-anak Eropa yang tinggal di Surabaya.

Kesempatan sekolah pada anak-anak Bumiputra di Kota Surabaya baru dibuka pada tahun 1860. Pada tahun itu, pemerintah kolonial melonggarkan kesempatan pada anak-anak Bumiputra memasuki sekolah Barat, namun hanya dikhususkan untuk anak-anak dan kerabat para bangsawan. Mereka dididik di sekolah Barat agar kelak bisa menggantikan orang tua yang menempuh karir sebagai pejabat. Adapun anak-anak Bumiputra kebanyakan, hanya berkesempatan sekolah di sekolah agama (pesantren) di bawah bimbingan seorang kyai, yang jumlahnya pada waktu itu cukup banyak yaitu 162 buah. Mereka hanya diberi pelajaran membaca Al Qur'an, yang dibacakan dalam bahasa Arab tanpa mereka tahu artinya. Para murid

tersebut hanya dipersiapkan sebagai santri dan berusaha menerapkan secara cermat dalam kehidupan sehari-hari. Para murid yang datang dari jauh tinggal di rumah-rumah guru mereka atau di pekarangan.

Keberadaan lembaga pendidikan, baik pendidikan Barat maupun agama, telah memberi kesempatan kepada penduduk Bumiputra menyerap berbagai pengetahuan baru yang belum mereka peroleh sebelumnya. Pada tahap awal, hanya anak-anak Bangsawan dan kerabat yang boleh memasuki sekolah-sekolah umum, namun demikian dari merekalah pengetahuan baru menyebar ke anak-anak Bumiputra yang bukan bangsawan. Penyerapan serba terbatas tersebut biasanya melalui orang-orang tua Bumiputra yang bekerja di rumah-rumah bangsawan sebagai pembantu rumah tangga. Pada perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial atas desakan kaum progresif di negeri Belanda mengeluarkan kebijakan politik etis, yang salah satunya adalah memberi kesempatan membuka sekolah-sekolah rendah untuk anak-anak Bumiputra.

Lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah kolonial yang diperuntukkan bagi anak-anak Bumiputra antara lain Inlandsche School (Sekolah Bumiputra) kelas dua (Tweede Klasse), dengan lama sekolah lima tahun, Volksschool (Sekolah Desa) lama studi tiga tahun, serta sekolah lanjutan (Vervolgschool), yang merupakan lanjutan dari Sekolah Desa. Sekolah-sekolah tersebut berpengantar bahasa daerah. Untuk anak-anak yang berasal dari orang

tua yang memiliki kedudukan lebih baik, mereka bisa sekolah di Hollandsch Inlandschool (HIS) yang berpengantar bahasa Belanda. Ruslan Abdulgani, yang berasal dari Kampung Plampitan Surabaya merupakan salah satu anak kampung yang memiliki kesempatan sekolah di HIS.[2]

B. Sekolah HIS Sulung

HIS (*Hollands Inlandse School*) merupakan Sekolah Dasar yang diperuntukkan bagi kalangan atas anak-anak pribumi asli. Alasan didirikannya HIS adalah keinginan yang kuat dari kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan Barat. Pada awalnya pendirian sekolah ini menimbulkan keberatan dikalangan pemerintah Belanda, dikarenakan bahwa sekolah ini akan menimbulkan masalah pengangguran pada kalangan kaum intelektual yang tidak terserap oleh pemerintah dan perusahaan swasta. Ada pula yang merasa keberatan karena adanya pandangan biaya yang besar yang diperlukan untuk menyelenggarakan sekolah ini sehingga menguranggi anggaran biaya untuk memberantas buta huruf. Ada pula yang merasa takut jika kelompok nasionalis yang terdidik akan menyamai dan menyaingi orang Belanda. Pada awalnya HIS bernama Sekolah Kelas Satu dan pada tahun 1914 telah resmi bernama *Hollands Inlandse School*.

[2]Purnawan Basundowo, *Politik Rakyat Kampung di Kota Surabaya* Awal Abad ke-20, Jurnal : Gadjah Mada Journal of Humanities, Vol. 1, No. 1, November 2016

HIS dalam referensi lainnya di Surabaya tahun 1914 terdapat 4 sekolah, diantaranya:

- HIS Polackstrast (Soeloeng)[3]
- HIS Tembok Lor
- HIS Ketabang
- HIS Patjar Kling (Ketabang) sekarang Kaliasin[4]

Dalam Statuta 1914 No. 764, kurikulum HIS merupakan semua mata pelajaran ELS bukan kelas satu dengan perbedaan diajarkan membaca dan menulis bahasa daerah dalam aksara latin dan Melayu dalam tulisan Arab dan Latin. Kemudian pada tahun 1915 tidak meliputi bernyanyi dan pendidikan jasmani. Sejarah dianggap sensitif dari segi politik sedangkan bernyanyi dan pendidikan jasmani belum ada guru-guru yang kompeten dibidangnya. Membaca di kelas satu bertujuan untuk menguasai keterampilan membaca yang pada umumnya diberikan dalam tiga bahasa yaitu bahasa daerah, Melayu dan Bahasa Belanda.

Mata pelajaran yang paling penting adalah Bahasa Belanda. Pelajaran ini meliputi 43,9% dari seluruh waktu pelajaran. Mata pelajaran lain juga digunakan untuk mempelajari bahasa ini. Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian pegawai rendah (*Klein Ambtenaar Examen*), ini merupakan sebuah bukti dari keberhasilan HIS. Namun kurikulum yang diterapkan tidak disesuaikan

[3]HIS (*Hollandsch Islandsche School*) No. 1 Pollackstraat (Soeloeng) pada tahun 1914 dengan Kepala Sekolahnya H.M. Smissaert .
[4] Delpher, De Indische Courant, 09-05-1934

dengan kebutuhan anak dan masyarakat Indonesia tetapi disesuaikan dengan Belanda. Buku-buku yang dipelajari merupakan buku yang ditulis oleh pengarang Belanda yang memandang Indonesia dari segi pandangnya sendiri. Oleh karena itu pendidikan HIS sangat kental dengan unsur-unsur ke-Belandaan.

HIS merupakan lembaga utama untuk memperoleh pendidikan Barat, khususnya mempelajari Bahasa Belanda karena Bahasa Belanda sangat penting sebagai kunci untuk menempuh pendidikan lanjutan, sebagai sarana untuk masuk kebudayaan Barat dan syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan menguasai Bahasa Belanda juga bias membuat seseorang masuk ke dalam golongan elit intelektual. Untuk mengajarkan Bahasa Belanda dibutuhkan guru-guru Belanda, akan tetapi karena sulitnya memenuhi kebutuhan guru di HIS yang senantiasa bertambah, maka digunakan guru-guru Indonesia lulusan dari HKS (*Hogere Kweek School*).

Kepala yang ditunjuk adalah orang Belanda yang mempunyai *Hoofdacte* atau ijazah Kepala Sekolah, akan tetapi orang Indonesia juga bisa menjadi Kepala Sekolah apabila memiliki H.A (*Hoofdacte*). Sama halnya dengan Sekolah Kelas Satu, HIS dimaksudkan sebagai sekolah untuk golongan elit dan pada prinsipnya sekolah ini diperuntukkan bagi golongan sosial atas. Namun sulit untuk menentukan siapa yang termasuk golongan atas tersebut karena dalam pelaksanaannya anak-anak golongan atas tidak men-

cukupi dan lebih menyukai masuk ELS, walaupun secara resmi diploma HIS sama dengan diploma ELS, akan tetapi di mata masyarakat ELS lebih dihargai. Karena kekurangan murid golongan atas tersebut maka golongan rendah mendapat kesempatan belajar dan banyak diantara mereka yang berbakat intelektual kemudian mendapat kedudukan yang lebih tinggi dari pada anak golongan aristokrasi. Berdasarkan peraturan pemerintah, anak-anak yang dapat menempuh pendidikan di HIS ditentukan oleh empat kategori, yakni keturunan, jabatan, kekayaan, dan pendidikan.

Dengan demikian anak-anak wedana, demang dan anak-anak yang orang tuanya berpendidikan minimal MULO, atau anak-anak yang orang tuanya berpenghasilan minimal *f*. 100 sebulan dapat menempuh pendidikan di HIS. Akan tetapi, pada kenyataannya HIS ternyata juga membuka kesempatan bagi golongan swasta dan yang berpenghasilan rendah.[5] Pada tahun 1916 populasi HIS seluruhnya berjumlah 20.737 diantaranya 3.338 atau 16% anak wanita dan kebanyakan dari golongan atas. Di Jawa maupun di pulau-pulau lain, kebanyakan gadis adalah anak pegawai. Di Jawa 77,7% anak wanita berasal dari golongan bangsawan dan di luar Jawa 59,1%. Pegawai pemerintah yang

[5]Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, 117

telah menerima pendidikan Barat, rupanya progresif dalam sikapnya untuk menyekolahkan anak-anak gadisnya.[6]

HIS (Hollandsch Inlandsche School), di Surabaya terdapat HIS Negeri dan HIS bersubsidi. HIS negeri didirikan pada tahun 1914 dengan masa belajarnya 7 tahun dengan pengantar Bahasa Belanda. Bagi orang pribumi HIS merupakan jalan utama untuk meningkatkan derajad sosial, karena sekolah ini pada awalnya diperuntukkan bagi orang-orang elite saja. Setelah adanya Politik Etis sekolah ini bisa dimasuki oleh anak-anak golongan rendah. Ada empat dasar penilaian untuk masuk ke HIS, yaitu keturunan (memiliki keturunan dari golongan priyayi atau ningrat), jabatan (orang tua yang menjadi pegawai pemerintahan), kekayaan (orang tua yang memiliki kekayaan), dan pendidikan (orang tua yang pernah bersekolah di sekolah Belanda).

Selain itu PKB juga berpedoman pada penghasilan seseorang per tahunnya yang penilaian dari empat dasar untuk masuk HIS dibagi menjadi tiga kategori. Pertama kategori A, kaum bangsawan, pejabat tinggi, dan pekerja swasta kaya yang berpenghasilan bersih lebih dari 75 gulden tiap bulannya. Kedua kategori B, orang tua yang tamatan sekolahnya MULO dan Kweekschool, dan yang ketiga kategori C adalah pegawai, pengusaha kecil, militer,

[6]Erwin Siregar, *Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Pendidikan Kaum Bangsawan di Indonesia (1900 – 1920)*, Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan, Vol. 3, No. 1, Nopember 2016

petani, nelayan dan orang tua yang pernah mendapatkan pendidikan HIS. Orang tua yang termasuk dalam golongan C dianggap sebagai kelas menengah ke bawah, sedangkan kategori A dan B dianggap sebagai kelas atas dan mendapatkan prioritas pertama untuk masuk ke HIS. Di Surabaya HIS didirikan tahun 1916 di daerah Krembangan, kedua tahun 1918 HIS didirikan di Jl Bibis,[7] HIS memiliki peminat yang sangat besar terutama setelah adanya politik etis karena HIS mulai terbuka bagi golongan Bumiputra kelas rendah.[8]

C. Sekolah Rakyat

Setelah Belanda ditaklukkan oleh Jepang di Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, maka Belanda angkat kaki dari Indonesia. Semenjak itu mulailah penjajahan Jepang di Indonesia. Jepang muncul sebagai negara kuat di Asia. Bangsa Jepang bercita-cita besar menjadi pemimpin Asia Timur Raya. Sejak tahun 1940 Jepang berencana untuk mendirikan kemakmuran bersama Asia Barat Raya. Didorong semangat untuk mengembangkan pengaruh dan wilayah sebagai bagian dari rencana membentuk Asia Timur Raya yang meliputi Manchuria, Daratan China, Kepulauan Filiphina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Indo

[7]Syarifah Majid, *Ambachtsschool Surabaya Tahun 1853 – 1942*, (Skripsi : Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UNAIR Surabaya, 2016), 39

[8]Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, *Pendidikan Masa Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901 – 1942*, Jurnal Publika Budaya Vol. 1, No. 3, Maret 2015, 25

China dan Rusia di bawah kepemimpinan Jepang, negera ini mulai melakukan ekspansi militer ke berbagai negara sekitarnya tersebut. Dengan konsep "Hakko Ichiu" (Kemakmuran Bersama Asia Raya) dan semboyan "Asia untuk Bangsa Asia", bangsa fasis inipun menargetkan Indonesia sebagai wilayah potensial yang akan menopang ambisi besarnya. Dengan konteks sejarah dunia yang menuntut dukungan militer kuat, Jepang mengelola pendidikan di Indonesia pun tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ini. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di masa pendudukan Jepang sangat dipengaruhi motif untuk mendukung kemenangan militer dalam peperangan Pasifik.

Sekolah HIS berubah namanya pada tahun 1 Oktober 1942 atau 1 Oktober 2602 (Tahun Jepang) menjadi Sekolah Rakyat Soeloeng, dengan pembukaan Sekolah serta penyesuaian buku pelajaran Jepang untuk sekolah di Surabaya. Jepang melakukan pelarangan penggunaan bahasa Eropa (Inggris dan Belanda) dalam komunikasi lisan dan tulisan, dan hanya memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia dan Jepang dalam bidang pemerintahan dan pendidikan. Sehingga Jepang membentuk juru bahasa sebagai penerjemah ketika guru sedang mengajar, mempopulerkan bahasa Jepang sebagai pengganti bahasa Belanda dengan membuka sebuah sekolah bahasa Jepang, mengadakan perlombaan bahasa Jepang, memasukkan bahasa Jepang dalam ujian calon guru dan ujian akhir murid, bahkan surat tidak ditulis dalam bahasa Jepang atau

bahasa local tidak akan diantar. Berbagai komite dibentuk untuk menstandarisasikan bahasa Indonesia dan membuatnya menjadi bahasa nasional. Jepang juga mengganti nama Belanda ke nama Indonesia, seperti Buitenzorg menjadi Bogor ataupun Batavia menjadi Jakarta.[9]

Sarana pendidikan digunakan kependudukan Jepang untuk mempengaruhi kaum muda baik pendidikan umum maupun pendidikan khusus. Pendidikan umum ialah sekolajh rakyat (sekolah dasar) dan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah tinggi. Pendidikan khusus ialah pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Jepang. Sekolah guru empat tahun (*Cuto Shihan Gakko*), sekolah guru enam tahun (*Koto Shihan Gakko*).[10] Jepang memasukkan berbagai unsur dalam pendidikan di Indonesia, hal ini mengakibatkan adanya pengenalan terhadap budaya Jepang yang menyebar pada masyarakat pribumi. Jepang menerapkan konsep pengajaran sama seperti pada Negaranya dan mengganti segala jenis konsep pendidikan barat. Jepang berusaha menerapkan perpaduan kurikulum local dengan yang ada di Jepang, dan pendudukan Jepang membubarkan dan menutup seluruh sekolah yang dibangun dengan system pendidikan Belanda dan menggantikan dengan system pendidikan yang baru dan

[9]Rochidin Wahab, Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia, 22

[10]Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2008), 43

disesuaikan dengan kebutuhan Jepang sekaligus menghilangkan semua pendidikan hasil jaman Belanda.[11]

Bidang pendidikan sangat dimanfaatkan Jepang sebagai wadah untuk mengkordinir massa, serta menanamkan paham-paham Jepang.

1. Sekolah Rakyat

Pada masa pendudukan Jepang Hanya ada satu macam sekolah untuk sekolah dasar, yaitu disebut Sekolah Rakyat. Sekolah ini dibuka untuk umum dan semua golongan penduduk, tidak ada beda antara anak seorang Bupati dengan anak seorang petani dalam hal kemudahan masuk sekolah, sekolah rakyat ini juga menggantikan sekolah desa, sekolah kelas satu, sekolah kelas dua, atau HIS (*Hollandsch Inlandzche School*) atau ELS (*Europeesche Lagere School*).[12] Jepang mengadakan penyeragaman ini untuk memudahkan pengawasan terhadap sekolah-sekolah tersebut pada tanggal 1 Juni 1942, sekolah rakyat pertama kali dibuka adalah HIS Djagamonjet, HIS Gastenweg, dan HIS Baloelweg, Jatinegara. Dengan jumlah murid seluruhnya 966 orang, menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap ketiga sekolah rakyat ini. Jumlah sekolah rakyat meningkat lebih dari 32 % dan jumlah muridnya lebih dari 167 %, meningkat jumlah murid dibandingkan pada masa Hindia – Belanda, dikarenakan sekolah rakyat belajarnya lebih

[11]Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2003), 178

[12]Djohan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta : Manggala, 1993), 103

singkat dibandingkan sekolah pada masa Hindia – Belanda dan tidak adanya diskriminasi. Jepang juga memanfaatkan Sekolah Rakyat untuk mengontrol massa, terlihat dari diperbanyak sekolah-sekolah rakyat serta diberikannya biaya sekolah yang murah.

2. Pelatihan Guru

Pemerintah pendudukan Jepang mengadakan pelatihan-pelatihan atau indoktrinasi bagi guru untuk seluruh Jawa. Pelatihan pertama dimulai pada bulan Juni 1942 di Jakarta, setiap kabupaten diwajibkan mengirim wakilnya untuk mendapat gemblengan langsung dari pimpinan Jepang. Pelatihan yang diberikan yakni tentang mental ideology mengenai *Hakko Ichi-U* dalam rangka Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya, Latihan kemiliteran dan semangat Jepang (*Nippon Seisyin*), bahasa dan sejarah Jepang dengan adat istiadatnya, ilmu bumi ditinjau dari segi geopolitics, olahraga, lagu-lagu dan nyanyian Jepang berlangsung selama 3 bulan. Para guru menjadi pelaksana propaganda, setelah selesai pelatihan para guru dikembalikan ke daerah masing-masing dan meneruskan hasil dari pelatihan diberikan kepada rekan-rekan guru, murid-murid, dan masyarakat sekitar. Guru memiliki peranan penting dalam pendidikan di zaman kependudukan Jepang, banyaknya guru kompeten yang orang Belanda seringkali tidak mengajar lagi karena masuk kamp interniran. Sedangkan guru-guru Jepang biasanya biasanya mengajar bahasa Jepang atau olahraga. Semua buku yang berbahasa Belanda

diganti dengan buku terjemahan yang dalam waktu singkat dikeluarkan oleh Kantor Pengajaran (*Bunkyo Kyoku*), bilamana buku berbahasa Jepang tidak menerimanya, maka para guru berusaha menerjemahkan dan menyusun dari buku berbahasa Belanda.

3. Masa Pendidikan

Jepang menghapus diskriminasi antar sekolah, untuk tingkat dasar hanya ada satu macam sekolah yaitu sekolah rakyat (*Kokumin Gakko*) selama 6 tahun, setara dengan *volks school* pada zaman Belanda (kelas 1 sampai dengan kelas 3). Jepang memperluas pendidikan Sekolah Rakyat, walaupun kualitas pendidikan tidak terlalu diperhatikan seperti keadaan sekolah-sekolah kurang diperhatikan menjadikan peserta didik terkadang harus belajar di luar lapangan. Hal terpenting yang Jepang tekankan adalah rasa loyalitas rakyat Indonesia kepada kaisar Jepang karena telah memberikan pendidikan murah dan penanaman rasa nasionalisme dan semangat kemerdekaan.

4. Isi Pengajaran

Pengajaran bahasa Jepang yang ditanamkan di Sekolah Rakyat bertujuan untuk memahami kehidupan, semangat, dan kebudayaan Jepang. Dalam menjadikan bahasa Jepang sebagai bahasa pengantar, sekolah diterapkan beberapa jam perminggu khusus untuk bahasa Jepang seperti kelas 1 selama 3 jam, kelas 2 selama 4 jam, kelas 3 selama 5 jam, dan 4 – 6 selama 6 jam. Sehinga bahasa Indonesia mendapatkan perhatian lebih, pelajaran bahasa daerah diberi-

kan murid kelas 1 dan 2 sebagai bahasa pengantar sampai para murid mengerti bahasa Indonesia. Sedangkan, bahasa Indonesia baru diajarkan di kelas 3. Dalam memberikan pengajaran tersebut, sekolah-sekolah mengalami kekurangan guru dan meminta bantan kapada mahasiswa kedokteran tingkat empat untuk mengajar eksakta atau ilmu pasti di sekolah.

Tujuan Jepang mengambil hati bangsa Indonesia tidak jauh dari untuk mendapatkan pasukan tambahan dari bangsa Indonesia, maka pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi dengan kemiliteran, seperti rambut anak laki-laki harus digunduli, latihan baris-berbasis yang menyita waktu yang segar untuk menyerap pelajaran terganggu dengan *taisho* (senam), lalu terpotong lagi dengan *seikirei* (membungkukkan badan ke arah Tokyo untuk menghormati Dewa Jepang), pada siang harinya dilakukan latihan baris-berbaris atau perang-perangan. Fisik anak-anak menjadi semakin terkuras, ditambah lagi nutrisi yang minim. Selain itu, anak-anak diharuskan melakukan *ikinrohosyi* (kerja bakti), seperti mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, membersihkan asrama, dan memperbaiki jalan-jalan. Murid-murid menerima gemblengan sedemikian rupa agar mereka memili *Nippon Seishin* (bersemangat Jepang), para pelajar menyanyikan lagu kebangsaan Jepang *Kimigayo* dan lagu-lagu lainnya, dan menghormati bendera Jepang.[13]

[13]Tim Penulis Departemen Pendidikan, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996), 35

Isi dan tujuan dari pendidikan-pendidikan yang diberikan pada masa pendudukan Jepang: 1) Pengajaran dipergunakan sebagai alat propaganda dan juga untuk kepentingan perang. Murid-murid seringkali diharuskan kerja bakti, misalnya : membersihkan bengkel, asrama, membuat bahan-bahan untuk kepentingan pertahanan, dan sebagainya. 2) Untuk melipatgandakan hasil bumi, murid-murid diharuskan membuat pupuk kompos atau beramai-ramai membasmi hama tikus di sawah. Sebagian waktu belajar digunakan untuk menanami halaman sekolah dan pinggir-pinggir jalan dengan tanaman jeruk. 3) Pelatihan-pelatihan jasmani berupa pelatihan kemiliteran dan mengisi aktivitas-aktivitas murid-murid sehari-hari. Agar berjalan lancar, pada tiap-tiap sekolah dibentuk barisan-barisan murid. Barisan murid-murid SD disebut seinen-tai, sedangkan barisan murid-murid sekolah lanjutan disebut Gakutotai. 4) Untuk menanamkan semangat Jepang , tiap-tiap hari murid harus mengucapkan sumpah belajar dalam bahasa Jepang. Mereka harus mengusai bahasa dan nyanyian Jepang. Tiap pagi diadakan upacara, dengan menyembah bendera Jepang dan menghormati istana Tokyo. 5) Agar bahasa Jepang lebih populer , diadakan ujian bahasa Jepang untuk para guru dan pegawai-pegawai, yang dibagi atas lima tingkat. Pemilik ijazah ini mendapat tambahan upah.[14]

[14]Syaharuddin dan Heri Susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019, 50

D. Sekolah Pasca Kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945 pembelajaran di sekolah-sekolah lebih ditekankan pada semangat nasionalisme dan membela tanah air menurut Tim Uny (Fadli & Kumalasari, 2019). Proklamasi merupakan peristiwa yang luar biasa dimana hal ini membuat bangsa ini tidak dijajah lagi dan menimbulkan hidup baru dibidang apa saja salah satunya pada bidang pendidikan, perlu mencoba untuk mengubah sistem pendidikan yang dimana sesuai dengan suasana baru menurut Ahmadi (Fadli & Kumalasari, 2019). Oleh karena itu ada usaha perencanaan pada pendidikan serta pengajaran yang sudah dipersiapkan di hari-hari terakhir penjajahan Jepang menjadikan modal dalam pedoman pertama dilapangan pendidikan. Pendidikan masa awal kemerdekaan berlandaskan Pancasila yang merupakan falsafah negara menurut Somarsono Moestoko (Fadli & Kumalasari, 2019). Pada sejarah bangsa dan negara Indonesia sejak di Proklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tidaklah mudah dilalui untuk sampai sekarang. Oleh karena itu, sejarah pendidikan Indonesia di era Orde Lama dapat diantaranya periode 1945-1950 dan Periode 1950-1966. Sekarang akan dibahas tentang sistem pendidikan pada periode tersebut.

Pendidikan di Indonesia antara tahun 1945-1950 merupakan pendidikan masa perjuangan. Ciri-ciri utama pada masa periode ini ialah terdapat semacam dualisme

dalam pendidikan. Ketika salah satu pihak pendidikan dan pengajaran berlangsung dibeberapa daerah negara federal yang dikuasai atau dalam pengaruh Belanda, sedangkan yang dipihak lain langsung dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia. Sistem persekolahan dan Kurikulum Pendidikan di era awal kemerdekaan Sistem susunan di sekolah setelah Indonesia merdeka berdasarkan tingkat pendidikan seperti di masa Jepang tetap diteruskan, sedangkan pelajaran tetap sama dan bahasa pengantar yang telah ditetapkan ialah bahasa Indonesia. Buku-buku pelajaran yang digunakan adalah merupakan buku terjemahan dari bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia yang sudah dibuat pada masa Jepang. Pendidikan Rendah Dimulai dari pendidikan yang rendah di Indonesia dimulai pada awal kemerdekaan disebut dengan

Sekolah Rakyat (SR) masa pendidikannya awalnya 3 tahun menjadi 6 tahun. Yang dimana kurikulum SR diatur sesuai dengan keputusan Menteri PKK pada tanggal 19 November 1946 No. 1153/Bhg A yang menetapkan daftar pelajaran sekolah rakyat dimana penekanannya di pelajaran bahasa dan berhitung. Hal ini dapat dilihat dari 38 jam pelajaran seminggu, 8 jam digunakan untuk bahasa Indonesia, 4 jam digunakan untuk bahasa daerah dan 17 jam digunakan untuk berhitung untuk kelas IV, V dan VI.[15]

[15]Salsabiil Rihhadatul Aisy dan Hudaidah, *Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama*, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 3, No. 2 Tahun 2021, 571

DAFTAR PUSTAKA

Purnawan Basundoro, *Sejarah Pemerintah Kota Surabaya Sejak Masa Kolonial Sampai Masa Reformasi (1906 – 2012)*, (Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNAIR, 2012)

Nurhaji Heri, *Perkembangan Politik Etis Sektor Pendidikan di Surabaya Pada Masa Pemerintahan Alexander Willem Frederik Idenberg Tahun 1909 – 1916*, Jurnal Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah, Vol 5, No. 1, Maret 2017,

Sumber: "Perencanaan Pelestarian Benda-Benda Cagar Budaya" Bappeko, 2003

Sumber Data olahan dan Memori Kolektif Masyarakat Surabaya

Disbudpar Kota, 2009

Disbudpar Kota, 2007

Data Olahan dari Arsip Kota dan Disbudparkota

Septina Alrianingrum, *Cagar Budaya Surabaya Kota Pahlawan Sebagai Sumber Belajar (Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial di Universitas*

Negeri Surabaya), Tesis: Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010

R Dimas Widya Putra, *Identifikasi Kelestarian Kawasan Kota Lama Melalui Proteksi Bangunan Cagar Budaya Oleh Pemerintah Kota Surabaya*, Jurnal Pengembangan Kota (2016), Vo. 4, No. 2

Volare Amanda Wirastari dkk, *Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: Kawasan Cagar Budaya Bubutan, Surabaya)*, Jurnal Teknis ITS, Vol 1, No. 1 (September 2012)

Haidar Putra Dauly, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)

Uka Tjandra Sasmita, *Proses Kedatangan dan Munculnya Kerajaan Islam di Aceh, dalam A. Hasymy, ed., Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (http: Al – Ma'arif, cet iii, 1993)

Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1987)

Hasan Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung: Citapustaka, 2013)

Abuddin Nata, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 2003)

Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011)

Sartono Kartodirjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900*, (Jakarta: Gramedia, 1987)

Yusmar Basri, *Sejarah Nasional Indonesia V*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984)

S. Nasution, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Padang: The Zaki Press, 2009)

Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalisasinya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993)

C. Snouch Hurgronje, *Aceh Rakyat dan Adat Istiadanya*, (Jakarta: INIS, 1997)

Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, (Jakarta: Seri INIS xx, 1994)

Meli Yuliana & Ahmad Abas Musofa, *Ulama Intelektual Abad 15-16 M*, Journal of Indonesian History, 11(01)2023

Agus Sunyoto, *Atlas Wali Songo*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2016)

Muslimah, Lailatul Maskhuroh, *Kontribusi Sunan Ampel (Raden Rahmat) dalam Pendidikan Islam*, 142 (http://www.ejurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article/view/1552/962)

Siti Rohmatul Musanada dan Ali Haidar, *Peranan K.H. Mas Muhajir Mansur dalam Mengembangkan Pondok Pesantren An-Najiyah Sidosermo Surabaya Tahun 1842-1989*, Jurnal AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah Vol. 2, No. 1, Maret 2014.

Maridjiin Syam, dkk, *Sejarah Pendidikan Swasta di Indonesia (Lembaga Pendidikan Ma'arif N.U)*, (Jakarta : BP3K, 1976)

Hafizh Haikal Amrullah, Penghapusan Pendidikan Dikotomis: Lembaga Pendidikan Ma'arif Tahun 1938-1975, UNY

Khalid Mawardi, *Madrasah Banat: Potret Pendidikan Anak Perempuan NU masa Kolonial Belanda*, Jurnal Studi Gender & Anak Yinyang: Vol 3, No. 2 Jul-Des 2008.

Soerabaijasch Handelsblad, 20 – 12 - 1900

Purnawan Basundowo, *Politik Rakyat Kampung di Kota Surabaya Awal Abad ke-20*, Jurnal: Gadjah Mada Journal of Humanities, Vol. 1, No. 1, November 2016

HIS (Hollandsch Islandsche School) No. 1 Pollackstraat (Soeloeng) pada tahun 1914 dengan Kepala Sekolahnya H.M. Smissaert.

Delpher, De Indische Courant, 09-05-1934

Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*.

Erwin Siregar, *Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda Terhadap Pendidikan Kaum Bangsawan di Indonesia (1900 – 1920)*, Jurnal Education and Development STKIP Tapanuli Selatan, Vol. 3, No. 1, Nopember 2016

Syarifah Majid, *Ambachtsschool Surabaya Tahun 1853 – 1942*, (Skripsi: Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, UNAIR Surabaya, 2016)

Gusti Muhammad Prayudi dan Dewi Salindri, *Pendidikan Masa Kolonial Belanda di Surabaya Tahun 1901 – 1942*, Jurnal Publika Budaya Vol. 1, No. 3, Maret 2015.

Rochidin Wahab, *Sejarah Pendidikan Islam di Indoensia*.

Poesponegoro, Marwati dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008).

Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003)

Djohan Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, (Jakarta: Manggala, 1993).

Tim Penulis Departemen Pendidikan, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996)

Syaharuddin dan Heri Susanto, *Sejarah Pendidikan Indonesia (Era Pra Kolonialisme Nusantara sampai Reformasi)*, Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat, 2019.

Salsabiil Rihhadatul Aisy dan Hudaidah, *Pendidikan Indonesia di Era Awal Kemerdekaan Sampai Orde Lama*, Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, Vol. 3, No. 2 Tahun 2021.

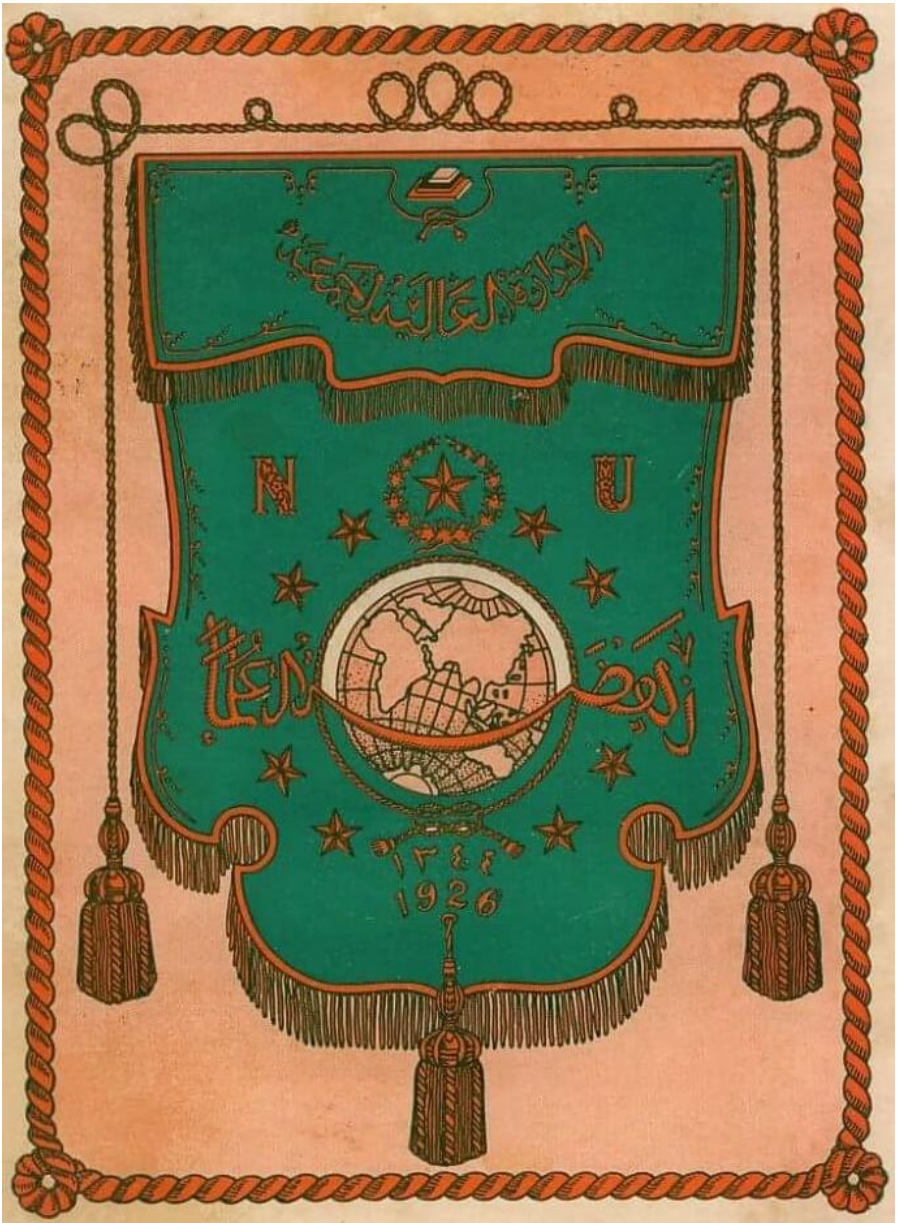

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Historisitas

LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Jejak Cagar Budaya di Surabaya

Jenis Lembaga Pendidikan Islam pada masa penjajahan Belanda awal dan pertengahan abad ke-20 adalah Lembaga Pendidikan pesantren yang masih berpegang secara utuh kepada budaya dan tradisi pesantren. Kemudian Pendidikan sekolah-sekolah Islam, selain mengajarkan ilmu-ilmu umum, juga mengajarkan ilmu agama.

Pendidikan Islam di Surabaya dimulai dari peran dan dakwah oleh Sunan Ampel yang mendirikan Ampel Denta. Mendirikan pesantren sebagai pusat kaderisasi penyebar Islam di Tanah Jawa. Selanjutnya di Surabaya dikenal dengan Pondok Pesantren Sidosermo, yang sampai saat ini menjadi pusat Pendidikan Pesantren Tua di Surabaya yang mengajarkan Pendidikan agama Islam. Di Abad ke-20 sebelum kemerdekaan, Nahdlatul Ulama memberikan kontribusi besar untuk Pendidikan Agama Islam di Surabaya dengan dibentuknya HBNO yang menjadi sentrum Gerakan organisasi dan Pendidikan.

FATAWA PUBLISHING
Jl. Mega Permai No. 8 Ngaliyan Semarang
Telp. 024-74019660, HP. 0813-2668-3562
Website: www.fatawa-publishing.com
Email: fatawapublishing@gmail.com

ISBN 978-623-6408-48-3